

FORCED MIGRATION

Edisi khusus
Agustus 2005

review

Tsunami: belajar dari respons kemanusiaan



Refugee
Studies
Centre

Forced Migration Review: majalah yang mengupas tentang isu-isu pengungsi dan perpindahan internal dengan jumlah pembaca terbanyak di dunia



Forced Migration Review

adalah forum pertukaran pengalaman praktis, informasi dan ide-ide antara para peneliti, pengungsi dan orang-orang yang secara internal terlanjar (para IDP), serta orang-orang yang terlibat didalamnya secara reguler. Diterbitkan dalam bahasa Inggris, Spanyol, Arab dan Perancis oleh Refugee Studies Centre/University of Oxford bekerjasama dengan Norwegian Refugee Council..

Editor

Marion Couldrey & Dr. Tim Morris
Asisten untuk Berlangganan
Sharon Ellis

Alamat Pos:

Sharon Ellis

Forced Migration Review

Refugee Studies Centre, Queen Elizabeth House, 21 St
Giles, Oxford, OX1 3LA, UK
Email: fmr@qeh.ox.ac.uk
Tel: +44 (0)1865 280700 Fax: +44 (0)1865 270721

Website

www.fmreview.org

Kontributor edisi khusus ini:

AUSTCARE

Concern

Brookings-Bern Project on
Internal Displacement

Christian Aid

Consortium of Humanitarian
Agencies, Sri Lanka

UN Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs (OCHA)

UN Office for the Coordination
of Humanitarian Affairs (OCHA)

World Vision Australia

World Vision Canada

World Vision USA

UNICEF

UNHCR Sri Lanka

Designed by Colophon Media.
Printed Lazergraphic (Pvt) Ltd
Sri Lanka.

ISSN 1460-9819



Salam editor

Tsunami yang menerjang Samudera Hindia pada tanggal 26 Desember 2004 telah mengundang respons kemanusiaan secara spontan yang sangat luar biasa. Meskipun jumlah akhir korban tewas diperkirakan mencapai sekitar 300.000 jiwa merupakan angka yang mengejutkan, akan tetapi angka ini masih merupakan bagian kecil dari jumlah korban tewas dalam beberapa tahun terakhir di Rwanda, Republik Demokratik Kongo atau Sudan. Meskipun tsunami telah menyita perhatian dunia serta menarik simpati luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menggerakkan solidaritas global namun kebutuhan para pengungsi yang kurang mendapat perhatian masih belum terpenuhi.



Corinne Owen

Skala operasi pemberian bantuan yang begitu tinggi, fakta bahwa sebagian besar negara yang dilanda tsunami telah lama bergelut dengan masalah pengungsi akibat konflik dan kenyataan yang menyedihkan bahwa komunitas kemanusiaan seringkali langsung bertindak tanpa pernah mengambil hikmah dari masa lalu, memotivasi kami untuk menerbitkan edisi tambahan pada majalah kami ini. Kami sangat senang dapat memperoleh koleksi berbagai artikel khusus, disertai dengan pandangan-pandangan LSM-LSM lokal dari negara-negara yang dilanda tsunami dan refleksi pemikiran dari sejumlah pemimpin kunci dalam berbagai operasi pemberian bantuan dan pemulihan pasca-tsunami. Kami juga sangat berterimakasih kepada para donor sebagaimana terlampir yang telah membantu terbitnya publikasi ini, terima kasih juga kepada kolega kami Eva-Lotta Hedman untuk nasehat editorinya dan kepada Simon Harris untuk mengkoordinir produksi dan distribusi di Colombo.

Terbitan Forced Migration Review (FMR) ini telah dicetak dan didistribusikan dari Sri Lanka dan untuk saat ini dicetak dalam Bahasa Inggris, juga akan diterbitkan dalam edisi Bahasa Indonesia, Sinhala dan Tamil.

Bagi anda yang baru pertama kalinya membaca FMR juga dapat membaca edisi-edisi lainnya dalam empat bahasa yang dikeluarkan secara reguler – yaitu dalam Bahasa Inggris, Arab, Spanyol dan Perancis. FMR yang diterbitkan oleh Refugee Studies Centre Universitas Oxford didistribusikan di 165 negara dan merupakan publikasi yang memuat isu-isu tentang pengungsi dan perpindahan secara internal yang paling banyak dibaca di dunia.

Tema edisi FMR yang akan datang akan membahas tentang prospek perdamaian di Sudan. Edisi ini akan didistribusikan beserta suplemennya pada bulan Oktober, diterbitkan atas kerjasama dengan Inter-Agency Internal Displacement Division dari UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), yang akan mengamati sejauh mana kapasitas masyarakat internasional dalam melindungi dan membantu para pengungsi internal atau internally displaced people (IDP).

FMR edisi khusus ini dipersembahkan bagi para korban tsunami yang kini menyongsong masa depannya. Kami berharap anda dapat menemukan artikel-artikel yang relevan dengan bidang pekerjaan anda dan semoga berbagai rekomendasi yang ada didalamnya dapat membantu komunitas kemanusiaan untuk merespons secara lebih efektif lagi berbagai bencana yang menimbulkan keterlantaran.

Teks keseluruhan artikel ini dalam edisi empat bahasa dapat dibaca di: [HYPER-LINK "http://www.fmreview.org/tsunami.htm"](http://www.fmreview.org/tsunami.htm) www.fmreview.org/tsunami.htm. Untuk informasi lebih lanjut, serta untuk masuk dalam daftar pengiriman kami, silahkan hubungi kami (lihat uraian detail yang ada di bagian sebelah kiri).

*Salam Manis
Marion Couldrey dan Tim Morris*

Copyright and disclaimer

Opinions in FMR do not necessarily reflect the views of the Editors or the Refugee Studies Centre. Any material from this publication may be freely reproduced, provided that acknowledgement is given to the source. We welcome comments on the content and layout of FMR and suggestions on how it could be improved as an information tool

Front cover photo: Painting by Sri Lankan child from Batticaloa district (see back cover).

Hikmah Dibalik Tsunami



Permainan politik dalam respons tsunami oleh Eva-Lotta Heman.....	4
Penilaian respons tsunami PBB oleh Marion Couldrey dan Tim Morris.....	6
Bencana alam dan hak-hak para IDP oleh Walter Kälin.....	10
Respons terhadap kesehatan masyarakat korban tsunami oleh Manuel Carballo dan Bryan Heal.....	12
Pencurian tanah besar-besaran oleh Scott Leckie.....	15
Apakah tsunami mempengaruhi pendanaan bagi berbagai krisis lainnya? oleh Toby Lanzer.....	17
Evaluasi DFID terhadap respons tsunami oleh David Horobin.....	18
<hr/>	
Indonesia	
Akses para IDP di Aceh pasca-tsunami oleh Claudia Hudspeth.....	19
Penampungan IDP ke barak-barak di Aceh oleh Lukman Age.....	22
Memastikan standar minimal untuk perawatan kesehatan reproduksi oleh Sandra Krause.....	24
Koordinasi kemanusiaan di Indonesia: dari sudut pandang LSM oleh Carsten Völz.....	26
Kekhawatiran terhadap perlindungan pasca-tsunami di Aceh oleh FMR Editors.....	28
Korban yang tak berdaya atau korban selamat yang kuat? oleh Ingvild Solvang.....	29

Sri Lanka

Konflik antar etnis dan bencana tsunami di Sri Lanka oleh Jayadeva Uyangoda.....	30
Refleksi kegiatan psikososial pasca-tsunami oleh Ananda Galappatti.....	32
Kehidupan pasca-tsunami di Sri Lanka oleh Simon Harris.....	34
Enam bulan: dalam ketakutan oleh Lyndon Jeffels.....	36
Tantangan Logistik oleh Steve Matthews.....	38
Nasib ikan kecil setelah-tsunami melanda oleh Irene Fraser.....	39

Thailand

Respons kemanusiaan terhadap para buruh migran Burma oleh Pia Oberoi.....	40
--	----

India

Simposium India untuk mereview respons tsunami laporan oleh Paula Banerjee dan Saolehasachi Basu Ray Chaudhury.....	42
Suara bagi kelompok rentan di Tamil Nadu oleh Max Martin.....	44
Efektivitas respons: pandangan masyarakat yang menjadi korban oleh Anisya Thomas dan Vimala Ramalingam.....	46

Maladewa

Korban tak berdosa: tsunami di Maladewa oleh Heidi Brown.....	48
--	----

Afrika

Perspektif rakyat Afrika terhadap tsunami oleh Bahame Tom Nyanduga.....	50
Masyarakat rentan di Somalia oleh OCHA Somalia office.....	51

Permainan politik dalam respons tsunami

oleh Eva-Lotta Hedman

Tsunami Asia tanggal 26 Desember 2004 telah menghancurkan kehidupan dan hampir seluruh komunitas pantai di kawasan Samudera India. Dalam hitungan menit gempa bumi yang berkekuatan 9,0 skala Richter melanda daerah pantai barat Sumatra bagian Utara di Indonesia, tsunami terbesar pertama menghantam kawasan pantai ini dengan dampak yang cukup parah, khususnya antara Banda Aceh dan Meulaboh di wilayah Aceh. Tekanan yang cukup dahsyat dari dasar laut juga menimbulkan tsunami yang menghantam komunitas pantai di beberapa daerah di Thailand, Burma, Malaysia, Sri Lanka, India bagian timur dan Maladewa sebelum menghantam wilayah pantai Afrika, dengan kerugian harta benda dan nyawa yang luar biasa. Setelah bencana alam raksasa ini, sekitar 290.000 orang tewas atau hilang, dan lebih dari satu juta orang mengungsi di 12 negara yang menjadi korban.

Seiring dengan merebaknya kabar tentang bencana alam ini, berbagai bantuan kemanusiaan secara besar-besaran dan bantuan dari berbagai perusahaan swasta maupun secara pribadi, dari berbagai LSM dan dari pemerintah pusat negara yang menjadi korban maupun negara-negara lainnya pun berdatangan. Berbagai ahli internasional di bidang koordinasi dan pengiriman bantuan serta pertolongan dalam kondisi tanggap darurat kemanusiaan yang cukup kompleks dikerahkan dan disebarkan ke daerah-daerah yang dilanda bencana. Di banyak tempat, besarnya skala kerusakan menimbulkan permasalahan logistik yang cukup sulit terutama dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang mendasar bagi masyarakat korban dan dalam beberapa kasus pihak militer nasional dan/atau militer asing dibutuhkan untuk mengakses masyarakat yang menjadi korban. Tantangan besar lainnya dalam tahap tanggap darurat juga muncul dari banyaknya masyarakat yang mengungsi. Hal ini khususnya terjadi di Aceh, mereka yang selamat banyak yang pindah dari daerah yang terkena musibah ke tempat-tempat umum maupun ke tengah-tengah komunitas masyarakat lainnya, keluarga penampung, tenda-tenda penampungan sementara serta rumah-rumah sementara lainnya.

Pemetaan situasi dan lokasi keberadaan mereka yang selamat tidaklah mudah. Pemerintah pusat, para donor internasional dan organisasi-organisasi kemanusiaan mengerahkan cukup banyak energi untuk mendata ruang lingkup dan luasnya dampak tsunami - antara lain meliputi rumah-rumah yang rusak, hewan ternak yang musnah

dan mata pencaharian yang hilang; seperti kehilangan harta benda, hak atas tanah dan dokumen-dokumen penting lainnya; serta kerusakan berbagai infrastruktur publik. Perkembangan penilaian kerusakan, survey dan pemetaan, serta gambaran berdasarkan pengetahuan para ahli, memberikan panduan dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dari para donor dan pemerintah pusat.

Selain isu-isu koordinasi dan kemampuan penanganan tanggap darurat kemanusiaan yang cukup kompleks, cukup penting pula untuk memfokuskan kembali perhatian kepada ruang lingkup, arah dan langkah-langkah dalam upaya pemberian bantuan dan pelaksanaan rekonstruksi yang masih melekat dalam hubungan kekuatan yang kompleks yang terbentuk oleh situasi politik nasional dan daerah di wilayah yang terkena bencana. Perbedaan respons terhadap dampak langsung yang luar biasa dari bencana alam yang dahsyat di 12 negara ini, dengan perbedaan dinamika politik, ekonomi dan sosial mereka masing-masing, telah membawa dampak yang luar biasa terhadap situasi politik keseharian dalam pelaksanaan upaya kemanusiaan baik secara amatir maupun profesional, serta lokal maupun internasional. Akan tetapi, hingga saat ini, hanya sebagian kecil upaya sistematis yang telah dilakukan untuk menguji peranan atau signifikansi dari dinamika dan pola politik yang mempengaruhi bantuan dan rekonstruksi kemanusiaan di daerah-daerah yang terkena dampak tsunami tersebut.

Ditengah-tengah bencana alam dan keadaan darurat yang sebelumnya telah cukup kompleks banyak korban tsunami yang selamat justru menghadapi berbagai kendala. Dalam kasus Aceh, dimana konflik, kekerasan dan kampanye anti-separatis besar-besaran telah mengakibatkan mengungsinya lebih dari 300.000 orang sejak tahun 1999, 'identitas' para IDP dari korban tsunami yang selamat pun sangat rentan dipolitisir dan diperebutkan. Dengan definisi mengenai istilah 'IDP' yang meliputi mereka yang oleh karena bencana alam terpaksa meninggalkan rumahnya, maka pejabat pemerintah Indonesia dan organisasi-organisasi kemanusiaan internasional terkadang menyebut mereka sebagai 'tuna wisma'. Perbedaan tersebut memiliki implikasi yang sangat penting untuk pengidentifikasi hak-hak dan jaminan perlindungan dan bantuan bagi masyarakat korban, serta peranan dan kewajiban pemerintah pusat maupun daerah yang ditetapkan dalam UN Guiding

Principles on Internal Displacement.

Di Thailand, dengan pendekatannya yang bersifat menghukum bagi sekian banyak pengungsi dan penduduk buruh migran dari negara tetangga yaitu Burma, menunjukkan adanya bukti diskriminasi secara de facto oleh pejabat pemerintah lokal dan warga Thailand terhadap warga Burma yang merupakan korban tsunami yang selamat di beberapa provinsi bagian selatan. Dengan dideklarasikannya posisi pemerintah Thailand yang begitu mandiri dalam pengkoordinasian dan pengiriman bantuan darurat pasca-tsunami, telah memberikan peluang yang tak tertandingi bagi Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, dan partai politiknya Thai Rak Thai (Rakyat Thai mencintai Thailand) untuk melakukan kampanye pemilu pada tanggal 6 Februari 2005, dimana para buruh migran Burma pun relatif terisolir dari sumber-sumber alternatif bantuan dan dukungan, termasuk bantuan dari pemerintah mereka sendiri yang dikoordinir oleh pihak militer. Para buruh migran Burma tidak dimasukkan dalam pendistribusian bantuan darurat dan pelaksanaan program bantuan dari pemerintah Thailand oleh para pejabat lokal, dan target penangkapan 'para buruh migran ilegal' oleh polisi setempat juga merebak pasca-tsunami, yang dalam beberapa kasus dideportasi kembali ke Burma.

Dalam kasus India, dimana pemerintah juga menolak berbagai tawaran respons tanggap darurat yang dikoordinir oleh lembaga kemanusiaan internasional, terdapat bukti-bukti diskriminasi yang dilakukan oleh para pejabat lokal maupun masyarakat seperti dalit (disebut juga sebagai mereka 'yang tak tersentuh') di sejumlah daerah yang dilanda tsunami. Terperangkap dalam struktur sosial yang berdasarkan tingkatan kasta dan dominasi, menurut laporan, para dalit yang selamat kurang diterima di rumah-rumah maupun di tempat-tempat penampungan sementara (kasta yang lebih tinggi) para IDP dari komunitas nelayan; beberapa dalit bahkan diusir. Terdapat pula bukti bahwa para IDP lainnya menghalangi pejabat pemerintah, staff LSM dan kelompok sosial kemasyarakatan lainnya dalam pendistribusian bantuan darurat untuk para dalit.

Dimensi penting lainnya dari respons darurat tsunami berasal dari kekuatan strategis militer di beberapa daerah terparah, khususnya di Aceh, provinsi bagian Utara dan Timur Sri Lanka serta Kepulauan Nicobar di India. Aceh telah dimilitarisasi secara besar-besaran dengan ditempatkannya 40.000 tentara sejak

ditetapkannya status darurat militer pada bulan Mei 2003. Dengan adanya relokasi secara paksa ke kamp-kamp yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kampanye anti-pemberontakan baru-baru ini, peranan pasukan militer Indonesia dalam pendistribusian bantuan darurat pasca-tsunami, serta dalam pengkoordinasian relokasi IDP ke 'barak-barak' yang cukup kontroversial, secara serius telah mengancam prinsip-prinsip bantuan kemanusiaan dalam beberapa kasus. Lebih lanjut, pada kasus di Sri Lanka yang merupakan daerah yang terdampak tsunami dengan sebutan 'daerah yang tidak jelas' yang berada di sepanjang pantai yang dikontrol oleh Organisasi Pembebasan Macan Tamil Eelam (LTTE), pelaksanaan operasi pemberian bantuan pun terhambat karena pemerintah di Colombo telah melarang keras mekanisme apapun yang ingin melangkahi kewenangan pusatnya. Tidak adanya respons dari pemerintah pusat juga tampak dari kasus Somalia. Dan akhirnya, di kepulauan Nicobar, yang merupakan basis strategis angkatan laut India, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa bantuan tsunami dan berbagai upaya rehabilitasi dilaksanakan oleh pihak militer, dan mereka mengabaikan masyarakat asli yang menjadi korban serta

melanggar administrasi masyarakat sipil lokal.

Dengan banyak terlibatnya aktor kemanusiaan dalam pemberian bantuan tsunami dan pelaksanaan rekonstruksi yang mulai mengevaluasi setiap respons, diharapkan bahwa penilaian-penilaian tersebut akan menawarkan perspektif yang cukup kritis dan komparatif terhadap berbagai respons yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang beroperasi di dua daerah bencana atau lebih, yang tentunya harus menghadapi perbedaan dan berbagai tantangan politis yang berbeda pula. Lamanya keberadaan UNHCR dan badan-badan PBB lainnya di Sri Lanka sebelum tsunami menunjukkan perbedaan yang cukup kontras dengan Aceh, khususnya menyangkut sejauh mana implikasi dari upaya-upaya bantuan yang telah dilancarkan.

Kekhawatiran tentang permasalahan dalam pemenuhan hak-hak para IDP akibat bencana untuk mendapatkan perlindungan telah menarik perhatian menyangkut hubungan antara kekuasaan dan politik dimana IDP terikat didalamnya. Para penulis dalam edisi khusus FMR ini menyoroti tentang adanya kekhawatiran mengenai masalah perlindungan

pasca tsunami, termasuk akses bantuan, relokasi secara paksa, pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan, pemulangan secara sukarela dan aman, serta kehilangan dokumen dan ganti rugi lahan. Berbagai kekhawatiran tersebut harus ditangani sedini mungkin karena perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya cenderung semakin merosot. Disaat banyak media yang terfokus pada berita-berita lainnya, justru banyak korban tsunami yang tetap tinggal di daerah-daerah yang terus dilanda konflik. Cukup banyak waktu untuk memfokuskan pada analisis wacana dan dinamika mengenai keamanan dan politik negara setiap harinya secara lebih sistematis dan komparatif, sejauh mana hal tersebut telah mempengaruhi situasi tanggap darurat kemanusiaan yang cukup kompleks ini dan implikasinya terhadap perlindungan dan bantuan bagi para IDP..

Eva-Lotta Hedman adalah Senior Research Fellow di Refugee Studies Centre, University of Oxford, dengan spesialisasi di bidang dinamika konflik, kekerasan dan pengungsian internal di Asia Tenggara. Email: eva-lotta.hedman@qeh.ox.ac.uk

Wreckage of beachfront homes in Banda Aceh, Indonesia.



Penilaian respons tsunami PBB

oleh Marion Couldrey dan Tim Morris

Laporan yang disampaikan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) menunjukkan pelajaran yang dapat diambil dari respons kemanusiaan. Berbagai rekomendasi menekankan pada kebutuhan akan kewenangan dan kepemimpinan atas respons bencana secara nasional serta pemulihan, peningkatan koordinasi, transparansi penggunaan sumber-sumber dana, keterlibatan masyarakat sipil dan penekanan yang lebih besar terhadap penurunan resiko.

Di 12 negara yang menjadi korban tsunami, lebih kurang 240.000 orang tewas, 50.000 orang hilang dan terancam tewas serta lebih dari satu juta orang mengungsi. Masyarakat daerah pantai yang miskin menjadi korban terparah. Di beberapa daerah bencana, jumlah wanita yang tewas tiga kali lipat dari kaum pria. Lebih dari sepertiga anak-anak menjadi korban. Di Indonesia, Sri Lanka dan Somalia bencana yang terjadi dilatarbelakangi oleh konflik yang kompleks dan telah mengakar yang memiliki implikasi besar bagi pengorganisasian dan pemberian bantuan kemanusiaan.

Sehubungan dengan permohonan bantuan dari sejumlah negara yang menjadi korban, tim Penilaian dan Koordinasi Bencana PBB (UNDAC) dengan personil yang berasal dari 18 negara dengan cepat dikerahkan ke lima negara korban tsunami. Enam belas lembaga PBB, 18 tim respons dari International Federation of the Red Cross/Red Crescent Societies (IFRC), lebih dari 160 LSM internasional dan berbagai maskapai swasta yang tak terhitung jumlahnya serta kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan lokal memberikan bantuan darurat pangan, air dan layanan kesehatan bagi sekitar lima juta orang yang memerlukan bantuan. Satuan-satuan militer dari 35 negara juga ikut membantu upaya pemberian bantuan tersebut. UN Joint Logistics Centre (UNJLC) mendirikan pusat-pusat koordinasi di Indonesia dan Sri Lanka untuk memberikan bantuan logistik serta membantu dalam pengkoordinasian dan penggunaan asset-asset militer.

Respons yang tepat waktu ini menyebabkan tidak sampai terjadinya penularan penyakit atau epidemi dan sekitar dua juta orang telah mendapatkan bantuan medis darurat dan bantuan pangan. Enam bulan setelah bencana, kebutuhan darurat telah terpenuhi. Hampir semua korban telah mendapatkan akses pasokan air yang cukup dan memadai, meskipun di banyak kamp fasilitas sanitasi berada di bawah standar minimum yang diakui secara internasional. Di Sri Lanka, seki-

tar 30.000 rumah sementara telah dibangun dan di Indonesia 11.000 rumah tahan-gempa sedang dalam pembangunan. Akan tetapi jelas bahwa meskipun tahap pemulihan terus mengalami kemajuan, namun kebutuhan kemanusiaan yang signifikan - khususnya bagi para wanita, anak-anak, golongan minoritas, para buruh migran dan para pengungsi - akan terus ada selama berbulan-bulan. Sebagai contoh, lebih dari 9.000 kepala keluarga di Sri Lanka masih tinggal di tenda-tenda.

Kecuali Somalia, negara-negara yang terkena bencana memiliki pemerintahan nasional yang kuat, lembaga-lembaga nasional yang terbina dengan baik dan berfungsi kerangka kerja secara legal. Hal tersebut sangat membantu keberhasilan upaya-upaya pemberian bantuan. Di banyak daerah, berbagai operasi didukung dengan keterlibatan berbagai departemen dari pemerintah pusat, angkatan bersenjata dan - struktur pemerintahan daerah yang masih utuh. Kolaborasi antara aktor pemberi bantuan internasional maupun nasional serta pemerintah memfasilitasi pendistribusian bantuan dan mempermudah pelaksanaan serah-terima berbagai kegiatan kemanusiaan dan pemulihan awal kepada lembaga-lembaga pemerintah. .

Koordinasi

Dengan adanya tsunami, PBB menghadapi tantangan terbesar yang pernah dihadapinya. Waktu dan skala peristiwa bencana tersebut telah memicu berbagai aksi bantuan dari para aktor dan masyarakat kelas atas, serta pihak swasta dan pemerintah. Kucuran bantuan tersebut merupakan amanah atas kedermawanan masyarakat internasional, namun pada waktu yang bersamaan menempatkan aktor-aktor kemanusiaan pada posisi yang banyak disoroti karena mereka menaruh harapan tentang bagaimana para aktor tersebut menjalankannya dan bagaimana mereka bertanggungjawabkan dana-dana yang telah dikeluarkannya.

Secara umum, koordinasi berjalan

lancar. Pengerahan staff, peralatan, transportasi dan bantuan lainnya oleh para donor dan sektor swasta pra-tsunami sangat membantu respons tepat pada waktunya. Akan tetapi, pelaksanaan koordinasi mengalami kendala. Sebagian masyarakat justru kebanjiran barang bantuan dengan para aktor yang memiliki kapasitas membantu mereka. Bantuan tidak selamanya dapat memenuhi kebutuhan. 'Kemacetan lalu-lintas kemanusiaan' seringkali mengarah kepada miskomunikasi, perencanaan ad hoc (khusus), tertundanya bantuan dan tumpang tindih kegiatan.

Keinginan pemerintah untuk mempermudah persyaratan birokrasi dapat mempercepat kedatangan para pekerja kemanusiaan dan pasokan bantuan pertama. Namun, dalam beberapa kasus prosedur masuk selanjutnya mulai berbelit-belit. Hal ini mengakibatkan tertundanya pengerahan berbagai item yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasi (seperti komputer, perangkat telekomunikasi dan kendaraan). Beberapa pemerintahan memberlakukan sejumlah larangan dalam penggunaan jaringan satelit. Larangan administratif ini telah memperlambat upaya pemberian dan pembagian bantuan yang banyak dibutuhkan.

Respons yang muncul dari kesenjangan yang menyangkut tempat tinggal, air dan sanitasi tidak hanya memperbesar masalah tetapi juga menunjukkan ketidakmampuan komunitas kemanusiaan untuk menugaskan dan menempatkan staff yang ahli dan berpengalaman dengan cepat. Masalah respons tersebut juga muncul dari tingginya intensitas pertukaran staff PBB dan tertundanya penempatan staff yang ahli di bidang pengolahan informasi, komunikasi dan hubungan sipil-militer. Koordinator sipil-militer dari Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) dan Pusat Informasi Kemanusiaan (HIC) dikirim ke lapangan melalui jalur resmi yang cukup memakan waktu. Dengan demikian mobilisasi sistem telekomunikasi serta pengumpulan, analisis dan penyebaran data menjadi sulit dan kurang memenuhi standar yang telah disepakati. Untuk menghadapi berbagai krisis di masa yang akan datang, tampak jelas bahwa sesuatu yang lebih harus dilakukan untuk memupuk kemampuan kesiagaan respons kemanusiaan yaitu dengan meningkatkan dan memperkuat jaringan staff profesional dan administrasi dengan mendukung kemitraan strategis untuk mengimbangi kapasitas LSM dan kemampuan lokal yang ada. Mekanisme respons global yang disponsori oleh PBB, dengan tenaga ahli yang cekatan untuk melancar-



A man carries donated relief supplies pasta destroyed home with a tsunami-thrown fishing boat on its roof, Hambantoto, Sri Lanka.

kan respons awal dan melakukan pembangunan dengan memanfaatkan berbagai kapasitas lokal maupun regional yang ada, telah mempercepat pengiriman pasokan dan tim pemberi bantuan.

Peningkatan hubungan sipil-militer diperlukan untuk memastikan kesesuaian pemenuhan yang lebih baik antara kebutuhan dan pemanfaatan pesawat udara, kapal laut, mobil, personel maupun asset-asset militer lainnya. Respons militer cukup cepat dan baik dalam upaya penyediaan akses ke berbagai kelompok masyarakat yang sulit dijangkau, akan tetapi dalam beberapa kasus kegiatan para aktor sipil dan militer terkadang tumpang tindih. Barang-barang bantuan tidak selamanya didistribusikan dalam bentuk dan jumlah yang tepat yaitu yang paling banyak dibutuhkan dan sejalan dengan jalur bantuan yang telah dirintis. Masalah ini diperburuk oleh kurang dimengertinya struktur komando militer dan kurangnya pembagian informasi antara komunitas kemanusiaan dengan pihak militer. Tsunami telah membawa hikmah dan kini sangat mungkin jika pihak militer akan terlibat secara signifikan dalam berbagai operasi kemanusiaan yang akan datang. Dengan demikian perlu dibina jalur komunikasi yang lebih baik dan prosedur koordinasi antara pihak militer dengan para mitra kemanusiaan.

Di banyak kasus, koordinator kemanusiaan/daerah (RC/HC) PBB

kekurangan sumber daya staff untuk memenuhi posisi kepemimpinan yang diperlukan. RC/HC harus sesegera mungkin diisi oleh staff dan kapasitas yang memadai untuk menjalankan fungsi koordinasi yang cukup penting serta kapasitas untuk memulai kegiatan pemulihan sejak dini.

Masyarakat internasional harus mengklarifikasikan siapa yang mengkoordinir pemulihan pasca bencana. Disaat respons bencana kini mulai terbentuk dengan standar dan alat koordinasi yang diterima secara jelas dan universal, pemulihan bencana – yang melibatkan para aktor dalam skala yang cukup luas – justru tidak memiliki struktur koordinasi formal apapun. Hal ini benar dirasakan terutama untuk koordinasi internasional di tingkat negara dan diperburuk lagi oleh kenyataan bahwa para koordinator daerah (resident coordinator) tidak memiliki dukungan yang cukup.

Tantangan pengungsian dan perlindungannya

Pasca-tsunami, sekitar satu juta orang mengungsi. Namun beberapa minggu pertama sesudahnya, jumlah pengungsi sementara tersebut mulai berkurang seiring dengan semakin stabilnya situasi dan banyaknya masyarakat yang mulai kembali ke desanya masing-masing. Perubahan yang terjadi seiring dengan perpindahan populasi pengungsi (khusus-

nya di Aceh), ketegangan yang muncul di tengah-tengah keluarga yang menjadi tuan rumah dan kehancuran mata pencaharian telah menantang kemampuan para pejabat nasional dan masyarakat internasional untuk memberikan respons sesuai dengan kebutuhan yang berbeda dengan berbagai kategori penduduk yang menjadi korban tsunami. Pelaksanaan relokasi penduduk untuk sementara waktu semakin sulit karena situasi politik khususnya di Sri Lanka dan Indonesia, serta karena relokasi yang sebelumnya telah dilaksanakan pula di Maladewa.

Pemenuhan kebutuhan khusus dengan cepat bagi para IDP sangatlah penting. Prinsip-prinsip kemanusiaan menyatakan bahwa berbagai upaya harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan untuk menyambung-hidup bagi sekian banyak orang yang meminta diperhatikannya berbagai kebutuhan bantuan dan perlindungan khusus bagi para IDP. Mereka perlu dilibatkan dalam penyusunan rencana bantuan sejak awal untuk membantu memastikan bahwa bantuan tersebut telah didistribusikan dengan adil dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Langkah-langkah khusus untuk pemberian bantuan dan perlindungan bagi para IDP dan keluarga yang menjadi tuan rumah dengan demikian harus diprioritaskan. The UN Guiding Principles on Internal Displacement untuk bencana alam juga harus diperluas..

Kemurahan hati para donor menjadi tantangan bagi pendanaan

Bencana ini telah menggerakkan hati dan sumber-sumber dana masyarakat maupun pribadi sedemikian besarnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. PBB memperkirakan total US\$6,8 milyar telah dijanjikan untuk tsunami: US\$ 5,8 milyar dari sumber dana pemerintah dan US\$1 milyar dari sumbangan perusahaan swasta maupun pribadi. Dalam 15 hari setelah bencana 60% dari dana sebesar US\$977 juta untuk bantuan kemanusiaan dan pemulihan yang diusulkan dalam UN Flash Appeal telah dipenuhi atau disediakan. Financial Tracking Service (FTS) OCHA memperkirakan bahwa hingga bulan Juni 2005, US\$880 juta telah diusulkan dan US\$162 juta tambahan juga telah dipenuhi. Sebagian besar dana tsunami yang dikurangkan bukan melalui jalur PBB, tetapi melalui organisasi-organisasi internasional seperti IFRC (yang melaporkan bahwa telah menerima \$US2,2 milyar) dan LSM-LSM lainnya.

Disaat kesiapan sumber dana yang cukup banyak memudahkan komunitas kemanusiaan untuk dapat beroperasi tanpa harus memikirkan besarnya dana, lingkungan finansial dengan banyaknya bantuan yang terbentuk dari sekian banyak kedermawanan justru menekan organisasi-organisasi kemanusiaan ini untuk dapat segera menghabiskan dana tersebut dengan cepat. Karena dipacu oleh begitu besarnya cadangan dana dan tekanan dari para donor untuk segera melihat hasilnya, maka banyak organisasi yang meluncurkan proyek-proyeknya secara bersamaan dengan mengerahkan staff dalam jumlah yang cukup besar. Dengan desakan untuk bekerja cepat, para aktor internasional justru seolah-olah mengabaikan rekanan nasional dan lokalnya.

Dalam beberapa kasus, banyak organisa-

si yang telah menerima dana jauh lebih banyak dari nilai yang sanggup mereka habiskan pada tahap tanggap darurat. Bahkan beberapa diantaranya telah menyusun kembali prosedur perencanaan mereka sendiri dengan cepat serta menyusun strategi sedemikian rupa untuk menyusun laporan dan menyampaikan tentang berapa besar dana bantuan yang telah digunakan. Untuk menjaga kepercayaan publik, selain menyangkut tentang cara mereka menangani dana yang tersisa - organisasi kemanusiaan ini juga harus menyampaikan maksud dan tujuannya dengan jelas kepada para donornya.

Pelaporan yang lebih jelas dan pertanggungjawaban yang transparan diperlukan untuk memastikan bahwa para pendonor baru yang telah memberikan kontribusi untuk tanggap darurat tsunami akan tetap melakukan hal yang sama untuk tanggap darurat lainnya di masa-masa yang akan datang. Komunitas kemanusiaan telah menetapkan mekanisme pertanggungjawaban yang cukup mantap, namun tingginya volume dana yang dikurangkan dan dikontribusikan untuk tsunami, khususnya dari sektor swasta, telah meningkatkan kecermatan terhadap sejauh mana pengeluaran dana-dana tersebut. Perusahaan jasa akuntansi internasional PricewaterhouseCoopers telah memberikan bantuan gratis untuk membantu PBB dalam menerapkan sistem akuntansi dan penelusuran cepat terhadap berbagai kontribusi yang ada dalam usulan tsunami flash appeal dan juga membantu ekspansi sistem penelusuran keuangan PBB yang ada untuk memenuhi kebutuhan tanggap darurat.

Dari pengalaman masa lalu - setelah angin topan Mitch tahun 1998 dan gempa Bam di Iran Desember 2003 - tampak bahwa dana-dana yang dengan mudahnya mengalir saat merebak berita terjadinya bencana, akan segera menguap seiring dengan berkurangnya

perhatian publik. Mengingat bahwa peluang untuk penggalangan dana bencana cukup sempit dan hanya dalam tempo yang sangat singkat, maka ruang lingkup tsunami flash appeal diperluas hingga ke tahap pemulihan. Fleksibilitas tersebut memungkinkan dilakukannya penggalangan dana untuk rumah, pembangunan sumber penghidupan, mikro-infrastruktur dan lingkungan serta untuk mempercepat dimulainya rencana dan program pemulihan. Perluasan pengajuan permohonan (flash appeal) untuk memenuhi kebutuhan pemulihan tersebut harus menjadi prosedur standar pasca bencana. Penyusunan database untuk penelusuran finansial umum - yang meliputi bantuan resmi, pendanaan dari LSM dan berbagai kontribusi dari sektor swasta - dalam satu sistem yang komprehensif akan dapat memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pemulihan.

Menghilangkan kesenjangan antara bantuan dan pembangunan

Keikutsertaan dan partisipasi nasional sejak awal dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pemulihan sangatlah penting. Partisipasi dari para ahli manajemen bencana dan para teknisi lokal sangat penting untuk memastikan bahwa program pemulihan turut mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang menjadi korban. Perhatian dini untuk pemulihan pada tahap tanggap darurat telah membantu masyarakat lokal untuk kembali berdiskusi. Di Indonesia, pembersihan puing-puing dilakukan dengan cara 'memberikan uang tunai untuk setiap pekerjaan' yang dapat memberikan suntikan dana bagi perekonomian lokal disamping memberikan dukungan psikososial kepada 11.000 orang yang ikut ambil bagian. Akan tetapi, di beberapa daerah, pemulihan secara dini tidak memungkinkan karena rusaknya jalan-jalan telah

menjadi kendala untuk transportasi awal dan pengiriman material-material untuk pelaksanaan rekonstruksi. Semakin meningkatnya penanganannya oleh para kontraktor swasta dengan mitra yang ada serta kemampuan logistik yang kian meningkat serta tersedianya jasa angkutan lewat udara akan membantu penyelesaian masalah pemulihan ini.

PBB kurang memiliki mekanisme dengan sistem yang luas untuk memasukkan pengukuran resiko kedalam upaya-upaya pemulihan pasca bencana.

Street in the centre of Banda Aceh (some 4km from the coast).





Temporary shelters, Sri Lanka.

Dengan demikian perlu dilakukan pengidentifikasi metodologi penilaian yang cocok untuk mengidentifikasi kebutuhan pemulihan dini untuk meningkatkan prosedur-prosedur pengiriman para ahli teknis dalam rangka membantu program pemulihan dan untuk memastikan bahwa tersedianya dana yang cukup untuk pemulihan dan upaya intervensi pengurangan kerentanan.

Masyarakat sipil dan kesepakatan lokal

Masyarakat sipil telah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk upaya-upaya pemberian bantuan dan pemulihan. Lembaga lokal di Thailand sangat diperlukan untuk mengorganisir berbagai operasi pemulihan bekerjasama dengan pemerintah lokal dan para pejabat nasional serta menarik perhatian mereka yang selama ini terabaikan, seperti para buruh migran Burma dan Moken, yaitu kelompok etnis minoritas yang merupakan suku laut terakhir yang memimpin tradisi yang ada. Sementara itu di Indonesia, Badan Pemulihan Aceh memberikan dukungan dan masukan kepada pemerintah, PBB dan lembaga-lembaga keuangan internasional dalam penyusunan Master Plan Rekonstruksi dari pemerintah. Konsultasi secara luas dengan masyarakat sipil yang ada di Aceh juga dapat lebih meningkatkan kredibilitas dari proses perencanaan tersebut.

Sebagaimana dipahami bersama bahwa program pemulihan harus berdasarkan pada penilaian suara dan partisipasi terhadap kebutuhan dan kemampuan masyarakat korban, namun dalam praktiknya hal ini tidak selamanya terwujud. Di sejumlah negara, timbul kekhawatiran masyarakat korban tentang kurangnya keterlibatan mereka dalam perencanaan pemulihan.

Sejak awal respons para aktor internasional terikat dengan para pejabat pemerintah setempat. Pemerintahan yang menjadi korban tidak berusaha

untuk memusatkan kewenangan selama dilakukannya upaya pemberian bantuan namun justru membuat kesepakatan dan koordinasi di tingkat sub-nasional untuk memfasilitasi respons tersebut. Akan tetapi, tsunami menunjukkan bahwa struktur pemerintah lokal tidak selamanya memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas koordinasi ini. Lembaga-lembaga luar dan institusi-institusi lokal harus bekerjasama untuk menyusun rencana pra-bencana dan membangun kapasitas respons bagi organisasi-organisasi lokal.

Tsunami telah menyoroti perlunya untuk memberdayakan masyarakat yang beresiko untuk melindungi dirinya sendiri dan harta bendanya dari dampak bencana. Penyusunan berbagai rencana berbasis masyarakat untuk menghadapi bencana - mulai dari persediaan stok makanan dan obat-obatan sampai membangun tanggul di daerah-daerah yang rentan terhadap banjir, termasuk persiapan pelatihan untuk sebagian guru serta kurikulum pendidikan sekolah - akan mengurangi dampak kerusakan akibat bencana substansial. Sistem peringatan dini lokal, pembangunan gedung-gedung tahan-gempa, pengidentifikasi jalan keluar serta strategi informasi dan komunikasi yang telah disepakati sangatlah penting untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat dapat segera diambil saat dikeluarkannya peringatan. Dukungan jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat memperkuat masyarakat sipil serta memperkuat infrastruktur, akan dapat membantu untuk memastikan bahwa bangsa tersebut siap menghadapi berbagai ancaman yang timbul akibat bencana alam. Masyarakat internasional harus melakukan investasi untuk penyediaan berbagai sistem peringatan dini yang berorientasi kepada masyarakat. Sistem tersebut harus meliputi penilaian resiko, peningkatan kesadaran serta pengukuran tingkat kesiagaan, dengan demikian masyarakat mengetahui apa

yang harus dilakukannya dan dapat segera bertindak saat dikeluarkannya peringatan.

Program respons dan pemulihan harus didasarkan pada penilaian yang partisipatif dan terpercaya terhadap kebutuhan dan kapasitas masyarakat yang menjadi korban, dengan demikian upaya, sumber daya dan kapasitas masyarakat lokal dapat dimengerti dan dimanfaatkan sepenuhnya. Berbagai mekanisme konsultasi dan kegiatan berdasarkan-prioritas memberikan kontribusi bagi penyusunan konsensus menyangkut prioritas, peranan, tanggung jawab dan sumber dana untuk pemulihan. Sebelum terjadi bencana lainnya, komunitas pemberi respons jangan sampai melewatkan kesempatan untuk mendokumentasikan dan mensosialisasikan hikmah yang dapat diambil dari bencana tsunami ini.

Artikel ini telah disusun oleh para editor FMR serta secara selektif juga memuat isu-isu yang dibahas dalam laporan ECOSOC yang berjudul: 'Strengthening emergency relief, rehabilitation, reconstruction, recovery and prevention in the aftermath of the Indian Ocean tsunami disaster: Report of the UN Secretary-General', July 2005 (ada di HYPERLINK "<http://www.un.org/docs/ecosoc>" www.un.org/docs/ecosoc). Interpretasi dan penekanan yang diberikan untuk aspek-aspek laporan ini adalah berasal dari para editor FMR dan bukan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

1. www.brook.edu/fp/projects/idp/gp_page.
HYPERLINK "http://www.brook.edu/fp/projects/idp/gp_page.htm" www.brook.edu/fp/projects/idp/gp_page.htm

Bencana alam dan hak-hak para IDP

oleh Walter Kälin

Dapat dimengerti bahwa karena sibuknya memberikan bantuan kepada mereka yang selamat dari tsunami, perlindungan terhadap hak-hak azazi manusia bagi mereka yang terpaksa mengungsi akibat bencana kurang diperhatikan.

Masalah perlindungan meliputi akses bantuan, diskriminasi dalam pembagian bantuan, pelaksanaan relokasi, kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan, keterlibatan anak-anak dalam perkelahian, kehilangan dokumentasi, pemindahan dan pemulangan kembali secara sukarela dan aman, dan isu-isu ganti rugi tanah. Semakin banyak negara korban tsunami yang beralih dari tahap tanggap darurat ke tahap rekonstruksi, maka semakin besar kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mengatasi masalah-masalah hak azazi manusia.

Pengalaman dari beberapa bencana alam lainnya mengajarkan kita bahwa terdapat resiko yang sangat serius terhadap munculnya pelanggaran terhadap hak azazi manusia apabila pengungsi tidak segera kembali ke rumahnya masing-masing atau mencari rumah yang baru setelah beberapa minggu atau beberapa bulan berlalu. Dalam konteks bencana alam, diskriminasi dan pelanggaran atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dapat semakin memperpanjang masa pengungsian. Biasanya pelanggaran ini tidak terencana ataupun dilakukan secara sengaja, tetapi timbul akibat adanya ketidaksesuaian kebijakan. Dengan demikian, hal tersebut dapat dengan mudah dihindari jika jaminan hak-hak azazi kemanusiaan yang relevan diperhatikan sejak awal.

The Guiding Principles on Internal Displacement menyajikan suatu kerangka kerja normatif untuk mengatasi berbagai tantangan yang berkaitan dengan hak-hak azazi manusia dalam situasi pengungsian yang diakibatkan oleh bencana. Dengan menyadari bahwa orang-orang terpaksa meninggalkan rumahnya, menunjukkan adanya beberapa jenis kerentanan umum tanpa memperhatikan alasan-alasan yang mendasari kepindahan mereka. Prinsip-prinsip tersebut menggunakan definisi 'internally displaced persons' secara luas sebagai orang-orang 'yang terpaksa atau harus mengungsi atau meninggalkan rumahnya atau tempatnya menetap' karena alasan-alasan selain konflik dan perselisihan antar penduduk, juga dikarenakan oleh 'bencana alam'.

Berbagai tantangan terhadap hak-hak azazi manusia khusus pasca bencana alam

Akses bantuan: I: Para IDP memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan perlindungan serta bantuan dari pemerintah pusat. Secara umum, setiap negara ingin memberikan respons secepatnya dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang menjadi korban tsunami, dan negara-negara tersebut tentunya membutuhkan bantuan dari luar untuk melaksanakan hal ini bekerjasama dengan masyarakat internasional. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat memblokir akses terhadap tuntutan kebutuhan tersebut disaat mereka sendiri tidak mampu untuk memberikan bantuan yang memadai. Pembatasan terhadap pengiriman bantuan, seperti penundaan izin untuk menjangkau masyarakat yang menjadi korban, harus dihindari.

Non-diskriminasi: Setelah terjadinya bencana alam, biasanya muncul diskriminasi dalam pendistribusian bantuan kemanusiaan dan reintegrasi serta dalam pengambilan keputusan relokasi dan pemindahan. Sebagaimana ditegaskan dalam the Guiding Principles, bantuan harus diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah lazim berlaku yang bersifat netral dan tidak memihak, tanpa diskriminasi karena suku, agama, ras atau kasta atau hak-hak mereka yang tercabut oleh karena bencana alam ataupun mereka yang mengungsi karena konflik. Ketidakadilan dalam pendistribusian bantuan tidak hanya melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan tetapi juga beresiko menimbulkan tekanan yang dapat mengancam keamanan para IDP serta menyulitkan integrasi mereka serta menimbulkan kekecewaan terhadap pelaksanaan rekonsiliasi nasional.

Perlindungan terhadap wanita dan anak-anak: The Guiding Principles menghendaki adanya perhatian khusus terhadap kebutuhan para wanita dan anak-anak. Mereka mengalami kerentanan terhadap pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan, khususnya di kamp-kamp pengungsian, dimana mereka memiliki resiko lebih tinggi terhadap kekerasan lokal. Bila makanan tidak didistribusikan secara langsung kepada para wanita dan bila mereka tidak diikutsertakan dalam pengun-

rusan kamp dan dalam penyusunan rencana bantuan dan reintegrasi, kerentanan wanita terhadap eksploitasi dan kekerasan seksual pun akan meningkat secara dramatis. Wanita juga memiliki kebutuhan khusus menyangkut akses untuk kesehatan masyarakat dan masalah kesehatan reproduksi. Anak-anak yang kehilangan rumah dan keluarganya umumnya memiliki resiko diikutsertakan dalam wajib militer.

Perdagangan: Ini adalah resiko serius lainnya yang muncul jika seseorang mengungsi, terpisah dari keluarga, anak-anak menjadi yatim dan kehilangan mata pencaharian. .

Akses untuk pendidikan: Segera kembali bersekolah setelah terjadinya bencana alam sangatlah penting untuk meminimalisir terganggunya pendidikan yang menjadi hak anak-anak pengungsi serta penting bagi kelangsungan kehidupan psikososialnya. Kembali bersekolah dapat mengurangi resiko pada anak termasuk resiko perdagangan anak dan wajib militer. Akses pendidikan bagi anak-anak non-pengungsi maupun anak-anak IDP itu sendiri akan terhalang jika para IDP ditampung di gedung-gedung sekolah. Pemindahan IDP ke tempat-tempat penampungan sementara yang lebih pantas akan membuka kesempatan untuk akses pendidikan tidak hanya bagi IDP tetapi juga bagi anak-anak yang berasal dari komunitas yang lebih luas.

Kehilangan dokumentasi: Kurangnya dokumen dapat mengakibatkan penolakan akses untuk kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya serta untuk mengakses berbagai mekanisme untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi tanah. Untuk mendapatkan dokumen pengganti cukup sulit dan memakan waktu, tetapi hal ini menjadi hak bagi para IDP.

Partisipasi para IDP: Para IDP merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, misalnya menyangkut lokasi dan layout tempat penampungan dan permukiman, cara pendistribusian bantuan, jenis makanan dan barang-barang lainnya yang dipasok serta permasalahan pokok lainnya yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini dapat meningkatkan rasa tidak berdaya akibat bencana alam, mengurangi efektivitas bantuan kemanusiaan, dan bahkan menimbulkan resiko bagi keamanan IDP secara fisik, khususnya bagi para wanita.

Pemulangan dan pemindahan secara sukarela: Setelah tanggap darurat bencana berakhir, para pengungsi biasanya akan membutuhkan bantuan untuk membangun kembali kehidu-

merehabilitasi lahan pertanian yang rusak, asset-asset usaha dan boat-boat nelayan) atau membekali p.han dan bantuan bagi para pengungsi untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan baru.

Pasca bencana, pemerintah kemungkinan ingin menata areal tertentu menjadi 'zona buffer' atau 'exclusion zones' di tempat-tempat yang melarang adanya pembangunan. Keputusan tersebut memiliki implikasi terhadap

recovery and reconstruction efforts in the tsunami-affected region must be informed by a human rights based approach

kebebasan bergerak bagi para IDP dan, dalam beberapa hal menyangkut hak-hak atas tanah dan kemampuan mereka untuk menciptakan lapangan kerja. Bila pihak yang berwenang menetapkan bahwa exclusion zones tersebut harus benar-benar diberlakukan secara sah, maka keputusan tersebut harus dikonsultasikan dengan para pengungsi yang seharusnya menerima hasil kompensasi atas kehilangan tanah dan harta benda serta bantuan menyangkut pelaksanaan relokasi dan pembangunan kembali lahan pekerjaan dan tempat tinggal di daerah lain. Sangat penting jika keputusan tersebut tidak membedakan etnis, agama atau kelompok-kelompok tertentu lainnya atau antar para pengungsi karena alasan yang berbeda, seperti pada kasus di tempat yang dilanda bencana alam dengan populasi pengungsi yang diakibatkan oleh konflik bersenjata atau perang saudara.

Di sisi lain, para IDP kemungkinan lebih memilih untuk tidak kembali ke rumah asalnya, khususnya jika pengungsian mereka bersifat mengakar dan bila mereka telah mulai membangun kembali kehidupannya di tempat lain. Para pejabat yang berwenang terkadang mendukung kepulauan mereka dengan antusias sebagai simbol normalisasi setelah kekacauan yang terjadi akibat bencana. Akan tetapi, mereka tetap harus menghargai hak-hak para IDP untuk memilih apakah ingin kembali ke tempat asalnya atau pindah ke tempat lain, serta ikut pula membantu mereka dalam reintegrasi.

Isu-isu kepemilikan: Isu-isu kepemilikan merupakan permasalahan kompleks yang biasanya muncul terutama bila bencana alam telah menghilangkan tanda-tanda yang digunakan sebagai batas dan di saat rumah-rumah tidak lagi memiliki bukti resmi

kepemilikan lahan di tempat semula atau musnahnya arsip-arsip terkait. Bila peraturan-peraturan mengenai pendaftaran dan pengurusan warisan memberlakukan diskriminasi terhadap para wanita maka mereka akan mengalami kesulitan untuk mendapatkannya kembali, khususnya jika suaminya meninggal. Pengalaman telah membuktikan bahwa penyusunan atau pembentukan badan administratif resmi untuk menangani masalah tuntutan hak milik yang berhubungan dengan hal mediasi, pengadilan (berdasarkan permohonan yang masuk ke pengadilan) dan berbagai jenis bantuan yang bersifat fleksibel merupakan cara yang paling efektif untuk menangani isu-isu kepemilikan dengan skala yang sedemikian

besarnya. Penanganan isu-isu kepemilikan akibat krisis pengungsian juga dapat menjadi peluang untuk menangani ketidakadilan yang berkelanjutan atau inefisiensi dalam hal registrasi dan batas-batas tanah secara umum serta untuk mengubah peraturan dan kebijakan untuk memastikan agar hak-hak secara adat dan berbagai bentuk bukti kepemilikan yang bersifat tradisional juga diakui.

Kesimpulan

Ketika pemerintah, lembaga-lembaga internasional dan LSM-LSM menyusun dan melaksanakan program-program rekonstruksi dan reintegrasi bagi para IDP mereka harus mencari solusi yang tepat sesuai dengan persyaratan hak-hak azazi manusia yang berlaku. Tak kalah penting pula jika kita melihat dalam konteks bencana alam dibandingkan dengan kasus pengungsian yang diakibatkan oleh konflik untuk menguji dan menghadapi situasi pengungsian dari segi 'kacamata perlindungan'. Selama kunjungan kerja yang saya lakukan ke sejumlah negara yang menjadi korban tsunami, terdapat respons positif terhadap kebutuhan akan pendekatan yang berdasarkan pada hak-hak azazi manusia dalam penyusunan dan pelaksanaan respons terhadap bencana alam

Berikut ini adalah beberapa hal penting:

- n menginformasikan pendekatan yang berdasarkan hak azazi manusia dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi di wilayah-wilayah yang terkena tsunami dan di daerah-daerah korban bencana lainnya di dunia.
- n pemerintah harus memperhatikan Prinsip-prinsip Pedoman dalam merumuskan program-program rekonstruksi dan reintegrasi nasional; dimana prinsip-prinsip tersebut tidak hanya memberikan panduan dalam situasi konflik ber-

senjata tetapi juga berlaku untuk situasi-situasi bencana alam.

- n para donor harus lebih menyadari tentang tanggung jawabnya dalam memberikan bantuan tanpa melakukan diskriminasi antara pengungsi yang diakibatkan oleh konflik atau karena perbedaan etnis, agama atau golongan sosial, atau bahkan karena perbedaan jenis kelamin.
- n pengungsi, khususnya wanita, harus diikutsertakan dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan dan pelaksanaan relokasi, pendistribusian bantuan kemanusiaan dan mencari solusi yang tepat untuk menangani masalah pengungsian ini.
- n Komisi Hak Azazi Manusia nasional juga diajak dan diikutsertakan untuk memantau situasi para IDP dan menyiapkan suatu metodologi umum untuk pelaksanaannya.
- n UN High Commissioner for Human Rights dan the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) harus bersama-sama menyusun pedoman mengenai hak-hak azazi manusia untuk berbagai situasi bencana alam untuk memberikan petunjuk operasional pelaksanaan bagi para anggota IASC (Inter-Agency Standing Committee) yang ada di lapangan..

Walter Kälin is the Representative of the UN Secretary-General on the Human Rights of Internally Displaced Persons, co-director of the Brookings-Bern Project on Internal Displacement and professor of constitutional and international law at Bern University, Switzerland. Email: walter.kaelin@oefre.unibe.ch.

walter.kaelin@oefre.unibe.ch. Pada bulan Maret 2005, ia melakukan kunjungan kerja ke Asia, dan laporannya juga dimuat di: [HYPERLINK "http://www.brookings.edu/dybdocroot/fp/projects/idp/20050227_tsunami.pdf"](http://www.brookings.edu/dybdocroot/fp/projects/idp/20050227_tsunami.pdf) www.brookings.edu/dybdocroot/fp/projects/idp/20050227_tsunami.pdf. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Proyek tersebut lihat: [HYPERLINK "http://www.brookings.edu/fp/projects/idp/idp.htm"](http://www.brookings.edu/fp/projects/idp/idp.htm) www.brookings.edu/fp/projects/idp/idp.htm atau email: [HYPERLINK "mailto:brookings-bern@brookings.edu"](mailto:brookings-bern@brookings.edu) brookings-bern@brookings.edu

1.Tersedia dalam bahasa Inggris, Sinhala, Tamil dan beberapa bahasa lainnya di: [HYPERLINK "http://www.unhcr.ch/html/menu2/7/b/principles_lang.htm"](http://www.unhcr.ch/html/menu2/7/b/principles_lang.htm) www.unhcr.ch/html/menu2/7/b/principles_lang.htm dan dalam Bahasa Indonesia di: [HYPERLINK "http://www.reliefweb.int/ocha_ol/pub/idp_gp/idp_Indonesia"](http://www.reliefweb.int/ocha_ol/pub/idp_gp/idp_Indonesia) www.reliefweb.int/ocha_ol/pub/idp_gp/idp_Indonesia

Respons terhadap kesehatan masyarakat korban tsunami – pelajaran apa yang telah kita ambil?

oleh Manuel Carballo dan Bryan Heal

Dalam suatu pertemuan di Maladewa yang diadakan pada bulan April oleh 'International Centre for Migration and Health', para ahli kesehatan masyarakat dari sejumlah negara yang dilanda tsunami menilai beberapa pelajaran yang dapat diambil dari respons kemanusiaan.

Tsunami merupakan peristiwa yang sangat tragis dimana sebagian orang menjadi lebih rentan dibandingkan dengan orang lainnya. Sebagian besar mereka yang kehilangan mata pencahariannya adalah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, yang terpaksa tinggal di rumah yang tidak layak di sepanjang garis pantai. Di Maladewa – yang baru saja dihapus dari kategori negara paling terbelakang oleh PBB enam hari sebelum terjadinya bencana – mereka yang miskin tidak memiliki tabungan di bank sehingga hanya menyimpan uang di rumah, dan paling banyak mengalami kerugian. Kerusakan yang terjadi pada negara republik yang berbentuk kepulauan tersebut diperkirakan mencapai 62% dari GDP dan dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut dari perkiraan pra-tsunami yaitu sebesar 7,5% menjadi hanya 1%.

Di semua negara yang menjadi korban, respons awal terhadap tsunami terbentuk oleh rasa ketakutan jika jenazah yang berserakan dapat menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat. Tubuh manusia sarat dengan stress emosional dan stress yang menumpuk tersebut memiliki dampak yang cukup penting dari segi psikososial. Namun demikian, beberapa upaya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa jenazah tidak menimbulkan ancaman penyakit menular tidak terlalu berpengaruh. Secara umum, pengurusan jenazah secara tradisi ritual diabaikan, dan perasaan bersalah yang terus melekat harus ditangani melalui konseling. [mereka yang tidak merasa bersalah pun perlu mendapatkan konseling]

Tidak banyak yang menyadari bahwa masalah kemiskinan bagi masyarakat korban tsunami adalah berkaitan erat dengan minimnya akses bahan makanan. Beberapa laporan mengungkapkan tentang adanya kasus kekurangan gizi di Maladewa, sebagian di Sri Lanka dan India. Bantuan makanan seringkali tidak sesuai. Bantuan tepung gandum untuk masyarakat Indonesia dan Thailand yang sebenarnya mengkonsumsi beras, adanya laporan yang mengatakan bahwa banyak orang tua yang tidak dapat mengunyah biskuit bergizi yang diberikan dalam paket bantuan makanan darurat dan laporan

dari Thailand yang menyatakan bahwa bantuan susu yang masuk justru mengurangi kadar ASI, menunjukkan bagaimana mungkin pelajaran dari bencana yang lalu itu dapat dilupakan begitu saja.

Sistem kesehatan juga ikut lumpuh. Tiga puluh persen bidan tewas di daerah yang menjadi korban di Aceh dan satu dari setiap enam klinik kesehatan yang ada di provinsi ini juga hancur. Di wilayah ini, peralatan dan persediaan obat-obatan juga musnah dan petugas kesehatan – yang biasanya terlupakan hanyalah menjadi subjek yang dihantui rasa takut dan stress sebagai manusia biasa – yang harus membersihkan dan memperbaiki berbagai sarana yang rusak serta mengangkat dan menguburkan sekian banyak jenazah korban.

Dalam komunitas masyarakat yang ada di Aceh bagian Utara dan Sri Lanka, angka kematian wanita empat kali lebih tinggi dari kaum pria, dan di India angka kematian wanita tersebut tiga kali lipat lebih tinggi. Dampak yang tidak proporsional ini menjadi peringatan untuk memastikan bahwa rencana tanggap darurat harus ikut memperhatikan kerentanan sosial dan kesehatan para wanita. Respons terhadap tsunami juga menjadi bukti tentang rendahnya prioritas yang secara tradisional diberikan untuk menjaga kesehatan reproduksi dan pemenuhan kebutuhan bagi wanita hamil dalam situasi pasca bencana. Meskipun fakta telah menunjukkan bahwa wanita hamil memiliki berbagai kebutuhan khusus dan diperburuk dengan kondisi krisis seperti saat sekarang ini, namun masih banyak operasi pemberian bantuan yang mengabaikan hal tersebut. Penyediaan alat kontrasepsi pasca bencana alam atau bencana akibat kelalaian manusia masih kurang diprioritaskan oleh banyak lembaga, sebagian dikarenakan oleh enggan masyarakat untuk datang memintanya.

Pentingnya alat kontrasepsi yang mudah digunakan untuk kesehatan reproduksi dan alat-alat kesehatan darurat lainnya mulai tampak dimana-mana. Tanpa peralatan tersebut tampaknya tidak mungkin untuk merespons berbagai kebutuhan kesehatan darurat tepat pada waktunya. Pendistribusian alat-alat ini secara luas

cukup penting dan harus disertai dengan pembekalan pelatihan yang sistematis kepada tim-tim nasional dalam menggunakannya. Penyediaan peralatan siap-pakai untuk ibu dan anak bagi mereka yang membutuhkan pasca tsunami terbukti sangat bermanfaat. Peralatan ini biasanya dibuat dari bahan lokal dan memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi para wanita yang membutuhkannya.

Dalam beberapa kasus, masalah kebutuhan air bagi masyarakat dapat segera ditangani namun dengan upaya intervensi yang sifatnya sementara. Beberapa alat penawar air yang diperkenalkan oleh LSM banyak yang sudah rusak. Tingginya kadar garam dalam sumur tanah merupakan masalah jangka panjang yang cukup besar yang harus ditangani. Di Sri Lanka sendiri sekitar 12.000 sumur terkontaminasi dengan kadar garam yang cukup tinggi dan di beberapa daerah yang menggunakan sumur sebagai sumber air juga telah rusak secara permanen akibat terkontaminasi oleh air asin. Air bersih memerlukan waktu untuk kembali seimbang dengan kadar air laut dan memerlukan beberapa kali musim hujan untuk mengatasi masalah ini. Sistem osmosis-terbalik tiruan yang diperkenalkan oleh lembaga-lembaga asing kurang praktis karena besarnya biaya yang harus ditutupi dan tidak mampunya masyarakat untuk menangani masalah pemeliharaannya.

Kompleksitas permasalahan secara resmi belum cukup dimengerti. Perbedaan konfirmasi antara mereka yang hilang dan yang tewas di negara-negara yang dilanda tsunami memiliki implikasi yang cukup besar bagi para janda yang kehilangan suaminya. Di beberapa negara tingkat kerusakan sangat tinggi dimana tidak hanya fondasi rumah yang tak berbekas tetapi juga dokumen kepemilikannya juga hilang. Di Maladewa, hilangnya ijazah-ijazah sekolah telah menjadi sumber stress terbesar bagi para remaja usia sekolah.

Jangan melupakan jasa keluarga penampung

Upaya pemberian bantuan dan rekonstruksi pasca tsunami telah memberikan prioritas, dan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan sosial bagi para pengungsi. Namun demikian, masih terdapat kurangnya pemahaman terhadap pemenuhan kebutuhan rumah dan bantuan bagi berpuluh-puluh ribu keluarga IDP. Khususnya di Maladewa, Sri Lanka dan Aceh, mereka yang rumahnya masih utuh tidak segan-segan untuk menawarkan rumah dan tempat tinggal bagi para pengungsi.



Jika pertolongan ini tidak mampu lagi dipertahankan, maka keadaan para IDP pun semakin memburuk. Beban pihak keluarga yang menjadi tuan rumah pun semakin bertambah, dan yang cukup mengejutkan, dalam beberapa hal kesabaran pun mulai berkurang. Keharusan mereka untuk berbagi ruang keluarga yang sempit, makanan dan sumber-sumber lainnya yang pas-pasan, telah mengganggu privasi dan kehidupan pribadi mereka. Dengan tertundanya pemindahan para pengungsi dan karena keluarga penampung harus terus membantu para pengungsi tersebut, maka perhatian yang lebih besar harus diberikan untuk membantu pemulihan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh para anggota keluarga penampung ini.

Terlalu padatnya rumah milik keluarga penampung maupun di rumah-rumah sementara dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan maupun masalah sosial. Hingga saat ini, banyak diantaranya yang terabaikan, namun semakin lama kondisi ini berlangsung semakin banyak masalah yang akan muncul. Dengan demikian untuk menangani masalah kepadatan tersebut maka sesegera mungkin diperlukan pembangunan rumah-rumah sementara secara besar-besaran dan lebih cepat, dengan memberikan perhatian khusus bagi kebutuhan air dan sanitasi.

Ciri khusus dari bencana alam adalah

dampak psikososial yang ditimbulkannya dengan berbagai bentuk yang tidak tampak secara langsung. Pemahaman dan tanggapan terhadap kebutuhan psikososial untuk jangka panjang maupun jangka pendek bagi mereka yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi korban tsunami sangatlah penting dan akan membantu dalam penentuan kapasitas mereka untuk turut serta dalam pelaksanaan rekonstruksi sosial. Dengan kurangnya perhatian yang biasa diberikan untuk aspek kesehatan masyarakat ini serta sedikitnya jumlah orang yang terlatih di daerah, maka sangat perlu untuk mempersiapkan para petugas kesehatan dan lain sebagainya untuk menampung dan merespons isu-isu psikososial pasca bencana.

Kepercayaan agama telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sikap yang ditunjukkan oleh para korban yang selamat dari tsunami. Para pemuka agama tidak hanya memberikan dukungan tetapi juga informasi praktis dan perhatian bagi kerjasama masyarakat. Peran mereka perlu dikenal secara lebih luas dengan didukung oleh para donor. Di sisi lain, terdapat pula laporan yang mengatakan bahwa banyak lembaga asing yang tengah mempromosikan agenda keagamaannya sendiri. Hal ini telah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di beberapa negara dan menimbulkan berbagai pertanyaan tentang kelompok keagamaan mana

yang pantas diizinkan untuk berperan dalam kegiatan kemanusiaan ini.

Rekomendasi

Isu-isu kunci dari rencana penanganan bencana yang disoroti oleh para peserta simposium antara lain:

- n Lembaga-lembaga asing harus berbuat sesuatu yang lebih banyak untuk menambah kekuatan, dan tidak mengabaikan ketangguhan dan kapasitas lokal.
- n Pejabat pemerintah dan masyarakat setempat harus lebih menyadari berbagai faktor yang dapat menempatkan wanita pada resiko tertentu.
- n Para donor harus berbuat sesuatu yang lebih untuk memastikan bahwa para tim ahli tanggap darurat yang dikirimkan ke lapangan memiliki keahlian yang sesuai - untuk hal ini tidak semuanya sesuai dengan yang dimaksud - dan siap menerima berbagai instruksi dari pejabat nasional.
- n Di daerah-daerah korban bencana yang sarat dengan konflik, kepercayaan terhadap kemampuan pasukan militer dalam hal ini oleh para penerima manfaat sangat terbatas: peranan militer yang dominan dapat menimbulkan ketergantungan dan akan mencegah masyarakat untuk dapat bekerja sesuai dengan solusi yang diinginkannya sendiri..
- n Dana melalui UN Flash Appeal sebaiknya tidak hanya dialokasikan dan disalurkan untuk

Fatia, 15, is vaccinated against measles at an IDP camp, Banda Aceh.

proyek-proyek jangka pendek: prosedur-prosedur inovatif harus dicari untuk memungkinkan dana tersebut dapat digunakan untuk proyek-proyek pembangunan jangka panjang bagi pemulihan berbagai fasilitas umum.

- n Para donor harus dapat memastikan bahwa pasokan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi, melakukan sesuatu untuk menelusuri kemana barang-barang tersebut disalurkan dan memberikan daftar rinci kepada para penerima manfaat.
- n Para donor tampak tidak siap dan tidak menyadari bahwa beberapa sistem penyaluran bantuan multinasional seharusnya dapat dilakukan secara lebih efisien.
- n Para donor harus menjelaskan seluk beluk pendanaan kepada negara-negara yang menjadi penerima manfaat: banyak pemerintah yang menganggap karena dana tersebut telah dijanjikan maka tidak akan mungkin terlambat diterima.
- n Penanaman pohon dan tumbuh-tumbuhan serta pelestarian tanaman bakau harus ditingkatkan dan akan menjadi penghalang untuk menghadapi ancaman gelombang di masa yang akan datang.
- n Perlu diakui bahwa meskipun standar SPHERE cukup penting, namun

pengenalannya di tengah-tengah komunitas yang sangat miskin dapat menimbulkan harapan yang tidak realistis serta diluar kemampuan nasional maupun daerah.

- n Perhatian lebih besar harus diberikan untuk perlindungan dan peningkatan perawatan bagi ibu, ibu menyusui, keluarga berencana, informasi mengenai kesehatan seksual remaja serta penempatan alat-alat kesehatan reproduksi di lokasi yang strategis.
- n Bangunan-bangunan publik multi-guna harus didesain sebagai tempat yang aman dan lengkap.

Tsunami tidak hanya menjadi peringatan tentang bagaimana mungkin masyarakat internasional dapat melupakan banyak pelajaran dari berbagai bencana yang terjadi sebelumnya tetapi juga menyangkut sejauh mana perhatian yang diberikan oleh negara untuk mempersiapkan masyarakatnya agar tetap siaga menghadapi bencana. Bahkan ketika rencana disusun mereka seringkali tidak berbagi dengan semua pihak yang kemungkinan jika bencana melanda akan berada pada posisi yang dibutuhkan. Di masa yang akan datang, perhatian yang lebih besar harus diberikan untuk memupuk kesiapan dalam menghadapi bencana dan berbagai upaya pencegahan dengan berbagai cara yang membuatnya

menjadi satu kesatuan sistem sosial dan kesehatan lokal serta dimengerti oleh semua orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

Sebelum tsunami dilupakan, penting bagi kita untuk mengevaluasi kembali pelajaran di lapangan yang dapat diambil seperti pengendalian penyakit menular, kesehatan reproduksi, dukungan psikososial, logistik dan monitoring. Perencanaan kesehatan publik dan mitigasi bencana hanya berguna bila mereka mengerti tentang hal tersebut dan ikut terlibat dalam penyusunannya. Dari pemerintah pusat hingga masyarakat daerah, serta semua pihak yang berkepentingan harus dilibatkan dalam mereview rencana dan mengkaji respons secara reguler.

Manuel Carballo adalah direktur International Centre for Migration and Health (11 Route du Nant d'Avril, CH - 1214, Geneva, Switzerland) dan Bryan Heal adalah staff informasinya. Email: HYPERLINK "mailto: mcarballo@icmh.ch" mcarballo@icmh.ch; HYPERLINK "mailto:bheal@icmh.ch" bheal@icmh.ch. Laporan mengenai pertemuan di Maladewa (yang didanai oleh Taiwan International Health Operations Center) ada di website ICMH: [HYPERLINK](http://www.icmh.ch) "http://www.icmh.ch" www.icmh.ch

YAKKUM
Emergency Unit's
Dr Sari Mutia
Timur with
patients, Indonesia.



Pencurian tanah besar-besaran

oleh Scott Leckie

Tsunami telah mengingatkan kita tentang pentingnya suatu pendekatan berdasarkan-hak dalam pelaksanaan rekonstruksi pasca-bencana. Jika masalah perumahan, tanah dan hak milik pribadi dimasukkan dalam bagian pokok pada perencanaan pasca bencana - dan tidak diabaikan hanya karena terlalu kompleks atau memakan biaya yang mahal - maka kemungkinan besar akan berhasil. Namun bila hak-hak tersebut diabaikan, tidak diperdulikan, atau dilanggar secara sistematis, maka tidak hanya hak-hak tersebut yang disalahgunakan tetapi pelaksanaan rekonstruksi juga akan mengalami kegagalan.

Sekali lagi seiring dengan banyaknya bantuan pasca-tsunami kita mendengar syair lama yang melantunkan: "Waktu kini akan berbeda, kini kita tidak akan mengabaikan lagi para korban". Enam bulan telah berlalu, kini saatnya untuk bertanya sejauh manakah perbedaan yang dicapai dari proses pemulihan dan rekonstruksi ini dibandingkan dengan bencana alam lainnya. Apakah upaya pembangunan kembali pasca bencana telah mencapai apa yang dibutuhkan? Apakah mereka yang kehilangan rumahnya telah dirumahkan kembali dan dapat kembali mencari nafkah? Sudahkah mereka diperlakukan sesuai dengan hak-haknya? Apakah korban selamat yang ada di Aceh, Maladewa, Sri Lanka dan India merasa lebih baik dibandingkan mereka yang selamat dalam bencana gempa bumi di Bam, Gujarat atau Kobe atau angin topan di Amerika Tengah atau Karibia? Ataukah mereka justru menjadi korban dan hak-hak azazinya dikesampingkan karena para aktor politik memanfaatkan bencana sebagai dalih untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya tidak tercapai?

Kehilangan dan perolehan tanah

Di setiap bencana, kehidupan dan mata pencaharian terganggu, kesulitan ekonomi muncul dimana-mana dan kehidupan normal pun pasti sangat terganggu. Namun ada satu benang merah yang terbentang di tengah-tengah bencana apapun dan merupakan kunci untuk keberhasilan rekonstruksi, pembangunan kembali dan regenerasi, yaitu: hak-hak atas tanah, rumah dan harta benda atau land, housing and property (HLP) rights.

Selain menelan korban jiwa, tsunami juga telah menjadi dalih bagi pengusiran, perampasan lahan, rencana ganti-rugi tanah yang tidak sesuai dan berbagai tindakan yang direncanakan sedemikian rupa untuk mencegah mereka yang tidak memiliki rumah untuk kembali ke rumah dan tanah mereka semula. Thailand, India dan sejumlah negara korban lainnya telah membatasi hak untuk kembali namun Sri Lanka merupakan negara korban tsunami yang secara dramatis telah mencoba untuk menata kembali wilayah permukimanannya melalui proses rekonstruksi.

Kebijakan pemerintah kini telah melarang adanya pembangunan dalam radius 100 meter dari garis pantai (di

sejumlah daerah justru sejauh 200 meter). Sebagian besar dari sekitar 500.000 mereka yang mengungsi tinggal dalam radius 100 meter dari tepi pantai ketika tsunami melanda. Pemerintah telah menjanjikan untuk membangun rumah bagi mereka yang terkena peraturan pelarangan pembangunan rumah di daerah tersebut dan telah melaksanakan pembangunan rumah bagi setiap kepala keluarga yang menjadi korban. Disaat tanah yang berada dalam zona 100 meter yang dimiliki secara pribadi akan tetap menjadi hak para pemilik aslinya - dan pemerintah juga menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengklaim masalah kepemilikan tanah tersebut - namun peraturan mengenai zona 100-meter tersebut justru akan secara permanen mencegah ratusan dari sekian ribu orang dalam komunitas nelayan serta mereka yang tinggal dan bekerja di dekat pantai untuk kembali ke tanahnya semula. Dapat dipahami jika pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban ini tidak senang mendengaranya.

Hasrat untuk melindungi daerah pantai dan penduduk yang ada dari berbagai kemungkinan ancaman tsunami yang akan datang tampaknya cukup masuk akal dan sesuai dengan standar hak-hak azazi manusia. Akan tetapi, manuver-manuver untuk merubah demografi di wilayah pantai Sri Lanka menuai kritikan dari berbagai kalangan. Pertama, masyarakat sendiri tidak ingin pindah dan pada umumnya sudah lama ingin pindah ke tanah asalnya. Kedua, hampir tidak ada konsultasi yang dilakukan menyangkut peraturan 100-meter di Sri Lanka tersebut. Dan ketiga, pengecualian terhadap pemberlakuan peraturan 100-meter saat ini - yaitu untuk hotel, para developer kaya serta golongan istimewa lainnya - menimbulkan kekhawatiran yang serius tentang adanya sikap pilih kasih.

Ketidakpastian masalah perumahan

Disaat para pejabat di Aceh telah merubah kebijakannya secara signifikan untuk mengizinkan masyarakat kembali ke rumahnya masing-masing daripada harus menjalani relokasi

secara permanen, justru terdapat masalah baru yang harus dihadapi oleh para korban selamat di Aceh. Proses pembangunan kembali sangat lamban dimana hampir tak ada satu rumah pun yang dibangun di daerah-daerah yang paling parah. Proses pemetaan komunitas yang cukup penting telah dilaksanakan di Aceh oleh berbagai LSM, tetapi para pejabat lokal enggan untuk menerima inisiatif yang bersifat bottom-up ini. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh 'program registrasi cepat' di Aceh yang didukung oleh World Bank, yang meskipun didanai dengan cukup baik, namun masih jauh lebih lamban dan dapat memancing konflik untuk membantu percepatan proses rekonstruksi secara lebih luas.

Di Sri Lanka, ratusan dari ribuan korban tsunami yang selamat masih terus tinggal di rumah-rumah sementara atau tenda setelah enam bulan pasca bencana. Banyak laporan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki banyak rencana untuk membangun perumahan yang baru sejauh empat atau lima kilometer - bahkan dalam beberapa kasus sejauh 14 kilometer dari desa-desa di daerah pantai. Hal ini akan berdampak serius bagi kehidupan masyarakat, khususnya keluarga nelayan yang bergantung pada laut dan akses yang cepat untuk itu. Jika seseorang mengunjungi lokasi-lokasi tempat penampungan sementara di Sri Lanka, maka kita akan langsung merasa bahwa para korban tsunami tersebut harus terus menunggu sampai beberapa tahun sebelum semua rumah yang dibutuhkan benar-benar terbangun.

Kealpaan untuk melibatkan masyarakat ini secara aktif dalam upaya pembangunan kembali semakin menambah kekecewaan. Di seluruh negara korban tsunami, upaya-upaya rekonstruksi umumnya bersifat top-down, dan tidak mengikutsertakan masyarakat yang menjadi korban dalam pengambilan keputusan. Dengan masih banyaknya pembangunan rumah yang belum dikerjakan di daerah-daerah yang menjadi korban, maka pemerintah, masyarakat dan LSM harus melakukan upaya khusus untuk bersama-sama mencari solusi mengenai masalah perumahan ini serta sesuai untuk semua pihak, keluarga maupun masyarakat yang menjadi korban. Pemerintah dan lembaga-lembaga asing dapat melihat contoh pemerintah Gujarat yang setelah bencana gempa bumi pada tahun 2001, mengizinkan masyarakat dan LSM-LSM lokal untuk memprakarsai langsung proses rekonstruksi; mereka yang selamat di sana dapat kembali ke rumah mereka seperti sedia kala jauh lebih cepat dibandingkan dengan proses pembangunan rumah kembali yang diprakarsai oleh sektor pemerintah maupun swasta..



Where houses stood, Sri Lanka.

Rekonstruksi berdasarkan hak

Tragedi kemanusiaan akibat bencana alam ini jangan sampai diperburuk oleh pelanggaran hak-hak azazi manusia terhadap para korban yang ingin membangun kembali rumahnya, mata pencahariannya dan masyarakatnya. Hak-hak HLP merupakan elemen kunci dalam berbagai penanganan dan kebutuhan pasca-bencana yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya-upaya pemulihan di masa yang akan datang. Kerangka kerja mengenai hak-hak HLP dalam usaha-usaha pemberian bantuan dan rekonstruksi akan diterapkan dalam penanganan bencana di masa-masa yang akan datang untuk menghindari maraknya kebijakan yang bersifat sewenang-wenang dalam merespons bencana tsunami. Pendekatan berbasis hak tersebut akan memfokuskan pada tujuh masalah kunci, yaitu:

1. Hak untuk kembali dengan sukarela: Semua korban bencana harus diberikan hak untuk kembali ke tanah yang menjadi tempat tinggalnya semula, tanpa adanya diskriminasi. Jika rumahnya masih utuh atau masih dapat diperbaiki, maka hak-hak untuk memperbaiki, memiliki dan mendiami kembali rumah-rumah tersebut harus dihargai. Berbagai larangan yang tidak dapat dibenarkan menyangkut kepulauan mereka tersebut merupakan pengusiran secara paksa, yang tidak dibenarkan dalam hukum internasional. .
2. Hak untuk mendapatkan rumah yang layak dan aman: Setiap terjadinya bencana, individu maupun keluarga yang menjadi korban harus memperoleh akses untuk mendapatkan perumahan yang layak dan pantas, sesuai dengan hak-hak azazi manusia internasional, secepat mungkin. Saat kembali atau pindah, keamanan tempat juga harus terjamin bagi setiap individu maupun masyarakat korban, dan harus masuk dalam daftar rumah

dan tanah resmi. Seharusnya tidak ada lagi orang yang tidak memiliki rumah setelah dilakukannya proses rekonstruksi.

3. Hak untuk berpartisipasi, konsultasi dan non-diskriminasi: Upaya-upaya khusus harus dilakukan untuk memastikan peran serta sepenuhnya dari para korban bencana dalam perencanaan dan pengaturan kepulauan mereka, pembangunan rumah kembali maupun pemindahan bagi mereka. Seluruh lapisan masyarakat harus dilibatkan dalam konsultasi berbagai rencana perumahan dan diajak untuk membentuk organisasi-organisasi berbasis masyarakat yang mewakili kepentingan mereka. Sistem partisipasi secara penuh, transparan dan bertanggung jawab harus dibentuk untuk memastikan bahwa hanya penduduk lama dan khususnya penduduk miskin - yang menjadi penerima manfaat dari pembangunan rumah kembali dan infrastruktur terkait lainnya. Semua upaya rekonstruksi dan rehabilitasi harus memperhatikan kebutuhan khususnya dari kelompok-kelompok rentan maupun mereka yang terpinggirkan.
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dalam penempatan rumah-rumah sementara: Pengaturan dan pelaksanaan pembangunan rumah-rumah sementara pasca bencana harus sesuai sepenuhnya dengan standar-standar hak azazi manusia internasional. Selain pemenuhan hak-hak minimum penghuni kamp untuk mendapatkan tempat bernaung, air, makanan, perawatan kesehatan dan pendidikan, penanganan kamp-kamp tersebut juga dilakukan melalui konsultasi dan kerjasama penuh dengan para pengungsi itu sendiri. Pasokan atau pemberian bantuan tanggap darurat jangan sampai dijadikan alat untuk mengendalikan atau menindas. Di seluruh kamp sementara, keamanan fisik maupun psikologis dan kesehatan mental

- khususnya wanita dan anak-anak
- harus dijaga dan dilindungi.

5. Hak untuk mendapatkan pekerjaan, jaminan sosial, air, kesehatan dan pendidikan: Berbagai upaya pemberian bantuan pasca-bencana jangan hanya ditujukan untuk pemberian bantuan darurat dan pembangunan kamp-kamp sementara saja. Namun berbagai sumber yang tersedia secara signifikan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi juga harus disediakan untuk membangun rumah-rumah yang layak dan untuk memulihkan pendapatan mereka yang kehilangan mata pencaharian, membangun asset-asset untuk pengamanan dan kesehatan masyarakat, serta fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya.
6. Persamaan hak untuk pemilikan harta benda: Hukum dan praktek-prakteknya yang mengatur tentang peninggalan dan hak-milik, baik secara formal maupun informal, yang bersifat diskriminatif dan yang dapat mengakibatkan dibatalkannya penyerahan harta benda tersebut kepada mereka yang selamat (khususnya para wanita dan anak-anak) harus dihilangkan. Para janda harus diberikan hak resmi terhadap kepemilikan tanah dan rumah atas nama mereka sendiri, dan para wanita yang telah menikah juga harus tercatat secara resmi bersama-sama dengan suami dan anak-anaknya, jika masih ada.
7. Hak-hak kaum wanita: Secara tradisi, wanita telah menjadi ujung tombak untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan komunitasnya. Dengan demikian, selain melindungi hak-hak para wanita sebagaimana ditekankan di atas, penting pula untuk mendukung para wanita dalam upaya pemberian bantuan, rekonstruksi dan rehabilitasi serta menghormati hak-hak mereka untuk berpartisipasi.

Bencana tsunami di Samudera India memberikan banyak pelajaran bagi para pembuat kebijakan dalam menghadapi bencana alam yang luar biasa maupun bencana yang diakibatkan oleh manusia pada masa yang akan datang. Kita berharap semoga manipulasi dalam proses pemulihan oleh pemerintah di daerah-daerah yang pernah kita saksikan tidak akan terulang lagi jika bencana lainnya melanda di masa-masa yang akan datang..

Scott Leckie, Direktur Eksekutif Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) [HYPERLINK "http://www.cohre.org" www.cohre.org](http://www.cohre.org), bekerja di bidang isu-isu mengenai hak-hak atas rumah, tanah dan harta benda di Sri Lanka dan Maladewa pasca-tsunami. Email: [HYPERLINK "mailto:scott@cohre.org" scott@cohre.org](mailto:HYPERLINK), COHRE baru saja membuka kantornya di Colombo (contact [HYPERLINK "mailto:bret@cohre.org" bret@cohre.org](mailto:HYPERLINK)) untuk memantau berbagai pelanggaran hak azazi manusia dalam pelaksanaan program rekonstruksi di seluruh negara korban tsunami.

Apakah tsunami mempengaruhi pendanaan untuk berbagai krisis lainnya?

oleh Toby Lanzerr

Banyak praktisi pemberi bantuan mengungkapkan kekhawatirannya tentang tsunami yang telah mengambil alih dana untuk bantuan darurat lainnya. Ketakutan yang serupa muncul ketika terdapat 'keadaan darurat berskala besar' tetapi apakah hal itu dapat disesuaikan?

Pada tanggal 3 Juni 2005, pada saat menulis artikel ini, UN Financial Tracking Service (FTS) melaporkan bahwa usulan bantuan dan konsolidasi PBB, yang menguraikan program-program dari lembaga-lembaga kunci PBB dan LSM-LSM, telah didanai sebesar 41%. Akan tetapi, ketika Indian Ocean programme serupa dilaksanakan, dana tersebut justru turun menjadi tinggal 25%. Pada waktu yang sama tahun lalu, tidak lama sebelum perhatian dunia terserap ke Darfur, pengiriman bantuan dan konsolidasi didanai hanya 23%. Sekilas tampak situasi tahun ini sedikit berubah dibandingkan dengan tahun lalu. Namun, masih sedikit lebih baik, pendanaan untuk berbagai krisis lainnya oleh beberapa negara yang menjadi donor kunci seperti Jerman, Jepang, Norwegia dan AS meningkat sejak setahun yang lalu. Tentu saja, pendanaan untuk berbagai krisis lainnya itu merupakan berita baik. Apakah benar demikian?

Sebelum menyimpulkan bahwa tsunami tidak mengambil alih pendanaan dari berbagai krisis lainnya, kita perlu memperhatikan nilai finansial kemanusiaan yang tersedia tahun ini dibandingkan dengan tahun 2004 lalu. Dengan adanya bencana tsunami, banyak dana yang tersedia bagi lembaga-lembaga pemberi bantuan disepanjang tahun 2005 ini. Akan tetapi meskipun tanpa tsunami, dana lebih masih tetap tersedia tahun ini - yaitu sebesar \$847 juta, dibandingkan dengan pendanaan yang sama di tahun 2004 yang hanya sebesar \$697. Lebih setengah dari nilai total tahun ini diperuntukkan bagi Sudan, sedangkan dana \$417 juta yang tersisa akan digunakan untuk keadaan darurat yang tak terduga. Republik Afrika Tengah, Chad, Chechnya, Eritrea, Guinea, Somalia dan Afrika Barat hanya menerima dana yang lebih sedikit selama lima bulan pertama di tahun 2005 dibandingkan dengan yang diterima pada periode yang sama tahun lalu. Banyak orang yang memperdebatkan karena tahun ini ternyata lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Dari 21 permohonan untuk tahun 2005, rata-rata pendanaan hanya berada pada kisaran 25% dan 11 diantaranya kurang dari 20%. Disaat pengajuan pendanaan rata-rata sejak tahun 1992 hingga tahun terakhir mencapai 67%, justru muncul masalah tsunami yang cukup serius yang berkenaan dengan waktu pendanaan.

Tahun ini adalah tahun kedua bagi 'Good Humanitarian Donorship', yang diprakarsai oleh pihak-pihak pemerintahan kunci dalam penerapan prinsip-prinsip dan praktek yang baik. Salah satu diantaranya memberikan kesan bahwa dana tersebut akan disediakan lebih cepat tidak lama setelah usulan dikeluarkan. Sementara respons finansial untuk tsunami begitu cepat, namun pendanaan untuk krisis-kris lainnya justru masih lamban seperti biasanya. Para donor telah memfokuskan pada bencana tsunami, namun dengan sumber daya staff yang serba kurang untuk menangani berbagai krisis lainnya. Salah satu akibatnya adalah komitmen - seperti kontrak pendanaan berdasarkan proposal - untuk krisis non-tsunami justru diproses lebih lamban dari yang sebelumnya.

Dalam sejumlah kasus, dana tsunami yang disebut-sebut sebagai dana baru dan merupakan dana tambahan, pada kenyataannya tidak tersedia dengan demikian para donor memotong alokasi untuk tsunami dari dana yang sebelumnya diperuntukkan bagi keperluan darurat lainnya. Dalam hal ini, kementerian keuangan telah menjanjikan untuk memberikan tambahan dana tetapi hal ini memerlukan persetujuan dari anggota dewan yang tentunya memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, tsunami telah mengalihkan sejumlah dana dan mengakibatkan tertundanya dana bagi program-program di daerah-daerah krisis lainnya. Dampak tsunami lebih lanjut lainnya adalah pemerintah, seperti Finlandia, yang telah menyusun anggaran bantuan untuk tahun ini dan telah menyebutkan bahwa tidak akan ada penambahan. Dengan demikian, dana yang dimanfaatkan untuk tsunami akan mengurangi dana bagi penanganan krisis lainnya.

Setelah tsunami, banyak lembaga bantuan yang datang dengan keinginan sendiri maupun dengan desakan publik bertindak cepat untuk memberikan bantuan. Jumlah staff terlatih yang ada pun sangat terbatas dan beberapa lembaga PBB serta LSM telah mengalihkan sumber-sumber dari kegiatan operasi kunci di lapangan dan di kantor pusatnya untuk menangani tsunami. Salah satu konsekuensi dari hal ini yaitu adanya organisasi yang mengajukan proposal untuk program di daerah yang bukan lagi menjadi krisis 'nomor 1' tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Salah satu donor kunci menunjukkan bahwa jumlah proposal yang diterima untuk negara-negara di Afrika tahun ini cenderung menurun dibandingkan dengan saat yang sama tahun lalu.

Kesimpulan

Pendapat bahwa bencana di Samudera India (Indian Ocean disaster) telah mengalihkan dana dari berbagai krisis lain memberi kesan adanya permainan tanpa hasil, dimana dana yang diperuntukkan bagi tsunami berarti mengurangi dana untuk krisis lainnya. Situasi ini menjadi lebih kompleks: seperti misalnya, disaat sejumlah donor menunjukkan bahwa dana tsunami merupakan dana ekstra dan dana yang mereka keluarkan untuk krisis lainnya secara aktual meningkat dibandingkan dengan tahun lalu.

Secara keseluruhan, bencana di Samudera India (Indian Ocean disaster) telah membawa pengaruh terhadap respons para donor dan lembaga-lembaga bantuan untuk krisis lainnya, setidaknya untuk sementara waktu. Situasi bisa saja berbalik dan memerlukan kesepakatan tindakan bersama antar komunitas pemberi bantuan. Penarikan dana berdasarkan kebutuhan yang dapat diprediksi dan tepat pada waktunya masih tetap berlaku. Lembaga-lembaga pemberi bantuan harus mampu menarik perhatian para donor atas konsekuensi kekurangan dan keterlambatan pendanaan. Diperlukan pula fakta dan angka-angka yang menggambarkan tentang konsekuensi kemanusiaan atas keterlambatan atau kelalaian program. Pemerintah yang telah mengklaim bahwa dana tsunami mereka adalah dana baru dan tidak ada sangkut pautnya dengan program-program lainnya harus ditanyai untuk membuktikan bahwa hal itu memang benar. Pemerintah dan para menteri keuangan harus bertindak cepat untuk menambah anggaran kemanusiaan tersebut.

Dalam tanggap darurat, waktu adalah yang terpenting. Pada akhir Juni 2005, PBB akan mengadakan pertemuan di Jenewa untuk membicarakan mengenai status pengajuan (appeal) nya. Penekanan akan difokuskan pada hal-hal yang berkenaan dengan mereka yang terkena musibah dan konflik di beberapa tempat di dunia ini yang paling tidak menguntungkan. Mereka memerlukan perhatian dari komunitas kemanusiaan yang cukup mendesak.

Toby Lanzerr (mantan penerima beasiswa Visiting Fellow dari the Refugee Studies Centre) adalah kepala Proses Pengajuan Konsolidasi (CAP) di Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Jenewa. Artikel ini ditulisnya sendiri. Email: HYPERLINK "mailto:lanzer@un.org" lanzer@un.org

1.HYPERLINK "http://www.reliefweb.int/fts" www.reliefweb.int/fts
2.HYPERLINK "http://www.reliefweb.int/ghd" www.reliefweb.int/ghd

Review DFID terhadap respons tsunami

oleh David Horobin

Development for International Development (DFID) Inggris saat ini telah memprogramkan sekitar £68 juta untuk menyalurkan bantuan segera setelah terjadinya bencana. Meskipun Review Respons Kemanusiaan oleh lembaga tersebut belum selesai, namun pelajaran pendahuluan telah terlebih dahulu diambil.

DFID telah menuntun pemerintah Inggris untuk merespons tsunami yang menghantam kawasan Asia Tenggara pada tanggal 26 Desember lalu. Anggota Operations Team of the Conflict and Humanitarian Affairs Department (CHAD OT) meninggalkan London menuju Colombo pada tanggal 26 Desember malam. Setelah melakukan pertemuan dengan para mitra DFID di British High Commission dan mengunjungi kantor PBB, maka diputuskan untuk segera berangkat ke Ampara, yang menurut laporan adalah kawasan terparah di daerah pantai timur, untuk melakukan penilaian (assessment) untuk PBB dan komunitas kemanusiaan secara luas dengan bantuan dari pemerintah Sri Lanka. Setibanya di sana, tim penilaian bersama yang terdiri dari PBB-USAID-DFID berhasil menyelesaikan penilaian cepat namun komprehensif tentang dampak dan kebutuhan dalam beberapa hari setelah bencana terjadi. Kemudian, staff kami bekerjasama dan memandu awak militer Inggris dalam pemberian bantuan, memprakarsai pengorganisasian tempat tinggal transisi bersama dengan UNHCR dan pejabat nasional serta menyusun rekomendasi program untuk pengaturan CHAD yang memprioritaskan pada tempat tinggal (shelter), perlindungan, dukungan psikososial, pendidikan dan regenerasi sumber kehidupan.

DFID telah mengorganisir bantuan pertama yang berangkat meninggalkan Inggris melalui jalur udara. DFID memberikan kontribusi £10 juta kepada Indian Ocean Flash Appeal yang diluncurkan oleh UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). DFID juga telah menyalurkan £40 juta dari dananya untuk bantuan dan kegiatan pemulihan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bantuan ini merupakan kombinasi antara hibah kepada lembaga-lembaga PBB dan bantuan langsung dalam bentuk barang. Lima unit helikopter yang didanai oleh DFID memegang peranan yang sangat vital dalam pengiriman bantuan PBB dan organisasi lainnya untuk masyarakat yang terisolir di sepanjang pantai barat Sumatera yang telah hancur. Kami menyediakan hibah untuk membantu pekerjaan 25 LSM, beberapa diantaranya bukan bermarkas di Inggris. Sekitar £3,5 juta telah diberikan kepada Organisasi Palang Merah/Bulan

Sabit Merah. Kami juga membayarkan untuk 26 kali penerbangan perbekalan bantuan yang diorganisir oleh Komite Penanganan Bencana dari Inggris (UK's Disasters Emergencies Committee), yaitu sebuah organisasi induk yang mewakili 13 lembaga bantuan dari Inggris.

Selama tahap tanggap darurat, DFID telah mengidentifikasi beberapa masalah. Data masih terbatas, khususnya data-data yang berkenaan dengan dampak yang terjadi di kawasan pantai barat Sumatera. Struktur penanganan darurat setempat juga sangat lemah dan terdapat kebingungan tentang lembaga dari luar (eksternal) yang mana yang akan menangani sektor-sektor khusus. UN Flash Appeal terlambat dibentuk dan tampak tidak terstruktur. Banyak lembaga yang memiliki personel kurang berkualitas dan kurang berpengalaman. Pusat-pusat Informasi Kemanusiaan di Banda Aceh dan Colombo, yang mendukung DFID, juga tidak cukup cepat terbentuk.

Enam bulan setelah bencana, DFID terus mengawasi dan mengikuti program-program yang didanainya. Kami saat ini sedang berada dalam misi monitoring untuk mengecek kemajuan di Indonesia, India, Sri Lanka dan Maladewa. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dilakukan, dimana masih banyak orang yang membutuhkan rumah permanen yang dilengkapi dengan fasilitas air dan pembuangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan serta memberikan bekal untuk membangun kembali kehidupan, sumber mata pencaharian, serta kapasitas dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

DFID menyadari kewajibannya untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pelaksanaan koordinasi dengan prakarsa

dari Good Humanitarian Donorship. Kami saat ini sedang melaksanakan Review Respons Kemanusiaan komprehensif yang merupakan bagian dari respons tsunami kami, dan hasilnya akan disebarluaskan kepada para donor lainnya. Pertemuan antar para manajer operasi donor juga telah direncanakan

Rekomendasi secara rinci tentunya akan muncul, tetapi menurut perspektif pribadi saya yakin bahwa tsunami telah mengajarkan kita tentang perlunya:

- Layanan logistik umum pada jaringan PBB
- Peningkatan pemberdayaan Koordinator Kemanusiaan PBB yang berpengalaman
- Peningkatan respons bencana tetap dari PBB dan EU
- EU untuk menyusun berbagai mekanisme untuk mendukung koordinasi yang lebih baik pada lembaga PBB
- Pedoman yang jelas tentang kerjasama antara pihak militer dan para pekerja kemanusiaan dari kalangan sipil
- Peningkatan standar profesional dan struktur kualifikasi bagi para pekerja untuk kemanusiaan
- Kesepakatan tentang tujuan operasional umum antara para donor.

David Horobin adalah Direktur Tim Operasi dari Conflict and Humanitarian Affairs Department, DFID. Email: [HYPERLINK "mailto:D-Horobin@dfid.gov.uk"](mailto:D-Horobin@dfid.gov.uk) D-Horobin@dfid.gov.uk. Artikel ini ditulisnya sendiri dan bukan mewakili DFID atau pemerintah UK.

1. [HYPERLINK "http://www.dec.org.uk"](http://www.dec.org.uk) www.dec.org.uk

Ferrying relief supplies to Banda Aceh.



Akses para IDP di Aceh pasca-tsunami

oleh Claudia Hudspeth

Setengah juta rakyat Aceh – 12% dari jumlah penduduk provinsi tersebut – menjadi IDP akibat tsunami. Kesulitan mendapatkan akses merupakan tantangan terbesar bagi para aktor kemanusiaan. Pelajaran yang paling penting dapat diambil dalam rangka meningkatkan akses ke IDP di masa-masa tanggap darurat yang akan datang.

Banyak pengungsi meninggalkan provinsi ini atau diambil oleh keluarga lain, tetapi terdapat persentase yang cukup signifikan, biasanya mereka yang paling rentan, tinggal di kamp-kamp penampungan IDP sementara di sejumlah tempat umum – seperti di mesjid-mesjid, sekolah-sekolah, stadion, lapangan terbuka, di pinggir-pinggir desa yang telah hancur atau bahkan di bukit-bukit di kawasan yang menjadi perebutan antara pihak Indonesia dengan gerakan separatis GAM. Di saat komunitas internasional dapat memberikan respons dengan cepat dan menghindari terjadinya kematian lebih lanjut, justru ada tiga rintangan utama untuk diakses di Aceh: yaitu dari segi fisik, informasi dan ‘sosial’. Untuk mengatasi hal ini ternyata sangat sulit, disaat harus memberikan bantuan darurat kepada masyarakat yang dengan lebih mudah diakses pada waktu yang bersamaan.

Rintangan secara fisik untuk mendapatkan akses

Sejak awal memang tampak jelas bahwa akses secara fisik ke banyak IDP akan menimbulkan berbagai permasalahan. Pertama sekali, areal dengan dampak terparah – yaitu 200 km dari garis pantai antara Banda Aceh dan di dekat bagian selatan Meulaboh – yang benar-benar tak terjangkau. Tsunami telah menyapu jalan-jalan dan ratusan jembatan: untuk itu dibutuhkan jembatan dengan kapasitas total 26 km. Garis pantai itu sendiri telah berubah menjadi gundukan pasir baru dan tumpukan puing-puing yang menghambat pendaratan kapal-kapal laut yang lebih besar. Oleh karena itu, akses hanya mungkin dilakukan melalui helikopter dan boat-boat kecil. Dengan demikian, upaya untuk membuka akses bagi para IDP di garis pantai ini membutuhkan dukungan logistik yang cukup mahal, disertai dengan programming staff yang telah berpengalaman di lapangan.

Respons tsunami di Aceh menciptakan level interaksi yang belum pernah ada sebelumnya antara PBB, LSM-LSM dan pihak militer. Dukungan militer – helikopter, pangkalan sementara dan tempat pendaratan kapal-kapal khusus – terbukti sangat bernilai. Akan tetapi, dukungan ini patut ditingkatkan dengan meningkat-

kan mekanisme koordinasi antara pihak militer dengan komunitas kemanusiaan, serta antara berbagai elemen dalam tubuh militer itu sendiri – respons tersebut begitu tinggi dimana terdapat satuan militer dari 15 negara di dunia. Meskipun gugus tugas gabungan (task force) militer daerah telah dibentuk di Thailand untuk mengkoordinir bantuan militer di negara-negara korban tsunami, mekanisme ini dapat pula diimbangi dengan gugus tugas gabungan militer daerah atau unit penghubung antara sipil-militer (CIMIC).

Juga terdapat peluang untuk meningkatkan hubungan antara pasukan militer Indonesia, yang mengkoordinir seluruh asset militer, dengan komunitas internasional menyangkut penyebaran informasi dan pemetaan. Pada beberapa minggu pertama, asset-asset militer sebagian besar dimanfaatkan untuk mengangkut berbagai barang bantuan pribadi ke daerah-daerah yang jauh. Meskipun kegiatan ini dikoordinir oleh TNI, namun tidak ada hubungan yang jelas antara tanggap darurat ini dengan informasi dan rencana strategis yang dilakukan oleh kelompok koordinasi sektor kemanusiaan.

Disamping itu alternatif lainnya tidak diupayakan, karena tersedianya alternatif logistik lewat udara dan bebas biaya. Pembuatan suatu sistem untuk memanfaatkan boat-boat kecil setempat dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi sumber penghidupan para nelayan lokal, kelompok yang secara khusus terkena dampak tsunami. Alternatif sistem kegiatan operasi angkutan lokal untuk mengangkut orang dan barang ke daerah pantai sebelum tsunami di Aceh ini tidak pernah dialami hingga kedatangan militer internasional akhirnya memaksa komunitas internasional untuk menginvestigasi alternatif transportasi lainnya. Pembangunan kembali sistem transportasi lokal dapat meningkatkan kondisi ekonomi lokal dan kehidupan masyarakat rentan, menghidupkan sektor transportasi lokal dan menyediakan sarana transportasi yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang menjadi korban. Penggunaan kapal dan pesawat militer untuk melakukan misi kemanusiaan di daerah konflik merupakan instrumen terakhir yang dapat digunakan.

Akses ke IDP secara merata belum tentu terjamin meskipun menggunakan helikopter. Helikopter hanya terbatas pada zona-zona pendaratan pada daerah non-konflik, yang dapat menghambat akses ke masyarakat IDP yang telah mengungsi ke bukit-bukit (biasanya di daerah-daerah yang tidak aman). Selain masalah keamanan, helikopter juga tidak diizinkan untuk mendarat terlalu lama. Dengan demikian distribusi barang secara merata menjadi terkendala dan dalam beberapa kasus militer Indonesia bertanggung jawab untuk melakukan bongkar-muat dari helikopter dan membagikan barang-barang bantuan tersebut. Tanpa adanya sistem distribusi yang tepat, para IDP yang telah ditempatkan beberapa ratus meter dari zona pendaratan tidak dapat menerima bagian secara adil. Masalah keamanan mengisyaratkan bahwa staff PBB tidak diizinkan untuk menginap di wilayah pantai barat kecuali di beberapa daerah yang cukup terbatas, dengan demikian kapasitas mereka untuk memonitor respons kemanusiaan juga terbatas.

Kerusakan di pantai barat dan tersedianya transportasi militer mengalihkan perhatian ke kelompok IDP yang lebih besar dan terjangkau di tempat lainnya, khususnya mereka yang berada di wilayah pantai timur-laut. Ketidakseimbangan waktu dan sumber dana pun terjadi pada sebagian kecil IDP yang ada di pantai barat.

Tantangan akses informasis

Untuk mengetahui IDP di Aceh – dimana mereka berada dan berapa jumlahnya – cukup sulit. Kamp-kamp berserakan di kota Banda Aceh dan Meulaboh, serta disepanjang ratusan kilometer di daerah garis pantai dan hutan. Secara keseluruhan, ada lebih dari 500 kamp yang terdiri dari hanya beberapa keluarga hingga ratusan keluarga, beberapa diantaranya berada di rumah-rumah sementara, sedangkan yang lainnya berada di tengah-tengah struktur komunitas yang ada.

Pada hari-hari pertama, tidak ada penilaian kebutuhan kemanusiaan komprehensif yang dilakukan. Sebuah upaya telah dilakukan untuk mengumpulkan lembaran informasi dasar bagi para mitra pelaksana untuk menyusuri daerah-daerah IDP, termasuk lokasi, jumlah, situasi umum dan beberapa informasi sektoral dasar. Akan tetapi, bentuk pengumpulan data secara pasif ini bermasalah. Hal ini tergantung pada input dari para mitra – yang biasanya menganggap pengumpulan informasi adalah prioritas ketiga atau keempat – dan tidak menawarkan gambaran situasi secara keseluruhan. Banyak informasi yang tersedia dari

daerah-daerah yang dapat dimasuki tetapi sangat sedikit dari daerah-daerah lainnya yang ada di luar Banda Aceh.

Sejumlah penilaian sektoral telah dilakukan, termasuk penilaian berskala besar yang dilakukan dari atas kapal perang Angkatan Laut Amerika USS Lincoln untuk mengumpulkan informasi mengenai situasi di daerah pantai barat, tetapi tidak ada penilaian multi-sektoral yang dilakukan. Disamping itu, terdapat kepekaan menyangkut informasi, khususnya yang berhubungan dengan sensitivitas politik di daerah pantai timur, dan untuk mengakses informasi yang dikumpulkan oleh sekian banyak aktor kemanusiaan melalui misi yang dilaksanakan dari atas helikopter bantuan militer saat mereka membagikan bantuan ke sebagian wilayah di daerah pantai barat yang tidak dapat diakses.

Injured woman being transported to Banda Aceh for medical treatment.

Dengan demikian permasalahan ini tidak semata-mata dipengaruhi oleh ketiadaan informasi saja tetapi lebih dari ketiadaan informasi multi-sektoral yang komprehensif mengenai situasi kemanusiaan di provinsi tersebut. Informasi dari berbagai macam penilaian disampaikan kepada OCHA Humanitarian Information Centre, yang berusaha melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan dan mengeluarkan informasi ini untuk menyajikannya dalam bentuk yang mudah digunakan. Akan tetapi, tidak sampai beberapa minggu sejak terjadinya krisis, lembaga-lembaga tersebut mulai mendapatkan gambaran yang jelas mengenai lokasi para IDP, kondisi dan kebutuhan mereka. Namun demikian, meskipun tanpa informasi yang lengkap, UNICEF dan lembaga lainnya berusaha memanfaatkan apa yang ada, merespons dengan cepat dan mencegah kematian akibat kondisi darurat seperti cacar air dan kolera.

Tantangan akses sosial

Banyak IDP mengungsi di rumah-rumah keluarga lain dan 'ketidaktampakan' mereka membuat pencarian ke mereka menjadi suatu tantangan. Meskipun kelompok ini tidak mendapatkan sebagian besar bantuan tanggap darurat secara langsung, namun mereka tetap membutuhkan bantuan untuk menyekolahkan kembali anak mereka, bantuan psikososial serta program pencarian untuk menyatukan kembali anak-anak yang terpisah dari keluarganya. Dan pada akhirnya, para IDP justru membebani keluarga yang menjadi tuan rumah.

Meskipun komunitas internasional telah mengalami banyak kemajuan untuk mengakses populasi ini, pemerintah Indonesia memegang peranan utama dengan memberikan solusi



inovatif dengan memberikan bantuan uang tunai kepada keluarga yang menampung para IDP. Bantuan uang tersebut dialokasikan per orang, dan para IDP diminta untuk mendaftarkan diri ke posko komunitas kemanusiaan setempat. Program ini juga dimaksudkan untuk mendata para IDP, dengan demikian dapat memfasilitasi akses ke program-program lainnya. Hal ini juga memungkinkan untuk mengumpulkan informasi mengenai berbagai permasalahan, serta untuk memperkuat dukungan kepada masyarakat dalam menangani ribuan orang maupun keluarga yang mengungsi. Pada akhirnya, program tersebut memberikan mekanisme bantuan langsung yang bermanfaat maupun suntikan dana yang cukup vital bagi perekonomian lokal.

Bagi UNICEF, masalah khusus mengenai akses yang timbul ini erat kaitannya dengan anak-anak yang hilang atau terpisah dari keluarganya. Salah satu tugas utama UNICEF di Aceh termasuk pendaftaran anak-anak yang hilang atau terpisah dari keluarganya, pencarian kembali keluarga mereka dan menyatukannya kembali jika memungkinkan. Namun, ada kelompok-kelompok khusus yang sulit diakses sejak mayoritas dari anak yang kehilangan keluarganya tersebut banyak diadopsi. Sementara itu dalam kondisi darurat lainnya, hanya sedikit anak terlantar yang terlihat. Dengan jumlah anak korban tsunami yang cukup dramatis – yaitu melebihi jumlah kelompok demografik lainnya – keluarga yang merasa kasihan pun mengambil anak-anak ini. Banyak keluarga yang ragu dan enggan untuk mengidentifikasi lebih jauh anak-anak yang terpisah tersebut, karena mereka takut kalau anak-anak ini nantinya akan diam-

bil. UNICEF mendukung sepenuhnya pengadopsian ini sebagai salah satu mekanisme pendukung yang cukup penting, namun demikian mendaftarkan semua anak yang kehilangan keluarganya tersebut juga sangat penting, untuk menyatukan kembali para keluarga dan memungkinkan mereka untuk mengakses berbagai program untuk dapat mengurangi beban keuangan dan kesulitan yang diemban oleh keluarga yang mengasuhnya.

Dengan membuka jaringan bersama LSM-LSM lokal lainnya, UNICEF melakukan kampanye advokasi intensif dan membina hubungan dengan komunitas lokal. UNICEF membantu lembaga-lembaga lokal untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak-anak dan pusat-pusat registrasi dengan berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat. LSM-LSM lokal lebih dipercaya dan lebih mudah diterima oleh masyarakat, dan dapat berintegrasi ke dalam kamp-kamp untuk mengakses berbagai struktur dan pengetahuan masyarakat lokal. Meskipun demikian, selain keberhasilan ini, tidaklah mustahil untuk dapat merangkul lebih banyak anak-anak pada tahapan yang lebih dini melalui pengidentifikasian dan pekerjaan yang dilakukan langsung bersama dengan struktur masyarakat yang timbul dari dalam lingkungan kamp, dan dengan pembinaan kemitraan melalui jaringan keagamaan, termasuk mesjid-mesjid setempat.

Pelajaran yang dapat diambil

Pengalaman Aceh membuka jalan untuk mengatasi hambatan ke akses pada keadaan darurat di masa yang akan datang. Empat pelajaran kunci berkenaan dengan kendala secara fisik antara lain

1. Selain pemanfaatan asset-asset militer dapat menentukan respons efektif, berbagai upaya juga harus dilakukan untuk memperkuat dan memberdayakan sarana transportasi lokal. Hal ini dapat meningkatkan dukungan logistik sesuai dengan pengetahuan lokal, mengatasi kendala keamanan dan membangun kembali kehidupan..
2. Bila memungkinkan, sistem distribusi lokal akan dibangun secepat mungkin dengan memanfaatkan struktur kemasyarakatan atau organisasi Palang Merah/Bulan Sabit Merah. Hal ini dapat mewujudkan pemerataan distribusi barang-barang bantuan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang telah disepakati, serta mengurangi kemungkinan penyalahgunaannya..
3. Perhatian dan bantuan yang adil harus diberikan kepada semua IDP berdasarkan informasi strategis dan kebutuhan kemanusiaan.
4. Dalam pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, harus diupayakan untuk menempatkan berbagai bangunan penting di areal-areal yang tidak riskan terhadap bencana alam.

Pengalaman yang berhubungan dengan kendala informasi juga memberikan beberapa pelajaran, antara lain:

- n Dalam kondisi tanggap darurat dengan banyaknya LSM nasional dan internasional yang luar biasa (UNICEF memiliki sekitar 400 mitra), Pusat Informasi Kemanusiaan (HIC) PBB sangat penting untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi: pendirian HIC ini harus selalu menjadi salah

satu prioritas utama dalam keadaan darurat.

- n Penyebaran informasi melalui kelompok kerja sektoral secara umum cukup baik, meskipun ada sedikit kendala.
- n Global Positioning System (GPS) handsets yang disediakan oleh UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) cukup penting untuk memetakan dan mengakses populasi para IDP yang lebih jauh dan kurang terpantau dengan jelas: OCHA harus memastikan ketersediaan GPS pada keadaan-keadaan darurat selanjutnya.
- n The many volunteers who poured Relawan yang banyak datang ke Aceh memasang mata dan kaki di lapangan untuk mengumpulkan informasi: sistem pengumpulan informasi yang agak sedikit tradisional ini dapat digunakan dan didukung semaksimal mungkin.
- n *Pendekatan Ad hoc untuk berbagai macam penilaian harus dihindari: jika memungkinkan penilaian kemanusiaan yang dilakukan oleh gabungan multi-lembaga dan multi-sektoral harus diprioritaskan dan dilaksanakan dalam beberapa hari pertama sebagai acuan untuk respons.*
- n Jika asset-asset militer dimanfaatkan untuk tujuan kemanusiaan, maka keberadaan CIMIC (civil-military coordination centre) atau pusat koordinasi sipil-militer perlu dipastikan pada saat-saat pertama dalam rangka untuk memudahkan akses ke instalasi-instalasi militer untuk keperluan penilaian (assessment) dan untuk memastikan bahwa informasi penting dari pihak

militer mengenai situasi kemanusiaan dapat diakses.

Akan tetapi, yang terpenting, respons di Aceh membuktikan bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih baik daripada keberadaan. Pendirian kantor-kantor di lapangan yaitu di daerah-daerah yang lebih jauh terlebih dulu, serta dikepalai oleh staff lapangan yang berpengalaman menimbulkan perbedaan kualitas respons yang sangat besar.

Akses ke IDP merupakan tantangan besar bagi komunitas kemanusiaan dalam upayanya untuk menjamin ketepatan waktu dan respons kemanusiaan sebagaimana mestinya. Dengan semakin meningkatnya tanggap darurat yang melibatkan para IDP, dan upaya tanggap darurat yang kian profesional, pengalaman kolektif kami pun semakin meningkat. Berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang dapat diambil, kami dapat memperkuat respons dalam menghadapi berbagai krisis di masa yang akan.

Claudia Hudspeth (lulusan dari Refugee Studies Centre dan seorang praktisi medis) adalah koordinator tim tanggap darurat di UNICEF's Emergency Operations (EMOPS). Ia mengepalai Sub-Office lembaga ini di Aceh selama tiga bulan pertama setelah bencana. Email: [HYPERLINK "mailto:chudspeth@unicef.org"](mailto:HYPERLINKmailto:chudspeth@unicef.org) chudspeth@unicef.org. Artikel ini ditulisnya sendiri dan bukan mewakili pendapat UNICEF.

1. www.humanitarianinfo.org/sumatra

UNICEF-supported children's centre, IDP camp, Banda Aceh.



Penampungan IDP ke barak-barak di Aceh

oleh Lukman Age

Keterbukaan Aceh terhadap masyarakat internasional setelah tsunami menawarkan secercah harapan bagi rakyat Aceh. Akan tetapi, disaat rencana rehabilitasi dan rekonstruksi mulai diimplementasikan, harapan akan perdamaian dan pembangunan justru dipupuskan oleh ketidakpekaan pemerintah terhadap berbagai kebutuhan lokal.

Sebelum bencana, banyak rakyat Aceh telah hidup dalam kondisi yang cukup sulit karena adanya kampanye perlawanan-pemberontakan yang dikumandangkan oleh pasukan militer Indonesia terhadap kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Berbagai harapan untuk kembali hidup normal dan kesempatan untuk membangun kehidupan yang berkesinambungan dihancurkan oleh program relokasi pengungsi oleh pemerintah. Rencana yang bersifat top-down ini lebih memfokuskan pada pemindahan para IDP dari kamp-kamp darurat ke barak-barak penampungan sementara daripada rehabilitasi dan pembangunan rumah permanen sebagaimana yang diminta oleh para korban tsunami.

Dengan pembangunan yang kabarnya dianggap sesuai dengan standar-standar internasional, dibangun barak dari papan sepanjang 30 meter yang dilengkapi dengan pasokan listrik dan air. Masing-masing barak terdiri dari belasan ruang keluarga berukuran 10 m² ditambah dengan sebuah dapur umum, dua kamar mandi dan aula untuk pertemuan, belajar dan beribadah. Pemerintah berencana untuk memindahkan 140.000 IDP dari kamp-kamp darurat dan memberikan tunjangan bulanan sebesar 90.000 rupiah (\$9) untuk masing-masing IDP. Mereka yang hidup di barak tampaknya sangat tergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah tanpa adanya sarana untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan tidak ada kegiatan lain selain makan untuk bekerja.

Banyak IDP yang dipaksa untuk menerima relokasi karena mereka juga tidak memiliki uang untuk menyewa atau membangun kembali sendiri. Mereka tidak cukup terbantu oleh fakta bahwa berbagai organisasi kemanusiaan internasional telah datang untuk membantu relokasi pengungsi. Pemerintah Indonesia, PBB dan sejumlah LSM bergabung dalam satu tim untuk melakukan penilaian cepat (rapid assessment) terhadap lokasi-lokasi untuk relokasi dan Badan Koordinasi Bencana Nasional Urusan Pengungsi (Bakornas) serta Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) telah bersama-sama mengkoordinir Joint Relocation Centre Liaison Unit.

Para kritikus berpendapat bahwa relokasi di Aceh menunjukkan banyak unsur yang sama seperti dalam program transmigrasi yang dilaksanakan pada tahun 1980-an dan relokasi penduduk desa secara paksa setelah diberlakukannya darurat militer di Aceh pada bulan Mei 2003. Human Rights Watch telah mengalihkan perhatian kepada data dari pasukan militer Indonesia tentang penempatan para pengungsi Aceh di kamp-kamp akibat konflik yang terjadi dimana kebebasan mereka untuk bergerak dibatasi dan terjadi pula pelanggaran hak-hak azasi manusia. Menteri Kesejahteraan Rakyat menyatakan bahwa lokasi-lokasi barak tersebut telah dipilih dan telah mendapatkan persetujuan dari penguasa militer. Tidak jelas seberapa besar kebebasan bergerak diizinkan di dalam maupun di luar barak. Meskipun mereka tidak akan dipagari dengan kawat berduri, namun tetap ada patroli pengamanan untuk mencegah terjadinya kontak senjata dengan GAM.

Masa depan yang tak pasti bagi para penghuni barak

Tidak ada usaha khusus yang dilakukan untuk menilai dampak psikologis akibat pemaksaan kepada masyarakat untuk tinggal di barak selama kurang lebih dua tahun. Tinggal bersama dalam suatu kelompok besar tidaklah umum di Aceh. Orang-orang lebih suka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil di meunasah (mesjid kecil) yang berada ditengah-tengah masyarakat. Di areal pedesaan, meunasah menjadi simbol kunci masyarakat dan harta yang paling berharga, juga merupakan titik fokus bagi para jama'ah, tempat pertemuan atau berbincang sesaat dengan sesama teman. Banyak desa di Aceh yang menunjukkan pentingnya meunasah dalam namanya, seperti: Meunasah Jiem, Meunasah Tuha, atau Meunasah Blang. Anggota dari suatu meunasah tertentu memiliki tanggung jawab untuk saling menjaga dan melindungi dari ancaman-ancaman yang datang dari luar. Tinggal di barak dengan banyak orang asing akan menimbulkan tantangan yang cukup besar bagi banyak masyarakat desa di Aceh. Barak tidak memberikan privasi dan cenderung menimbulkan

stress, perdebatan dan dapat meningkatkan resiko pelecehan seksual.

Korban tsunami yang selamat merasa khawatir jika relokasi yang dilakukan jauh dari desanya dapat membuat mereka kehilangan tanahnya. Banyak diantara mereka yang telah kehilangan sertifikat kepemilikan resmi dan dalam beberapa kasus batas-batas tanah mereka juga telah hilang oleh tsunami. Masyarakat desa juga banyak yang takut bila pihak lain sampai merampas dan menempati tanah-tanah milik mereka kecuali jika mereka bisa melakukan kunjungan sesering mungkin ke lokasi tersebut.

Korupsi telah mengakar di Indonesia. Para IDP khawatir jika perjanjian pangan dan bahan-bahan lainnya tidak akan dipenuhi secara long-term. Ada laporan yang menyatakan bahwa para IDP yang seharusnya menerima tunjangan Rp. 150.000 per bulan, justru dipaksa untuk menerima bantuan dalam bentuk barang yang nilainya lebih kurang sama. Para kontraktor barak pun tidak diseleksi melalui proses tender terbuka bahkan dilaporkan pula bahwa beberapa diantaranya dengan curang telah menerima dana tanpa ada barak yang dibangun. LSM anti-korupsi, Aceh Damai Tanpa Korupsi - ADTK, telah membutuhkan bahwa sejumlah barak yang telah selesai bahkan lebih kecil dari yang direncanakan dan tidak memenuhi standar minimum Sphere.

Relokasi ke barak akan menunda proses pemulihan sosial jika komunitas IDP terus mengharapkan bantuan dengan lebih mengandalkan kapasitasnya sebagai korban, dari pada sebagai mereka yang selamat dari tsunami. Hal ini sangat disayangkan disaat sebaliknya banyak orang Aceh yang ingin terlibat secara langsung dan aktif dalam pembangunan kembali Aceh pasca bencana. International Organization for Migration (IOM) telah bekerjasama dengan USAID dalam pelaksanaan sebagian besar survey untuk menilai perkembangan pemberian bantuan dan proses rekonstruksi. Temuan utama yang didapatnya adalah prioritas dari hampir semua korban tsunami yang ingin kembali ke rumahnya masing-masing, kembali bekerja dan membangun kembali komunitasnya. Dengan menyadari betul adanya kemungkinan pendudukan lahan/perselisihan kepemilikan tanah, para IDP mengatakan bahwa mereka setuju untuk direlokasi secara permanen tetapi jika mereka dijamin dengan hak kepemilikan resmi atas lahan dan rumah yang ditempatinya tersebut. Sebagian besar IDP menunjukkan keinginannya yang kuat untuk direlokasi, baik untuk sementara maupun secara permanen, ke daerah-daerah

rah yang dekat dengan kampung halaman. Mereka juga menunjukkan keinginannya yang kuat untuk tidak lagi tinggal di barak. Orang Aceh terkenal dengan kemandiriannya dan sejumlah responden yang cukup signifikan mengatakan bahwa mereka bersedia menerima bahan-bahan bangunan seperti kayu dan semen. Banyak diantara mereka yang meminta bantuan pekerjaan dan hanya 4% dari mereka yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka telah menerima bantuan untuk membantunya mendapatkan pekerjaan kembali.

Para keluarga yang sejak lama telah bergantung pada pekerjaannya sebagai nelayan dengan marah menolak rencana relokasi tersebut dan menolak untuk meninggalkan desanya. Dalam suatu rapat

Families are bitterly opposed to the relocation plans

umum para perwakilan nelayan telah sepakat untuk bersama-sama menyatakan penolakannya untuk meninggalkan tanah mereka walau bagaimanapun juga. Sikap mereka ini sama sekali tak terduga sebelumnya dalam suatu lingkungan masyarakat yang sampai saat ini telah menerima instruksi resmi tanpa perlawanan. Akan tetapi, tidaklah mudah untuk terus melakukan perlawanan dengan adanya kekuatan militer dan keputusan dari pemerintah untuk tidak memberikan bantuan bagi mereka yang menolak untuk dievakuasi dari desanya.

Kebijakan pemerintah bersifat top down dan berdasarkan target serta tidak memberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Mereka yang bertanggung jawab dalam program relokasi harus:

- n menempatkan barak sedekat mungkin dengan desa asal dan dalam jangkauan areal yang masih memiliki peluang kerja
- n lebih transparan dalam proses pembangunan dan pengelolaan barak
- n memaklumi keinginan para IDP untuk kembali ke desa asalnya sesegera mungkin
- n mengetahui bahwa dalam Guiding Principles on Internal Displacement orang yang mengungsi hanya dapat direlokasi berdasarkan pemberitahuan dan persetujuan mereka sendiri
- n melakukan sesuatu untuk lebih memastikan tentang keterpaduan antar unit-unit sosial yang dibangun
- n mengumumkan dan memasukkan dalam jadwal tentang kegiatan pemulihan pelayanan dan infrastruktur dasar serta memfasilitasi kepulauan masyarakat mendukung kegiatan pemberian bantuan pekerjaan yang komprehensif yang turut
- n mempertimbangkan berbagai perubahan dalam struktur keluarga yang terkena dampak tsunami
- n menyediakan informasi publik dan

pengetahuan yang mengatasi kekhawatiran banyak orang tentang bencana alam di masa yang akan datang: komunitas yang telah dipindahkan harus dilibatkan dalam penyusunan rencana khusus lokal jangka panjang dalam menghadapi dan menangani bencana..

Lukman Age mengkoordinir Program Aceh di Research and Education for Peace Unit of Universiti Sains Malaysia, Penang (HYPERLINK "<http://www.seacsn.net/regional>" www.seacsn.net/regional) dan juga seorang peneliti di Aceh Institute, Banda Aceh: HYPERLINK "<http://www.acehinstitute.org>" www.acehinstitute.org Email: HYPERLINK "<mailto:zitkalasa2000@yahoo.com>" zitkalasa2000@yahoo.com

1. HYPERLINK "http://www.humanitarianinfo.org/sumatra/assessments/doc/GoI_UN-joint_assessment_report_on_relocation_sites.doc" www.humanitarianinfo.org/sumatra/assessments/doc/GoI_UN-joint_assessment_report_on_relocation_sites.doc
2. HYPERLINK "<http://hrw.org/english/docs/2005/02/07/indone10134.htm>" <http://hrw.org/english/docs/2005/02/07/indone10134.htm>
3. HYPERLINK "http://www.iom.int/tsunami/documents/indonesia_needs_assessment.pdf" www.iom.int/tsunami/documents/indonesia_needs_assessment.pdf

Banda Aceh



Memastikan standar minimal untuk perawatan kesehatan reproduksi

oleh Sandra Krause

Terdapat peningkatan kesadaran bahwa perawatan Kesehatan Reproduksi (KR) merupakan kebutuhan penyelamatan pada tahap-tahap awal tanggap darurat. Evaluasi di Aceh telah menyoroiti kelemahan yang ada saat ini serta perlunya pelatihan yang lebih banyak dan kesadaran yang lebih tinggi.

Wanita dan gadis pengungsi menghadapi resiko kesehatan yang cukup rentan, termasuk kekerasan seksual, HIV/AIDS serta penyakit-penyakit yang menular melalui hubungan seksual, kehamilan dengan resiko cukup tinggi dan tidak dikehendaki, serta aborsi yang membahayakan. Lebih dari 150.000 wanita hamil diperkirakan menjadi korban tsunami. Lima belas persen dari total jumlah penduduk mengalami komplikasi kehamilan dan kesulitan melahirkan serta memerlukan perawatan obstetrik untuk penyelamatan darurat disaat para petugas kesehatan penyelamat mengalami kekurangan material dan persediaan yang sebagian besar cukup mendasar.

Satu dekade yang lalu, kelompok kerja antar-lembaga dari lembaga-lembaga PBB dan organisasi internasional lainnya menyusun suatu Paket Layanan Awal Minimal atau Minimum Initial Services Package (MISP), yang meliputi serangkaian kegiatan dan layanan kesehatan reproduksi untuk mencegah dan menangani dampak dari kekerasan seksual, mengurangi penyebaran HIV, mencegah angka kelahiran baru (neonatal) serta kematian ibu dan rencana untuk memberikan layanan kesehatan reproduksi komprehensif disaat situasi krisis mulai berangsur stabil.²

Prioritas kegiatan MISP adalah sebagai berikut::

- n identifikasi lembaga dan individu pemandu yang mengkoordinir pelaksanaan MISP
- n pencegahan kekerasan seksual dengan memastikan keikutsertaan para pengungsi wanita dan gadis remaja dalam pemberian dan penyebaran bantuan darurat, akses yang aman untuk memperoleh air, makanan, bahan bakar dan perawatan medis serta rancangan kamp yang layak
- n pelayanan medis terhadap kekerasan seksual bagi korban yang selamat
- n pencegahan penularan HIV dengan memberikan pengetahuan tentang pencegahan
- n penularannya serta menjamin ketersediaan pasokan darah yang aman dan kondom
- n pengurangan angka kelahiran baru (neonatal) dan angka kematian ibu (morbiditas dan mortalitas) dengan membagikan peralatan steril untuk digunakan oleh para ibu atau bayi

yang baru lahir, peralatan kebidanan bagi pusat-pusat kesehatan dan menciptakan suatu sistem rujukan untuk menangani kasus obstetris darurat

n rencana penyediaan layanan KR komprehensif yang terpadu dengan layanan kesehatan pokok melalui pengumpulan data latar belakang KR, pasokan barang-barang, pengidentifikasian lokasi-lokasi pemberian layanan serta perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pelatihan.

Pada akhir Pebruari 2005, Komisi Wanita (Women's Commission) melakukan penilaian terhadap perawatan kesehatan reproduksi di Aceh. Dalam jangka waktu seminggu sejak bencana tsunami, UNFPA (Dana Kependudukan PBB) telah mengerahkan staff teknis serta menyediakan dan membuka beberapa titik yang menjadi fokus KR di lapangan serta material dan supply penting untuk kesehatan reproduksi. Hingga akhir Pebruari, lebih dari 35 orang perwakilan dari organisasi internasional, lokal maupun nasional ikut serta dalam pertemuan mingguan antara UNFPA-dengan kelompok kerja pemandu KR..

Yang menjadi fokus pada hari-hari dan minggu-minggu pertama tanggap darurat adalah pertukaran informasi antar anggota masyarakat dan berbagai kelompok seperti para bidan, dukun bersalin tradisional atau traditional birth attendants (TBA), para pemuka masyarakat (pria maupun wanita) serta para aktor kemanusiaan. UNFPA dan WHO telah memprakarsai pengumpulan data dasar secara bulanan tentang jumlah wanita usia produktif, wanita hamil serta angka kematian atau morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. Berdasarkan konsultasi yang dilakukan dengan berbagai kelompok wanita menunjukkan bahwa wanita pengungsi membutuhkan alat kontrasepsi. Bekerjasama dengan persatuan keluarga berencana nasional dan lembaga-lembaga lainnya, UNFPA dapat memobilisasi dan mendistribusikan supply dengan cepat..

Akan tetapi, mitra kerja

UNFPA dalam pelaksanaan kegiatannya di provinsi Aceh, yang meskipun berminat untuk menyediakan layanan KR bagi masyarakat yang terkena bencana, namun tidak mengetahui sasaran kunci dan prioritas kegiatan MISP. Hanya setengah dari petugas kemanusiaan yang diinterview pernah mendengar tentang MISP tetapi hanya sedikit yang dapat menjelaskan tentang tujuan dan prioritas kegiatannya.

Kelemahan dalam pelaksanaan MISP

Karena laporan-laporan mengenai kekerasan seksual cukup terisolir dan cenderung tidak mengindikasikan masalah besar, maka para aktor kemanusiaan dan staff pemerintah tidak banyak yang mengetahui tentang perawatan medis bagi mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Meskipun hampir semua lembaga internasional memiliki kode etik tersendiri, namun tak satupun diantara mereka yang mengetahui tentang mekanisme pelaporan terhadap kekerasan dan sebagian besar tidak memberitahukan kode etik tersebut kepada para mitra lokalnya. Wanita dan gadis remaja mengungkapkan sulitnya untuk berbagi akomodasi, WC dan shower dengan orang asing maupun laki-laki. Terdapat sejumlah laporan menyangkut kekerasan seksual tetapi masih terdapat kekhawatiran bahwa staff Kementerian Kesehatan (MOH) dan para aktor kemanusiaan sebagian besar tidak mengetahui tentang

Woman receives mattress and baby clothes for her 6-month-old daughter, Indonesia.



pelayanan klinis resmi bagi para korban perkosaan baik secara nasional maupun internasional.

Sepuluh persen dari 5.500 orang bidan di Aceh tewas selama tsunami. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, 120 orang bidan dari Jakarta diperbantukan ke pusat-pusat pelayanan kesehatan di Aceh untuk jangka waktu dua hingga tiga minggu. Sebagian besar supply untuk mendukung MISP, seperti peralatan steril dan kelengkapan kebidanan untuk pusat-pusat kesehatan, disediakan bagi lembaga-lembaga internasional dalam beberapa minggu selama tahap darurat. Akan tetapi sejumlah peralatan tidak tersedia, seperti peralatan untuk dukun bersalin tradisional (TBA) dan dalam beberapa kasus, supply yang telah ada tidak didistribusikan oleh lembaga-lembaga tersebut kepada para wanita hamil atau para TBA yang ada di lapangan. Bahkan sebelum tsunami pun, para bidan yang bekerja berdasarkan pada masyarakat (community-based) melaporkan bahwa mereka memiliki kapasitas terbatas untuk memberikan pelayanan kebidanan darurat mendasar sebelum merujuk pasien tersebut ke rumah sakit rujukan untuk mendapatkan perawatan.

Kondom tidak tampak tersedia bagi para pengunjung pusat-pusat pelayanan kesehatan, meskipun ada lembaga yang telah menyiapkan satu tempat untuk menyediakannya. Banyak lembaga yang tidak menyediakan kondom secara bebas karena mereka berasumsi, diakui atau tidaknya, hal tersebut tidak dapat ditolerir dalam budaya Islam dan oleh pejabat dinas kesehatan Indonesia. Beberapa lembaga tidak menyadari tentang pentingnya penyediaan kondom. Sementara itu, pihak lain cukup terbuka terhadap saran tersebut dan

mau mempertimbangkan untuk menyediakannya bagi para petugas sebagai langkah pertama.

Perwakilan dari MOH dan WHO melaporkan bahwa kendala-kendala signifikan menyangkut praktek-praktek perinatal kesehatan dasar yang dihadapi oleh para petugas kesehatan sebelum terjadinya tsunami, meliputi kebersihan, pembasmian hama dan sterilisasi supply medis untuk mencegah penyebaran infeksi, termasuk HIV. Meskipun transfusi darah yang aman merupakan bagian dari prosedur secara nasional, namun masih terdapat kekhawatiran dari banyak orang apakah semua darah tersebut telah disaring terlebih dahulu atau belum.

Kesimpulan

Temuan ini menunjukkan bahwa kehadiran lembaga pemandu dan pendirian titik fokus (focal point) KR dapat mendukung koordinasi pemrograman KR serta ketersediaan pasokan. Para aktor kemanusiaan di Aceh telah menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan prinsip-prinsip MISP dan pasokan peralatan, tetapi hanya sedikit yang mengetahui tentang prioritas layanan KR dimaksud yaitu untuk mencegah angka morbiditas dan mortalitas yang berlebihan pada keadaan darurat yang baru. Fakta menunjukkan perlunya pelatihan pra-darurat (pre-emergency training) mengenai MISP bagi para aktor kemanusiaan. Women's Commission telah memprakarsai penyusunan modul pembelajaran jarak jauh yang mudah digunakan serta menerjemahkannya kedalam berbagai bahasa yang banyak digunakan di dunia. Modul ini akan terbit awal September 2005 (email

HYPERLINK "mailto:info@womenscommission.org" info@womenscommission.org).

Women's Commission juga mendesak pemerintah, para donor dan aktor kemanusiaan lainnya untuk memastikan bahwa MISP tersedia bagi para penerima manfaat (beneficiaries) dalam berbagai situasi darurat yang baru. Sebuah laporan berjudul 'Reproductive Health Priorities in an Emergency: Assessment of the Minimum Initial Services Package in Tsunami-affected areas of Indonesia', juga tersedia di website Women's Commission.

Sandra Krause adalah Direktur, Reproductive Health Programme, Women's Commission for Refugee Women and Children. Email: HYPERLINK "mailto:sandra@womenscommission.org" sandra@womenscommission.org

1. HYPERLINK "http://www.womenscommission.org/projects/rh/misp%20index.shtml" www.womenscommission.org/projects/rh/misp%20index.shtml

MISP kini termasuk dalam Sphere Project Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response: HYPERLINK "http://www.sphereproject.org" www.sphereproject.org

2. HYPERLINK "http://www.womenscommission.org/pdf/id_misp_eng.pdf" www.womenscommission.org/pdf/id_misp_eng.pdf



Koordinasi kemanusiaan di Indonesia: dari sudut pandang LSM

oleh Carsten Völz

Meskipun komunitas kemanusiaan menyadari tentang pentingnya koordinasi, namun pengalaman di Indonesia pada beberapa bulan pertama setelah tsunami memberikan pelajaran yang sangat berharga.

PBB telah melakukan berbagai upaya yang signifikan untuk mengkoordinir berbagai kegiatan, tetapi pendekatan yang tampaknya didasari pada asumsi jika terdapat alokasi sumber daya yang cukup di lapangan, maka koordinasi akan terbina dengan sendirinya – tidak selamanya menghasilkan koordinasi yang efektif. Di beberapa level bahkan terlalu banyak koordinasi. Dengan banyaknya lembaga PBB di Banda Aceh yang bersaing demi mempertahankan lahannya masing-masing, koordinasi justru menjadi tak terkendali, dengan 72 kali rapat koordinasi di Banda Aceh setiap minggunya. Sebagian besar LSM bahkan tidak memiliki sumber daya meskipun hanya untuk menghadiri sebagian kecil dari pertemuan tersebut yang pada akhirnya hanya dihadiri oleh 10-40 lembaga – jumlah ini hanya sebagian kecil dari 400 LSM internasional yang ada. Banyak rapat koordinasi yang tidak memiliki rumusan tujuan yang jelas dan tidak menjelaskan tentang peranan, tanggung jawab dan hak untuk mengambil keputusan bagi para peserta. Seringkali tidak jelas apakah tujuan rapat tersebut untuk berbagi informasi, menyusun konsensus atau pengambilan keputusan operasional maupun kebijakan. Staff senior seringkali menghabiskan lebih banyak waktu untuk koordinasi daripada implementasi.

Banyaknya pertemuan mencerminkan kecenderungan kepada peningkatan spesialisasi kemanusiaan dan ketidakmampuan untuk memfokuskan pada urusan inti kita. Waktu yang cukup signifikan pun dihabiskan untuk mendiskusikan masalah kebijakan dan pendekatan untuk pelaksanaan rekonstruksi dan pemulihan pendapatan masyarakat disaat banyak kawasan permukiman yang terkena bencana di Aceh masih kekurangan akses untuk mendapatkan sanitasi dasar selama dua bulan sejak terjadinya bencana. Komunitas kemanusiaan sebagian besar terpecah-pecah dan membiarkan isu-isu penting terbengkalai begitu

saja untuk jangka waktu yang cukup lama.

Terlalu banyak lapisan koordinasi. Kelompok koordinasi serupa yang dipiloti oleh PBB bekerja dengan isu-isu yang sama di Jakarta, Medan, Banda Aceh dan Meulaboh, dan dengan hanya sedikit komunikasi antar mereka. Akibatnya pedoman dan standar yang sama disusun secara terpisah-pisah. Beberapa lembaga PBB bahkan melakukan koordinasi sekaligus implementasi, sehingga mereka terkadang tampak lebih terfokus pada agenda pertemuannya sendiri dengan pemerintah Indonesia daripada mewakili bagian kepentingan dari komunitas kemanusiaan. PBB membuka Humanitarian Information Centre (HIC) atau Pusat Informasi Kemanusiaan yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi untuk memudahkan lembaga-lembaga kemanusiaan dalam mengambil keputusan mengenai program yang disampaikan. Akan tetapi, pusat informasi tersebut hanya beroperasi secara penuh selama beberapa minggu dan meskipun telah cukup membantu selama beberapa minggu pertama yang begitu sulit namun pusat informasi ini juga tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan. Dua pusat pelayanan kemanusiaan lainnya juga didirikan – yaitu Joint Logistics Centre dan Humanitarian Air Service.

Peranan militer

Kenyataan bahwa pihak militer Indonesia mengkoordinir penggunaan asset-asset militer yang disediakan oleh pihak pemerintah asing bertentangan dengan praktek kemanusiaan yang baik yang menyebutkan bahwa kontribusi militer untuk respons kemanusiaan harus berada di bawah koordinasi pihak sipil. LSM-LSM seringkali diabaikan dalam penggunaan asset-asset tersebut untuk melakukan penilaian dan memulai operasi tanggap darurat. Ketika LSM-LSM telah memiliki kapasitas meng-

gunakan jalur udara untuk mengangkut barang dari daerah-daerah lainnya di Indonesia menuju Banda Aceh dan Meulaboh, penggunaan kapal dan helikopter untuk mengakses komunitas yang ada di pantai barat Sumatra yang terparah dan tidak dapat diakses justru dibatasi. Pada dua minggu pertama masa darurat, para wartawan dapat melakukan perjalanan lebih mudah dengan menggunakan helikopter daripada staff LSM. Pihak militer yang beroperasi di daerah ini tidak mengumpulkan informasi secara sistematis tentang kelompok masyarakat yang menjadi korban. Informasi yang sangat minim terkumpul itupun tidak terbuka bagi LSM. Situasi ini agak sedikit membaik tidak lama setelah munculnya berbagai keluhan. Namun yang tak dapat berubah adalah kenyataan bahwa aksi kemanusiaan ini berada di bawah kendali pihak yang bertikai di Aceh dengan implikasi yang cukup serius bagi netralitas komunitas kemanusiaan. Sesuatu yang lebih dapat dilakukan pada tingkat yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara peranan para aktor kemanusiaan dengan pihak militer Indonesia..

LSM besar lawan LSM kecil

Banyaknya komunitas kemanusiaan di Aceh tampak jelas dari panjangnya daftar yang dikumpulkan oleh Pusat Informasi Kemanusiaan (Humanitarian Information Centre) yaitu sebanyak 203 halaman. Disamping itu, pada LSM-LSM Internasional yang telah terdaftar (yang mengerjakan sekitar 5.000 staff internasional seiring dengan tingginya respons) terdapat sejumlah lembaga internasional lebih kecil yang dapat mengambil jalan pintas dalam proses registrasi, yaitu sekitar 120 LSM Aceh yang telah terbentuk sebelumnya dan banyak lagi kelompok-kelompok kecil melawan Indonesia yang tiba dari berbagai daerah di negara ini.

Mekanisme koordinasi yang diban- gun oleh komunitas internasional tidak menyentuh lembaga-lembaga lokal, khususnya lembaga-lembaga yang bekerja di lokasi-lokasi terpencil. Semua pertemuan dilakukan dalam bahasa Inggris, tanpa adanya terjemahan kedalam bahasa setempat. Tidak dapat dimengerti apa yang



sebenarnya terjadi, banyak LSM lokal yang mendadak berhenti menghadiri pertemuan tersebut. Dominasi penggunaan bahasa Inggris digambarkan oleh pengalaman staff CARE yang menyiapkan database tentang lokasi-lokasi IDP untuk digunakan oleh HIC. Karena tertulis dalam Bahasa Indonesia, HIC menghabiskan waktu selama dua minggu untuk memproses data tersebut dimana banyak waktu dan sumber dana yang terbuang karena lembaga-lembaga lainnya juga ikut mengirimkan staff untuk mewawancarai para IDP dan mengumpulkan informasi yang sebenarnya telah diketahui.

Pemerintah Indonesia, sejumlah lembaga PBB dan bahkan sebagian besar LSM Internasional mempertanyakan kemunculan lembaga dan kelompok kecil, yang memiliki kualitas dan sumber daya yang rendah. Bencana ini, selain menarik sejumlah aktor yang masih diragukan – seperti masuknya organisasi yang berbasis agama tertentu dalam daftar HIC – juga banyak lembaga kecil yang memberikan kontribusi secara signifikan untuk pelaksanaan respons secara keseluruhan, serta menghilangkan kesenjangan yang tidak dapat ditangani oleh lembaga-lembaga yang lebih besar. Mereka mungkin saja mendapat bantuan yang lebih besar dengan mekanisme koordinasi yang cukup efektif. CARE dan LSM Internasional yang lebih besar lainnya mencoba untuk membina kerjasama dengan para aktor yang lebih kecil di tingkat daerah. Hal ini dapat berjalan dengan baik bila amanat tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya, untuk menghindari tumpang tindih dan berupaya untuk memodifikasi berbagai pendekatan program yang masih diragukan. Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu (misalnya Kosovo), wilayah tugas yang menjadi tanggung jawab PBB dipercayakan kepada LSM-LSM Internasional kunci untuk meng-

koordinir lembaga-lembaga lainnya. Pendekatan yang cukup berhasil ini dapat diterapkan pula di Aceh..

Pemberitaan mengenai isu-isu koordinasi

Sebagian besar orang pasti setuju bahwa koordinasi cukup penting tetapi terdapat perbedaan persepsi tentang apa makna yang ditimbulkan dari koordinasi tersebut. Dalam bentuknya yang paling minimal, koordinasi ini mencakup pengukuran khusus untuk menghindari tumpang tindih atau upaya yang lebih mendalam untuk menyelaraskan berbagai respons. Yang terakhir ini dapat menimbulkan masalah yang cukup signifikan bagi LSM-LSM seperti CARE misalnya yang badan koordinasinya dianggap tidak netral – keterlibatannya dengan PBB atau ‘gabungan dari segala macam kepentingan’ lainnya – dan upaya-upaya penyelarasan justru menghambat kewajiban LSM untuk bertindak adil tanpa memihak. Terdapat pula kesulitan yang cukup signifikan dimana badan koordinasi memiliki tanggung jawab bersama untuk melaksanakan operasi dan koordinasi. Dalam hal ini mungkin terdapat segelintir kepentingan dan kurangnya fokus yang objektif.

Struktur koordinasi dapat menjadi kuat tetapi akan lemah pada prakteknya jika badan koordinasinya tidak memadai – khususnya sumber daya dan tenaga staff. Jika koordinasi tersebut baru terbentuk dan/atau belum berpengalaman serta jika struktur penyebaran informasi tidak lengkap, maka sulit untuk menciptakan suatu lingkungan yang kondusif untuk melaksanakan partisipasi, kolaborasi dan kerjasama.

Rencana ke depan

Komunitas kemanusiaan internasional harus lebih proaktif dalam perencanaan selanjutnya, terutama

menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- n penentuan kebutuhan informasi
- n menyampaikan bentuk-bentuk penilaian yang telah distandarisasi
- n kontekstualisasi standar-standar minimum SPHERE yang berkenaan dengan respons bencana⁵
- n mengetahui hubungan yang jelas antara struktur koordinasi di tingkat nasional, provinsi, daerah dan sektoral
- n recognising competencies in mengetahui tentang kompetensi dan rencana awal untuk menyesuaikan antara pembagian tenaga kerja dan pengalokasian sumber daya
- n recognising the critical roles of mengetahui tentang berbagai peranan penting dari pemerintah pusat maupun pihak militer serta mengklarifikasikan tugas dan tanggung jawab mereka
- n pra-pembinaan struktur koordinasi LSM Internasional dengan sistem melekat untuk kolaborasi, representasi dan advokasi
- n menyentuh organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan lokal maupun nasional
- n pemetaan kapasitas di daerah-daerah yang beresiko tinggi.

Meskipun mendapat kecaman, respons tsunami secara keseluruhan cukup efektif dan mendorong timbulnya pembelajaran institusional. Dengan perencanaan kedepan yang lebih baik dan lebih besar yang akan memperhatikan berbagai pelajaran yang didapat dari respons pascatsunami, masyarakat internasional dapat menemukan bahwa dirinya akan lebih siap dan lebih lengkap untuk melakukan koordinasi secara efektif bila terjadi bencana lainnya di masa yang akan datang.

Carsten Völz adalah Emergency Operations and Preparedness Coordinator, CARE Emergency Group (CEG). Artikel ini ditulisnya sendiri dan bukan mewakili pendapat CARE maupun para mitranya. Email: HYPERLINK “mailto:voelz@careinternational.org” voelz@careinternational.org

1.HYPERLINK “http://www.humanitarianinfo.org/sumatra” www.humanitarianinfo.org/sumatra

2.HYPERLINK “http://www.icva.ch” www.icva.ch
HYPERLINK “http://www.humanitarianinfo.org/srilanka/infocentre/reference/docs/Care_Evaluation.pdf” www.humanitarianinfo.org/srilanka/infocentre/reference/docs/Care_Evaluation.pdf These INGOs – with Save the Children, the International Rescue Committee dan Mercy Corps – juga bekerjasama dalam Emergency Capacity Building project yang bertujuan untuk: meningkatkan efektivitas sumber daya, pengembangan dan pemeliharaan kualitas staff; meningkatkan akuntabilitas organisasi; meningkatkan penilaian terhadap dampak yang timbul; meningkatkan kapasitas untuk pengurangan resiko dan tanggap darurat; serta meningkatkan kapasitas ICT.

Kekhawatiran tentang perlindungan pasca-tsunami di Aceh

by Marion Couldrey and Tim Morris

“The Guiding Principles on Internal Displacement” dengan jelas menyebutkan bahwa mereka yang terpaksa menyelamatkan diri akibat bencana alam disebut sebagai IDP. Akan tetapi, sejumlah lembaga pasca-tsunami di Aceh merasa enggan untuk menggunakan istilah tersebut mau pun untuk menangani isu-isu mengenai perlindungan.

Dalam beberapa tahun terakhir terjemahan mengenai Prinsip-prinsip ini dalam Bahasa Indonesia telah beredar luas di kalangan pejabat pemerintah dan komunitas yang dilanda konflik. Proyek IDP Global dari The Norwegian Refugee Council, Brookings-Bern Project untuk Internal Displacement dan UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) telah bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah Indonesia dan organisasi sosial kemasyarakatan di berbagai lokasi di seluruh kepulauan Indonesia untuk mensosialisasikan Prinsip-prinsip dari Pedoman tersebut.

Dengan demikian cukup mengejutkan bila berbagai perwakilan yang hadir dalam rapat koordinasi pasca tsunami yang diadakan oleh OCHA di Banda Aceh sering menggunakan istilah ‘tuna wisma’ atau ‘orang-orang yang kehilangan rumahnya akibat tsunami’ daripada menggunakan istilah IDP.

The Norwegian Refugee Council (NRC) kemudian mengakui bahwa tsunami telah terjadi dalam konteks yang sarat dengan unsur politis. Karena konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan gerakan separatis GAM, provinsi Aceh tertutup bagi komunitas internasional. Kedatangan lembaga-lembaga internasional hanya dapat terlaksana karena adanya amanat untuk merespons pemenuhan kebutuhan kemanusiaan akibat tsunami. Sejarah Indonesia mengenai pengungsian internal (internal displacement) merupakan sesuatu yang berhubungan dengan operasi kemanusiaan yang tidak disadari oleh sebagian besar komunitas internasional maupun oleh pejabat lokal.

NRC adalah bagian dari Konsorsium untuk Bantuan dan Pemulihan Pembangunan di Indonesia (CARDI), yang merupakan koalisi Danish Refugee Council dari Denmark, Norwegian Refugee Council dari Norwegia, International Rescue Committee dan Stichting Vluchteling. NRC-CARDI menunjukkan keprihatinannya mengenai konsekuensi terhadap pengabaian status IDP dan ancaman diskriminasi antara kebutuhan pengungsi Aceh akibat konflik dengan pengungsi korban tsunami. NRC meny-

impulkan bahwa perlunya pengetahuan yang lebih dalam tentang perlindungan bagi para IDP pasca-tsunami, termasuk hak-hak resmi mereka dan kewajiban berbagai pihak untuk menjalankannya. Para aktor kemanusiaan, termasuk IDP itu sendiri, membutuhkan wadah untuk mendiskusikan mengenai isu-isu yang berhubungan dengan perlindungan para IDP selama mengungsi dan pada saat pulang, berkumpul kembali, relokasi atau pemindahan tempat tinggal.

NRC dan Global IDP Project telah merencanakan untuk mengadakan dua workshop mengenai Prinsip-prinsip Pedoman (the Guiding Principles) ini, yang satu diadakan di Banda Aceh sedangkan yang satunya lagi diadakan di Meulaboh yang berada di pantai barat Sumatra. Ide tersebut langsung disambut baik oleh sebagian besar komunitas nasional maupun internasional. NRC ingin masyarakat yang terkait dengan kegiatan rekonstruksi provinsi ini turut serta bersamaan dengan datangnya pejabat pemerintah untuk tanggap darurat di Aceh pada akhir Maret. Tugas pengidentifikasian dan pembuatan undangan bagi para peserta, mencari co-presenter serta menyiapkan bahan-bahan training dengan keadaan Aceh seperti saat sekarang ini cukup memakan waktu. Daftar peserta telah disiapkan, termasuk gabungan antara pejabat pusat dan provinsi, PBB, para donor, LSM Internasional dan LSM dari organisasi sosial kemasyarakatan serta para perwakilan IDP. Menteri Ke-

sejahteraan Rakyat Indonesia menunjukkan minat positifnya terhadap workshop tersebut serta setuju untuk melakukan presentasi, dan UN-OCHA setuju untuk membantu pengumpulan data yang dibagi berdasarkan gender, umur dan lokasi.

Sayangnya, NRC mendapat kabar bahwa mereka tidak diizinkan untuk mengadakan workshop tersebut karena adanya peraturan baru yang mewajibkan seluruh pemberi bantuan kemanusiaan asing untuk mengorganisir berbagai kegiatan bersama-sama dengan institusi pemerintah. Dengan demikian, masih terbuka kesempatan untuk mengadakan workshop pada tahap selanjutnya, bersama-sama dengan lembaga pemerintah terkait dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan harapan, ini akan menjadi wadah untuk membahas isu-isu yang dianggap penting. Kerjasama antara komunitas internasional dengan pemerintah daerah cukup penting untuk mencari solusi jangka panjang dalam pemberian perlindungan dan bantuan bagi para IDP di Aceh.

Para Editor FMR sangat berterima kasih atas masukan yang diberikan oleh Astrid Sofie Arne, mantan NRC Project Manager, Protection, di Banda Aceh. Email: HYPERLINK "mailto:astrid.arne@freewave.cc" astrid.arne@freewave.cc

1. [HYPERLINK](http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wViewCountries/4B444626C28A1BBBC1256D10003463C9) "http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wViewCountries/4B444626C28A1BBBC1256D10003463C9" www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wViewCountries/4B444626C28A1BBBC1256D10003463C9
Terjemahan the Guiding Principles dalam Bahasa Indonesia ada di: [HYPERLINK](http://www.brookings.edu/fp/projects/idp/resources/GPIndonesian.pdf) "http://www.brookings.edu/fp/projects/idp/resources/GPIndonesian.pdf" www.brookings.edu/fp/projects/idp/resources/GPIndonesian.pdf

Amakeshiftschool
in IDP camp in
Banda Aceh.



Korban yang tak berdaya atau korban selamat yang kuat

oleh Ingvild Solvang

Lembaga-lembaga kemanusiaan harus dapat mengimbangi kemampuan seseorang untuk menolong dirinya sendiri dengan pengiriman bantuan yang sesuai.

Seminggu setelah tsunami, seorang relawan dari Eropa telah mengunjungi kantor Jesuit Refugee Service di Banda Aceh. Ia sedang melaksanakan misi penilaian (assessment) pertamanya terhadap komunitas IDP dan ingin berbagi dengan kita tentang kesimpulan yang diperoleh dari kunjungannya tersebut. Pertemuan dengan masyarakat yang telah kehilangan harta bendanya, sahabat dan keluarga sangat berkesan baginya. Ia mengistilahkan mereka sebagai 'golongan miskin' dan ketika mereka menceritakan bagaimana mereka harus membeli kompor untuk memasak di dapur umum, ia mengungkapkan ketidakpercayaannya bahwa mereka sanggup melakukan hal itu.

Para pengungsi di tempat penampungan sementara tampak miskin tetapi para pekerja kemanusiaan yang menganggap bahwa para pengungsi tersebut tidak memiliki sumber daya apapun untuk menolong diri mereka sendiri menunjukkan sikap yang kurang menghargai mereka. Hal ini tertangkap oleh saya beberapa hari kemudian ketika saya datang ke sebuah gedung sekolah yang ditempati oleh para pengungsi. Di pintu masuknya terdapat setumpuk pakaian. Seorang laki-laki mengambil beberapa potong pakaian dan menunjukkannya kepada saya. "Kami malu memakai pakaian ini," katanya. Saya melihat pakaian yang sudah koyak dan kotor itu lebih dekat lagi. "Meskipun kami berada dalam situasi seperti sekarang ini", lanjut laki-laki itu, "tetapi kami masih mempunyai harga diri". Kesalahan ini banyak dilakukan oleh para donor individual sebagai lembaga yang mengirimkan pakaian tersebut ke Aceh, yang lebih mempertimbangkan kuantitas daripada kualitas, serta tanpa mempertim-

bankan sumber-sumber logistik lainnya yang masih langka. Lembaga-lembaga tersebut telah mengabaikan kenyataan bahwa banyak IDP yang lebih senang membeli kompor sendiri untuk memasak – dan membeli makanan biasa yang ada di pasar-pasar – daripada harus memakan mie instan kemasan yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya.

Ajag para korban dan pahlawan

Rakyat Aceh telah terkesan oleh respons dunia atas bencana yang dialaminya. Pada waktu yang sama, sebagian mereka juga merasa sedih karena tsunami kini telah menghancurkan daerah mereka yang terkenal dengan keindahannya. Masa-masa setelah gelombang raksasa itu menghancurkan semua yang dilaluinya telah membuat Indonesia dan negara-negara lainnya turut serta menggalang dana. Berbagai sumbangan pun mengalir yang dipicu oleh pemandangan tentang keadaan para korban yang telah kehilangan harta bendanya, keadaan para anak yatim, cerita para ibu yang bayi-bayinya terlepas dari gendongannya, serta para ayah yang putus asa dengan membawa foto anak-anaknya yang hilang. Rakyat Aceh telah menjadi korban – dan para kameramen asing serta para pekerja kemanusiaan hadir sebagai pahlawan. Media-media asing dapat lebih mudah berbicara dengan sesama orang asing lainnya daripada mengidentifikasi para juru bicara lokal. Mungkin hal inilah yang menjadi alasan mengapa Thailand mendapatkan perhatian paling besar dari negara-negara Barat; karena memang banyak turis Asing yang dapat menceritakan kisahnya, lagi lagi dengan mengorbankan suara masyarakat lokal yang menimbulkan keprihatinan.

Pemikiran bahwa seseorang tidak mampu menolong dirinya sendiri membuat orang berkesimpulan bahwa seseorang memerlukan bantuan dari luar tetapi ter-

kadang bantuan luar tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan yang sebenarnya. Misalnya, banyak orang di luar Aceh menganggap bahwa anak-anak yang telah kehilangan sanak keluarga yang memberikan kasih sayang kepadanya harus dimasukkan ke panti-panti asuhan atau diadopsi ke Jawa atau ke luar daerah. Di Aceh, hal ini bukanlah hal yang lazim dan dapat menimbulkan kemarahan karena masyarakat Aceh ingin agar anak-anak mereka tetap berada dalam perawatan komunitas lokal daripada harus dibawa keluar Aceh.

Rakyat Aceh dikenal dengan karakternya yang kuat dan memiliki harga diri yang tinggi. Secara umum, mereka merasa malu untuk mengakui bahwa mereka memerlukan bantuan dengan alasan itulah maka lembaga-lembaga kemanusiaan tidak selamanya dapat diterima dengan baik dengan tangan terbuka. Konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade antara pasukan pemerintah dengan kelompok separatis GAM telah membuat kebanyakan masyarakat lokal tidak percaya lagi pada orang-orang yang datang dari luar dan tanpa menyadari mereka telah diajarkan untuk menjadi percaya diri. Akan tetapi, kebutuhan di Aceh kini sangat luas yang perkembangannya dapat dilihat dengan jelas, dan rakyat Aceh mulai tidak sabar menunggu realisasi pelaksanaan rekonstruksi.

Sementara itu, banyak orang kembali ke tempat tinggalnya semula, member-sihkan puing-puing tanpa bantuan dari pemerintah atau komunitas kemanusiaan lainnya. Banyak pula pengungsi di tempat-tempat penampungan sementara yang memutuskan untuk membangun kembali rumah-rumah mereka. Di desa Lhoh dan Lampuyang di Pulau Pulo Aceh, kaum pria bergantian untuk mempersiapkan pulau tersebut demi menyambut kepulangan warganya.

Dalam tempo satu bulan setelah tsunami, kamp-kamp dari tenda mulai didirikan dan pendirian meunasah, yang merupakan tempat untuk ibadah maupun tempat pelaksanaan pertemuan masyarakat juga mulai dibangun kembali. Dari pusat bangunan inilah desa-desa dapat dibangun kembali. "Kami tidak akan menunggu bantuan dari pemerintah. Kami akan kembali sendiri bila kami mau." Lembaga-lembaga kemanusiaan perlu mendukung upaya-upaya tersebut, dengan mengakui – dan mempelajari – kapasitas masyarakat lokal.

Ingvild Solvang adalah Manajer Advokasi Jesuit Refugee Service Indonesia. Email: [HYPERLINK "mailto:solvang@jrs.or.id" solvang@jrs.or.id](mailto:solvang@jrs.or.id). JRS Indonesia website: [HYPERLINK "http://www.jrs.or.id" www.jrs.or.id](http://www.jrs.or.id)

Business at the Meulaboh fish market, west coast of Sumatra, is slowly recovering after the tsunami.



Konflik antar etnis dan bencana tsunami di Sri Lanka

oleh Jayadeva Uyangoda

Pembangunan pasca tsunami di Sri Lanka telah meningkatkan krisis politik negara tersebut karena Pemerintah dan Kelompok Pembebasan Macan Tamil Elam (LTTE) berupaya mencari kerangka kerjasama untuk mendapatkan dan memanfaatkan bantuan internasional. Di negara yang secara de facto memiliki dua struktur kenegaraan ini, apakah mungkin untuk mewujudkan suatu kerangka pemulihan konflik dan perdamaian yang begitu sensitif?

Sejak disepakatinya perjanjian gencatan senjata pada bulan Pebruari 2002, perjuangan panjang LTTE untuk membentuk negara etnis Tamil di provinsi bagian Utara dan Timur Sri Lanka sudah berubah menjadi kedamaian yang tidak pasti. Besarnya dampak kerusakan akibat tsunami dapat merubah resiko yang menonjolkan ketegangan antara pasukan pemerintah dengan kader LTTE dan dapat kembali memicu peperangan. Dalam selang waktu dua puluh menit sekitar 35.000 orang tewas – hampir setara dengan angka kematian selama dua puluh tahun perang saudara. Tsunami menyapu kota, desa dan penduduk serta membuat hampir jutaan orang menjadi miskin dan kehilangan rumah.

Di saat pemerintah menganggap dirinya sendiri sebagai wakil negara yang tidak dapat diganggu gugat dan merupakan pemegang kendali utama dalam upaya pemulihan pasca-tsunami, LTTE justru mengklaim bahwa mereka adalah ‘satu-satunya wakil’ dari rakyat Tamil. Fakta bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan pantai yang berada di bawah pengawasan LTTE menderita hampir sama dengan mereka yang tinggal di kawasan yang berada di bawah pengawasan pemerintah telah ditambahkan dalam tuntutan LTTE yang menyatakan bahwa mereka juga harus diperlakukan sebagai mitra yang sejajar dalam proses rekonstruksi. Pemerintah Norwegia, yang menjadi fasilitator dalam perjanjian gencatan senjata dan perundingan damai, telah melakukan kerjasama dengan pemerintah dan LTTE untuk mencapai kesepakatan yang berkenaan dengan usulan bersama tentang prinsip-prinsip dasar, wewenang dan fungsi mekanisme pelaksanaan rekonstruksi. Namun belum ada kesepakatan yang berhasil dicapai.

Dengan dilatarbelakangi hal tersebut, bantuan internasional yang cukup banyak yang pernah dijanjikan sesaat setelah tsunami pun menjadi terlambat. Presiden Chandrika Kumaratunga pada akhir Maret lalu bahkan mengklaim bahwa tidak ada ‘lima sen’ pun dari dana resmi yang pernah dijanjikan itu diterima oleh pihak Bendahara. Pejabat Kementerian Luar Negeri dan Keuangan Sri Lanka telah menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menyalurkan dana yang mereka janjikan kedalam bentuk cek maupun tunai. Namun demikian, bagi para donor, pencairan dana tersebut tergantung pada kinerja pemerintah maupun LTTE

dalam penyusunan mekanisme bersama antar lembaga (joint institutional mechanism). Masyarakat internasional menganggap bahwa proses pemulihan Sri Lanka pasca-tsunami sangat terkait dengan kelanjutan negosiasi serta peluncuran kembali proses perdamaian.

Daerah yang mengalami kerusakan terparah adalah provinsi di bagian Utara dan Timur dimana perang sipil telah terkonsentrasi di sini selama dua dekade dan sebagian besar IDP tinggal di kamp-kamp sambil menunggu pemindahan atau relokasi. Provinsi bagian Timur cukup khas dimana di wilayah ini terdapat warga Sinhala, Tamil dan Muslim yang hampir sama jumlahnya. Selain komposisi etniknya yang beragam, LTTE juga mengklaim provinsi tersebut sebagai ‘tanah air warisan nenek moyang Tamil’. Tsunami menimbulkan kerusakan yang cukup parah di daerah pantai yang berada di zona kekuasaan LTTE, selanjutnya disebut ‘wilayah yang belum dibersihkan’ dimana pemerintah Sri Lanka tidak memiliki akses ke sana.

Sebelum tsunami, upaya-upaya telah dilakukan berkenaan dengan kerangka kerjasama yang tidak mudah antara pemerintah Sri Lanka, LTTE dan masyarakat internasional untuk memban- gun kembali provinsi-provinsi yang telah tercabik-cabik oleh peperangan tersebut. Ketidakmampuan pemerintah dan LTTE dalam menyusun suatu kerangka institusional, membuat upaya-upaya ini menjadi kurang berhasil. LTTE mengusulkan suatu mekanisme agar dapat menerima bantuan internasional langsung dari pemerintah asing dan para donor internasional – namun hal ini dianggap pemerintah sebagai suatu langkah yang merupakan upaya untuk menjegal kewenangan pemerintah pusat serta menciptakan separatisme dengan berbagai dalih.

Beberapa minggu setelah tsunami terdapat banyak sekali spekulasi – yang dipicu oleh rumor tentang laporan kematian pemimpin tertinggi LTTE, Vellupillai Prabhakaran, dan kerusakan pangkalan laut LTTE Sea Tiger yang cukup hebat – dimana musibah ini telah merubah kesepakatan strategis antar kedua belah pihak menjadi lebih baik. Spekulasi tersebut telah membantu membentuk kerangka kerjasama antara pemerintah-LTTE. Dorongan untuk membina kerjasama semakin kuat dengan adanya laporan bahwa pasukan Sri Lanka dan kader LTTE telah secara

spontan ikut serta bersama-sama secara sukarela untuk saling membantu memberikan pertolongan dan bantuan di provinsi bagian Utara dan Timur. Tantangan bagi kedua belah pihak adalah bagaimana caranya agar dapat mentransformasikan kolaborasi lapangan ini kedalam kerangka kerjasama yang formal.

Dengan membentuk suatu struktur terpusat untuk proses pelaksanaan pasca-tsunami, pemerintah justru telah mengabaikan lembaga-lembaga pemerintahan lokal. Tsunami telah menggarisbawahi tentang perumusan keinginan para elit birokrat-politik negara tersebut serta menyoroiti ketidakmampuan struktur terpusat untuk segera memberikan bantuan bagi para korban. Birokrasi di Colombo telah melihat pula bahwa desentralisasi kekuasaan kepada dewan provinsi hanya akan mengurangi kekuasaan dan wewenangnya, maka dengan cara ini mereka dapat membendung kekuatan dewan provinsi.

Kesalahan kebijakan lebih lanjut telah memicu kemarahan kaum Muslim. Komunitas Muslim di provinsi bagian Timur menderita cukup banyak kerugian tetapi bantuan pemerintah sangat minim. Hal ini disebabkan oleh inefisiensi perangkat negara serta lemahnya kepemimpinan politik komunitas Muslim yang terpecah-pecah. Masyarakat Muslim mulai mengartikan kelambanan pemerintah sebagai suatu diskriminasi yang dilakukan secara sengaja terhadap komunitas Muslim. Kenyataan bahwa lembaga pemerintah telah memberikan bantuan untuk komunitas Sinhala dan lembaga-lembaga bantuan LTTE telah bekerja khususnya bagi komunitas Tamil, serta kealpaan untuk melibatkan para pemimpin politik Muslim dalam proses negosiasi untuk menyusun mekanisme bersama antara pemerintah-LTTE, telah membuat komunitas Muslim semakin merasa diabaikan.

Pemerintah dan LTTE kedua-duanya memiliki komitmen pada pengambilan keputusan dan intervensi kemanusiaan di atas. Pendekatan sentralistik-negara ini memandang rakyat sebagai penerima bantuan kemanusiaan (resepien) pasif. Hal ini terbukti ketika pemerintah dan LTTE memutuskan, tanpa melakukan konsultasi dengan masyarakat yang menjadi korban, untuk melarang pembangunan rumah kembali di kawasan pantai yang menjadi zona buffer. Pemerintah mengumumkan zona buffer ini sejauh 100 meter, sedangkan LTTE mengambil suatu langkah yang memberlakukan zona larangan sejauh 300 meter. Meskipun bertujuan baik, namun kebijakan tentang zona buffer tersebut menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran di tengah-tengah



masyarakat yang telah kehilangan harta kekayaan serta sumber penghidupannya. Dengan demikian cukup jelas bahwa baik pemerintah Sri Lanka maupun kelompok politik daerah dari komunitas Tamil memiliki konsep, mekanisme atau struktur untuk konsultasi umum dalam kebijakan pengambilan keputusan.

Respons masyarakat sipil menunjukkan ketidakmampuan pemerintah

LTTE merespons keadaan darurat ini secara militer dengan mengerahkan kader-kadernya untuk membantu bagian kemanusiaan Tamil Rehabilitation Organisation (TRO), namun respons dari pemerintah tidak efisien dan lamban. Disaat perangkat administratif pemerintah hampir tidak berfungsi sama sekali, justru warga masyarakat perorangan, kelompok-kelompok masyarakat dan LSM yang bekerja keras selama terjadinya bencana, menyalurkan bantuan makanan, pakaian dan tempat tinggal bagi mereka yang selamat dan melakukan operasi penyelamatan, pembersihan sampah, melakukan pencarian korban yang selamat serta yang tewas bahkan menggalang bantuan sumbangan sendiri dari masyarakat internasional. Di provinsi bagian Barat dan Selatan, dimana pemerintah harus merespons langsung dan segera memenuhi kebutuhan para korban, aparat pemerintah dalam sebagian besar hal membutuhkan waktu lima hingga tujuh hari untuk dapat mencapai komunitas yang menjadi korban. Pejabat daerah, ketika diwawancarai menyatakan bahwa mereka sangat enggan untuk mengambil inisiatif sendiri, karena takut jika membuat kesalahan yang dapat memicu kemarahan pemerintah pusat.

Pengambilan keputusan dari masyarakat sipil memiliki unsur fleksibilitas yang cukup kuat yang

tidak dimiliki oleh sektor pemerintah. LSM-LSM dapat menyebarkan staff dan relawan dalam hitungan jam tanpa terganggu oleh aturan-aturan birokratik seperti halnya sektor pemerintah. Mereka juga dapat dengan mudah mengetuk kerelaan dan kedermawanan pribadi. Akan tetapi, fleksibilitas ini menimbulkan kritikan terhadap LSM-LSM baik dari pemerintah maupun media yang menganggap tindakan individual dan LSM tersebut justru mengarah kepada korupsi serta intervensi yang tidak terkoordinir dan tidak terencana. Mereka bahkan menduga keras bahwa program sosial kemasyarakatan tersebut dapat membahayakan keamanan nasional karena adanya kecurigaan bahwa LTTE dapat mengangkut peralatan militer dan peralatan perangnya dengan berkedok barang bantuan.

Respons terhadap bencana tsunami dan kelanjutan dari proses perdamaian saling berkaitan erat. Respons yang efektif dan berkelanjutan terhadap bencana tsunami memerlukan suatu konsensus yang memisahkan serta mereformasi antara politik dan etnis untuk mewujudkan federalisme maupun desentralisasi.

Tanpa reformasi untuk memastikan adanya partisipasi masyarakat dalam proses rekonstruksi, dapat memicu pertentangan secara luas terhadap 'rekonstruksi di atas'. Komunitas yang menjadi korban mulai memprotes ketidakefektifan para pejabat dan birokratik dalam penyaluran bantuan. Pelaksanaan rekonstruksi pasca-tsunami tidak hanya menyangkut konstruksi bangunan, jalan dan infrastruktur ekonomi. Namun juga melibatkan kegiatan pembangunan kembali masyarakat, kehidupan dan mata pencaharian masyarakat bagi hampir satu juta orang yang tiba-tiba jatuh miskin. Jika masyarakat tidak berpartisipasi secara aktif, maka proses pembangunan kembali tersebut menjadi tidak demokratis

sama sekali.

Untuk membuka penghalang antara pemerintah dan LTTE, kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan telah mengusulkan suatu kerangka kerjasama antara pemerintah dan LTTE dengan tajuk 'sensitivitas konflik dan perdamaian'. Mereka telah menyoroti tentang perlunya kombinasi antara rekonstruksi 'pasca-konflik' dengan pembangunan kembali melalui pemulihan dan pembangunan kembali 'pasca-tsunami'. Hal ini memerlukan suatu kerangka formal yang harus dirundingkan antar kedua belah pihak, karena perjanjian gencatan senjata - yang merupakan satu-satunya perjanjian resmi yang mengatur mengenai hubungan militer antar kedua belah pihak - tidaklah cukup untuk menjadi dasar maupun jalan bagi kerjasama ini.

Kelompok masyarakat sipil mendesak agar rekonstruksi serta rekonsiliasi pasca-konflik harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- n Tsunami jangan hanya semata-mata dipandang sebagai bencana alam: tetapi respons bantuan dan rekonstruksi juga harus mempertimbangkan konflik etnis dan proses perdamaian..
- n Seluruh komunitas - Sinhala, Tamil dan Muslim - harus diperlakukan secara adil dan partisipasinya juga harus didukung.
- n Mengingat banyaknya kerusakan dan kematian, provinsi di bagian Utara dan Timur harus mendapatkan prioritas bantuan..
- n Pemerintah dan masyarakat internasional tidak boleh mengabaikan peranan LTTE dalam proses pasca-tsunami tetapi justru membina hubungan kemitraan.

Pemerintah dan LTTE harus memanfaatkan momen pasca-tsunami ini untuk memulai suatu proses perjanjian politik yang baru. Pencapaian kesepakatan resmi mengenai perjanjian kemanusiaan yang berkenaan dengan gencatan senjata, merupakan hal yang sangat vital.

Jayadeva Uyangoda adalah Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Kebijakan Publik di Universitas Colombo, editor Polity dan Ketua Persatuan Ilmuwan Sosial Sri Lanka. Email: [HYPERLINK "mailto:uyangoda@cmb.ac.lk"](mailto:uyangoda@cmb.ac.lk) uyangoda@cmb.ac.lk. Ini adalah artikel dengan versi yang lebih singkat dari bagian artikel yang lebih lengkap dan online di: [HYPERLINK "http://www.fmreview.org/pdf/uyangoda.pdf"](http://www.fmreview.org/pdf/uyangoda.pdf) www.fmreview.org/pdf/uyangoda.pdf

Throughout war-torn Sri Lanka, the tsunami washed loose land mines that had been planted around government military bases and other areas.

REFLEKSI KEGIATAN PSIKOSOSIAL PASCA-TSUNAMI

oleh Ananda Galappatti

Di Sri Lanka, intervensi psikososial menjadi prioritas untuk tanggap darurat yang sebagian besar muncul dari kekhawatiran media dan lembaga-lembaga bantuan internasional. Intervensi tersebut dilancarkan cukup cepat tetapi kurang koordinasi dan pelajaran yang diambil dari konflik pra-tsunami yang

FSelama dua minggu pertama setelah tsunami melanda, lembaga-lembaga kemanusiaan, pemerintah Sri Lanka, Gerakan Pembebasan Macan Tamil Eelam (LTTE), tim tanggap darurat lokal maupun internasional serta publik di bagian timur kota Batticaloa memfokuskan pada penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal dan pelayanan penyembuhan medis. Kebutuhan akan penanganan ‘trauma’ orang dewasa dan anak-anak yang telah mengalami hal mengerikan serta kehilangan harta benda yang luar biasa diungkap oleh reporter internasional yang mewawancarai para pekerja lokal yang berhubungan dengan kesehatan mental.

Terdapat opini yang berbeda-beda mengenai intervensi psikososial yang paling cocok. LSM lokal (terutama yang sebelumnya kurang terlibat dalam program psikososial) serta kelompok-kelompok terkait lainnya dari daerah lain di Sri Lanka dengan tekun memberikan konseling bagi mereka yang selamat dari tsunami. Selain beberapa orang konselor yang telah bekerja secara lokal, layanan ini juga diberikan oleh para relawan yang dilatih hanya selama beberapa hari, atau oleh tim yang berasal dari pulau-pulau lainnya. Terdapat banyak cerita yang mengungkapkan tentang pengalaman dan perasaan mereka sebagai ‘konselor’ (meskipun hanya dengan dibekali pelatihan yang terbatas) yang secara emosional dapat bermanfaat bagi mereka yang telah kehilangan keluarga, rumah dan pekerjaan serta mereka yang tinggal di tempat-tempat penampungan sementara.

Dari sudut pandang tersebut, tim kecil yang terdiri dari para ‘konselor’ pun disebarkan ke tempat-tempat penampungan dalam tempo dua minggu sejak terjadinya bencana untuk melakukan pembicaraan dengan para pengungsi. Dengan kondisi tempat penampungan yang tidak stabil (jumlah penghuni

yang tidak tetap, minimnya pengaturan dan pembagian barang bantuan, ancaman kekurangan dan keramaian yang berlebihan), para ‘konselor’ tersebut melaporkan bahwa session pekerjaan mereka seringkali melibatkan kelompok-kelompok yang sangat antusias ingin menceritakan kisah-kisahannya. Session tersebut juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan bantuan lanjutan yang lebih mendalam. Pengalaman ini sering membuat ‘para konselor’ tersebut merasa kewalahan dan frustrasi.

Pendekatan sebaliknya justru disarankan oleh organisasi-organisasi maupun individu yang telah melakukan intervensi psikososial di wilayah ini dalam konteks konflik bersenjata yang telah berlangsung selama beberapa tahun sebelum terjadinya tsunami. Perspektif ini memprioritaskan pada kebutuhan sosial dan material bagi para korban sebagai bentuk bantuan utama selama masa-masa darurat setelah bencana. Berbagai upaya ‘konseling’ juga dilakukan bagi korban selamat yang sedikit rendah diri pada saat awal-awal intervensi, namun demikian mereka mau ikut mendengarkan dan cukup ‘bersahabat’ jika ada yang memulai pembicaraan tentang pengalaman atau kesulitan yang mereka hadapi. Pemandangan ini didapat dari pengalaman-pengalaman pemberian layanan di daerah, serta berdasarkan panduan nasional dan internasional.

Karakteristik dari pendekatan ini adalah kurang melibatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat ‘terapi’. Misalnya, lembaga-lembaga yang pekerjaannya berhubungan dengan anak-anak terlanjar berusaha untuk menyatukan kembali anak-anak tersebut dengan anggota keluarganya atau orang tua asuh. Beberapa lembaga diantaranya juga ikut menangani keluhan para wanita

mengenai godaan seksual di kamp-kamp dengan melakukan pengaturan ruang yang aman bagi para wanita untuk tidur atau mandi di lokasi kamp tersebut. Pejabat pemerintah mendesak agar dikeluarkannya informasi tertulis yang jelas mengenai mekanisme penerimaan bantuan, kompensasi, rumah dan isu-isu lainnya yang membuat para pengungsi merasa khawatir dan serba tidak pasti. Sebagian besar intervensi yang dilakukan untuk anak-anak berorientasi pada penyediaan struktur kehidupan mereka sehari-hari dengan membantu mereka secara materi untuk kembali bersekolah, atau dengan menawarkan fasilitas bermain.

Perlunya koordinasi

Seiring dengan semakin meluasnya respons kemanusiaan dari sektor psikososial di Batticaloa, para donor mendesak lembaga-lembaga tersebut untuk meningkatkan intervensi mereka serta para pemain baru lainnya untuk terjun ke lapangan. Berbagai konflik dan pertentangan muncul ketika

Hard-learned lessons from around Sri Lanka have been ignored.

berbagai organisasi pelaksana mulai melakukan perjalanan untuk bekerja dengan kelompok masyarakat tertentu – misalnya, berupaya untuk membuat permainan dengan anak-anak di kamp dimana organisasi lainnya juga telah pernah melaksanakan pekerjaan serupa. Para pelatih dan petugas pendukung yang melakukan kunjungan dari Colombo atau luar negeri tidak memiliki informasi yang memadai tentang kondisi setempat, kapasitas maupun kebutuhannya.

Perbedaan pendekatan teoritis dan praktek terhadap pekerjaan yang berkaitan dengan psikososial baik secara global maupun di Sri Lanka memunculkan suatu tantangan pada pembangunan sektor psikososial terpadu di Batticaloa. Perdebatan yang menjadi polemik di lapangan, baik secara lokal maupun global, telah mempersulit upaya untuk mengkomodir berbagai perspektif dan metodologi dalam satu kerangka kerja. Namun demikian di wilayah Batticaloa, menunjukkan bahwa pengembangan



setara dengan kerugian serta kesulitan yang dialami selama terjadinya konflik yang berkepanjangan. Mungkin sesuatu yang berguna dapat diambil dari pengujian efektivitas respons programatik dan peninjauan masyarakat pribumi yang terakhir kalinya.

Ungkapan 'semakin terburu-buru, semakin lamban' tampaknya sangat relevan dalam hal penyediaan layanan dengan kualitas memadai yang harus dialami oleh masyarakat yang menjadi korban tsunami. Komitmen eksternal merupakan hal penting untuk mencegah kemarahan para korban tsunami serta dipandu dengan kesadaran akan perlunya lembaga-lembaga untuk menyusun rencana dan melakukan koordinasi satu sama lain dalam rangka pelaksanaan intervensi secara

A woman and her two sons light candles at the grave site of the boys' sister and grandmother who died in the tsunami, Piyadegamavillage, near Hikkaduwa.

pendekatan tersebut dianggap penting bila koalisi antar pelaku psikososial secara luas diperkuat, daripada harus terpecah-pecah. Saat ini, kerangka kerja konseptual yang diluncurkan oleh Kelompok Kerja Psikososial sedang diterapkan. Berbagai upaya dilakukan untuk menghindari penekanan dikotomi antara pendekatan pembangunan masyarakat dengan kesehatan mental dalam pemberian layanan – yang telah seringkali menjadi suatu tendensi baik secara lokal maupun global. Dengan kurangnya sumber-sumber daya lokal khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi yang benar-benar sulit atau krisis, secara praktiknya dirasa perlu untuk memobilisasi dan memperkuat seluruh layanan yang ada.

Contoh-contoh intervensi psikososial yang ada di daerah saat ini antara lain pengalaman naratif dari para relawan, session konseling bagi para klien secara individual, intervensi psikiatrik untuk gangguan mental, pembentukan tea groups bagi orang tua, diskusi-diskusi mengenai kekhawatiran akan tsunami, pemberian informasi praktis serta kunjungan ke rumah-rumah mereka yang kehilangan keluarganya. Disamping mengatur masalah pengasuhan anak-anak terlantar bersama keluarga yang menjadi pilihan mereka, ada pula kegiatan bermain reguler bagi anak-anak di kamp tersebut serta berbagai upaya konsultasi bagi kaum wanita dan anak-anak dalam hal pemanfaatan fasilitas air dan sanitasi untuk mengurangi resiko dan ketakutan akan ancaman seksual atau pemerkosaan. Banyak training yang ditawarkan kepada para guru, tenaga kesehatan, petugas dan relawan yang bekerja di bidang kemasyarakatan, meskipun han-

ya sedikit diantaranya yang sistematis atau berkelanjutan. Mutu dan efektivitas layanan bantuan maupun kegiatan pelatihan tersebut bervariasi. Akan tetapi, kenyataan bahwa penyediaan layanan psikososial dari luar hanya dengan pengaturan sendiri, tampaknya kurang mengikat secara konstruktif bagi mereka yang mulai bekerja di daerah tersebut.

Pendekatan profesional dan tradisional untuk pemulihan dan penyembuhan terkadang tidak sesuai. Terdapat kekhawatiran menyangkut hubungan pendekatan yang secara keseluruhan memiliki perbedaan nilai dan kerangka kerja. Ketegangan antara keharusan intervensi profesional dan komitmen terhadap perspektif masyarakat/penduduk pribumi, mulai dapat terselesaikan sejak terjadinya bencana tsunami ini.

Pelajaran berharga dari sekitar Sri Lanka mengenai tantangan pembinaan dan pemeliharaan kualitas layanan psikososial serta pengidentifikasian contoh-contoh intervensi berkelanjutan yang berhubungan dengan sosiokultural yang baik telah terabaikan. Tekanan pendanaan, masuknya orang-orang yang hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang program psikososial di Sri Lanka, organisasi lokal tanpa dokumen lengkap atau catatan kelembagaan serta kurangnya komitmen untuk memberikan pelayanan psikososial antar lintas-budaya telah menyebabkan kealpaan ini.

Akan tetapi, bencana tsunami yang luar biasa telah menghambat realisasi dari berbagai kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat yang menjadi korban (kematian dalam jumlah besar, pengungsian yang terus berlanjut, kehilangan mata pencaharian, kekacauan peranan sosial atau anak-anak terlantar) yang

konsisten dan masuk akal bagi mereka yang memerlukan bantuan. Meskipun beberapa bulan telah berlalu setelah bencana, tampak bahwa usaha-usaha yang memerlukan pendekatan dengan waktu yang cukup lama (dan kesabaran) untuk intervensi telah memperoleh manfaat dari segi efektivitas dan keberlanjutan layanan mereka.

Ananda Galappatti adalah editor dari *Intervention and psychosocial advisor/coordinator of The Mangrove Psychosocial Support and Coordination Unit, Batticaloa, Sri Lanka* (HYPERLINK "<http://www.themangrove.blogspot.com>" www.themangrove.blogspot.com). Email: HYPERSLINK "<mailto:agalaps@eureka.lk>" agalaps@eureka.lk

Artikel ini dikutip dari *'Psychosocial work in the aftermath of the tsunami: challenges for service provision in Batticaloa, Eastern Sri Lanka'*, Ananda Galappatti, *Intervention*, Vol 3, No 1, pp65-69, 2005. *Intervention* adalah sebuah jurnal yang mengupas disseminasi pengetahuan tentang kesehatan mental, pekerjaan yang berhubungan dengan psikososial dan konseling di daerah-daerah yang mengalami konflik bersenjata. Hubungi: Guus van der Veer, Kepala Editor, *Intervention*, Tulpenburg 31, 1181 NK Amstelveen, The Netherlands. Fax: +31 20 647 4580. Email: HYPERSLINK "<mailto:intervention@wtfi.nl>" intervention@wtfi.nl

1. [HYPERSLINK "http://www.forcedmigration.org/psychosocial"](http://www.forcedmigration.org/psychosocial) www.forcedmigration.org/psychosocial

Kehidupan pasca-tsunami di Sri Lanka

oleh Simon Harris

Kehidupan di Sri Lanka tidak hanya semata-mata terganggu oleh kerusakan akibat tsunami tetapi juga oleh kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek dari pemerintah serta respons dari komunitas pemberi bantuan kemanusiaan pasca-bencana.

Kisah berikut menyajikan kumpulan pengalaman yang dialami oleh penulis yaitu para pengungsi dan relawan sekitar lima bulan setelah tsunami melanda. Mereka mengangkat beberapa isu kunci tentang kehidupan pasca-tsunami di Sri Lanka, khususnya dampak dari intervensi berbagai lembaga kemanusiaan yang kompetitif, industri rekonstruksi, zona pantai tanpa-bangunan serta tertundanya penerimaan bantuan kompensasi dari pemerintah.

Nelayan

Anda adalah seorang nelayan yang boat-nya rusak oleh tsunami. Mungkin ini memang usaha kecil yang hanya memberikan hasil pas-pasan: tidak cukup untuk membuat anda kaya, akan tetapi cukup untuk hidup sederhana. Pemerintah telah menawarkan untuk menggantikan boat anda tetapi anda telah menunggu selama berbulan-bulan dan tidak ada satupun yang terwujud. Akan tetapi, pasca tsunami berbagai lembaga bantuan kemanusiaan internasional pun berdatangan. Beberapa diantaranya menawarkan konsultasi dan partisipasi masyarakat serta ingin mengetahui bagaimana caranya agar kebutuhan anda dapat terpenuhi dengan baik, sementara yang lainnya kelihatan hanya ingin membagi-bagikan dananya secepat mungkin. Mereka ingin menawarkan anda pinjaman, hibah atau mungkin bagian dalam suatu kerjasama. Ada LSM yang ingin mengganti boat anda. Sementara yang lainnya juga menawarkan boat dengan mesin otomatis, sedangkan yang satunya lagi ingin menawarkan boat dengan mesin motor tempel (outboard). Itu hanyalah alternatif untuk menangkap ikan. Anda bisa saja dilatih kembali untuk menjadi seorang tukang kayu atau tukang batu, belajar mengoperasikan komputer atau mendirikan LSM lokal lain untuk berkompetisi dengan ratusan LSM lainnya yang menjamur sejak datangnya bantuan dana internasional. Apa yang akan anda lakukan? Boat anda rusak tetapi tidak begitu parah. Teman anda meminta boat lengkap dengan motornya. Mereka bisa menangkap ikan lebih jauh dan lebih banyak. Sebagian orang mengatakan bahwa laut telah menyediakan ikan dan boat-boat ini hanya

akan semakin mengurangi persediaan ikan di masa yang akan datang. Anda harus membangun kehidupan hari ini. Anda harus kompetitif.

Pedagang

Anda adalah seorang pedagang kecil sebelum tsunami. Tidak terlalu miskin tetapi cukup pas-pasan. Anda kehilangan rumah dan mereka tidak mengizinkan anda untuk membangunnya kembali karena tanah anda berada 100-meter dalam radius pantai yang telah diumumkan oleh pemerintah dalam beberapa hari setelah terjadinya bencana. Usaha anda jatuh bangkrut. Ini merupakan jenis usaha yang mengharuskan adanya persediaan kas di tangan dan anda harus berusaha keras mencari pinjaman untuk tambahan, dengan menggunakan harta benda sebagai jaminan. Kini rumah anda telah lenyap, bank juga telah menutup pinjaman anda. Anda tidak dapat menuntut kompensasi apapun karena surat-surat resmi yang anda miliki telah hilang dalam musibah tsunami dan membangun kembali milik pribadi merupakan proses yang cukup panjang dan sulit. Seperti orang lainnya yang anda ketahui, anda tidak memiliki asuransi. Meskipun anda sanggup membangun kembali sendiri, namun anda juga tidak akan bisa melakukannya karena sejak terjadinya tsunami harga-harga material lokal membumbung tinggi dan gaji para pekerja konstruksi juga telah naik hingga tiga kali lipat. Namun demikian, pemerintah mengatakan bahwa tanah tersebut tidak sepenuhnya milik anda karena Undang-Undang tentang Konservasi Pantai telah melarang pembangunan di areal tersebut sejak tahun 1981, meskipun mereka telah memutuskan untuk tidak memperlakukan dulu peraturan ini selama lebih dari 20 tahun. Kini anda tinggal di tenda yang ada di halaman sekolah bersama-sama dengan keluarga, serta menunggu dipindahkan ke tempat penampungan sementara yang berada beberapa kilometer yaitu di ujung sebuah rawa yang setiap harinya tergenang dengan air sumurnya yang asin. Kamp tersebut berada di dekat tempat tinggal sementara yang digunakan oleh mereka yang mengungsi akibat

konflik selama 15 tahun terakhir. Anda mendapatkan ransum makanan dan sedikit uang tiap bulannya dari bagian administrasi pemerintah daerah. Ini cukup untuk bertahan hidup. Jika anda pindah ke tempat lainnya anda bisa saja menggunakan pengetahuan pasar anda untuk memulai sesuatu yang baru. Tetapi jika anda pergi, anda akan sendirian – tidak ada bantuan pemerintah, atau apapun. Sebuah LSM lokal mengatakan bahwa mereka akan memulai rencananya untuk memberikan pinjaman atau hibah, dengan demikian masyarakat dapat memulai kembali usaha kecilnya tersebut. Besarnya dana tersebut adalah sekitar beberapa ribu rupee yang diperuntukkan bagi ternak kambing dan ayam. Anda akan memperoleh pendapatan harian sebesar 50,000 rupee (c\$500) dan dapat mempekerjakan lima orang tenaga.

Tenaga kerja dengan kemampuan-sedang

YAnda adalah seorang pekerja konstruksi dengan kemampuan sedang. Sebelum tsunami segalanya cenderung lebih sulit. Anda harus pergi ke kota untuk bekerja dan terkadang anda tidak dapat menemukan apapun. Sejak tsunami pembangunan gedung-gedung kian menjamur untuk tempat tinggal sementara maupun tempat penampungan sementara serta rumah-rumah permanen. Banyak sekolah baru yang akan dibangun, jalan-jalan yang harus diperbaiki dan jembatan-jembatan yang juga harus dibangun. Upah kian melonjak dan cukup banyak lahan pekerjaan yang tersedia. Tsunami membawa hikmah terbaik yang pernah anda rasakan. Meski terkadang anda heran terhadap apa yang akan terjadi setelah semua rumah terbangun? Bagaimana mungkin anda kembali dengan upah yang hanya 250 rupee per hari (\$2,50) setelah anda terbiasa mendapatkan 750 rupee untuk pekerjaan konstruksi tsunami? Dan apa dampak bagi pasar tenaga kerja lokal dengan adanya pelatihan keahlian bagi para tukang batu maupun tukang kayu yang diadakan oleh banyak LSM? Akankah industri rekonstruksi pasca-bencana dapat membangkitkan pembangunan jangka panjang atau akankah ini semua tiba-tiba hilang begitu saja ketika lembaga-lembaga pemberi bantuan kemanusiaan pulang ke negaranya masing-masing?

Banyaknya respons reaktif yang bersifat top-down, keputusan pemerintah untuk memperlakukan Undang-Undang Konservasi Pantai tahun 1981 yang



melarang dilakukannya pembangunan pada radius 100 meter dari garis tengah gelombang pasang, telah menghilangkan kesempatan ratusan pengungsi akibat tsunami untuk dapat membangun kembali rumahnya seperti sediakala. Meskipun kebijakan ini disampaikan dengan berbagai alasan ekologis yang cukup kuat (penanaman batang bakau dan pembuatan bukit-bukit pasir) serta berbagai alasan untuk mengantisipasi keadaan darurat (pengurangan resiko dengan membangun buffer zone fisik untuk menghadapi ancaman bahaya di masa yang akan datang), hubungan timbal balik yang muncul antara kepemilikan harta benda dengan penghidupan seringkali terabaikan. Keraguan tentang legalitas keberadaan daerah pantai dan masalah-masalah pengajuan tuntutan tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi, cara mendapatkan kompensasi dari pemerintah atas kehilangan harta benda menjadi suatu proses yang panjang dan kompleks serta berlarut-larut.

Komunitas nelayan merupakan salah satu sektor yang mengalami dampak tsunami terparah. Meskipun pemerintah telah berjanji untuk memulihkan kembali kehidupan bagi masyarakat nelayan, namun kurangnya kapasitas para birokrat pemerintah untuk menangani berbagai tuntutan ini telah mengakibatkan penundaan yang cukup serius terhadap kompensasi tersebut. Organisasi-organisasi pemberi bantuan kemanusiaan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal ini. Akan

tetapi, karena sangat besarnya bantuan dana yang diluncurkan oleh LSM lokal maupun LSM dari masyarakat internasional, maka hal ini menjadi sangat kompetitif. Dengan munculnya kasus boat penangkap ikan ini, organisasi-organisasi pemberi bantuan bersaing untuk dapat ambil bagian memberikan bantuan dengan menawarkan berbagai model usulan untuk mendapatkan modal usaha. Untuk jangka pendek, upaya-upaya tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka dimana komunitas nelayan tersebut dapat segera memulai usahanya kembali. Akan tetapi, hal tersebut dapat membawa implikasi buruk bagi keberlanjutan kehidupan mereka jangka panjang. Memberikan modal khusus (ad hoc assets) tanpa melibatkan konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam menganalisa dampak potensial pada hubungan lokal antara kapasitas pasar dan lingkungan dapat mengakibatkan turunnya stok ikan dengan cepat. Hal ini akan mengganggu kehidupan mereka untuk jangka panjang dan meningkatkan potensi ketegangan antar-warga di lingkungan yang memang telah mengalami konflik antar etnis.

Tentu saja ada pihak yang menang maupun yang kalah pasca-tsunami di Sri Lanka. Seperti halnya pada kasus tenaga kerja dengan kemampuan sedang, industri konstruksi mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Pasar-pasar baru juga muncul di sektor akomodasi dan transportasi untuk ratusan program dari lembaga-lembaga

bantuan kemanusiaan internasional. Sayangnya, kesempatan baru ini tak ubahnya bagaikan dua mata pedang, di satu sisi membawa kemakmuran bagi sebagian orang namun di sisi lain membuat orang lainnya sulit memperoleh barang dan jasa tersebut.

Kehidupan pasca-tsunami tidak terlepas dari kebijakan dan prosedur administrasi pemerintah, pergeseran kebutuhan tenaga kerja, prioritas dan permintaan pasar, serta banyaknya organisasi bantuan kemanusiaan internasional maupun lokal di daerah bencana. Perlunya tindakan yang harus segera diambil untuk menangani isu yang berkenaan dengan kehidupan secara tepat, logis, strategis dan wajar, menunjukkan bahwa kebijakan dan praktek-praktek tersebut tidak dapat dipisahkan dari partisipasi lokal, pengambilan keputusan dan perlindungan lingkungan, serta penurunan kerentanan terhadap bencana. Jika tidak, maka prospek kelangsungan hidup jangka panjang bagi mereka yang terkena dampak tsunami bisa saja menjadi lebih suram.

Simon Harris baru saja menyelesaikan studi pascasarjana nya di Refugee Studies Centre, Universitas Oxford serta Koordinator Tanggap Darurat Tsunami di Sri Lanka untuk lembaga Christian Aid. Email: [HYPERLINK "mailto:sharris@christian-aid.org"](mailto:sharris@christian-aid.org) sharris@christian-aid.org

Afishermaninspects hisnetatPointPedro, a village in the far north of Sri Lanka, near Jaffna.

Enam bulan: dalam ketakutan

oleh Lyndon Jeffels

Sejak tahun 1987 UNHCR telah memberikan perlindungan dan bantuan bagi para pengungsi akibat perang saudara yang telah berlangsung selama dua puluh tahun di Sri Lanka. UNHCR juga telah meningkatkan peranannya untuk membantu krisis kemanusiaan pasca-tsunami.

Saat itu jam menunjukkan pukul 9.30 pagi tanggal 26 Desember 2004 ketika Mary Theresa Rajeswaran mendengar suara yang dikiranya kendaraan militer yang mendekat. Sambil memasak di dapurnya, Mary mulai khawatir ketika mendengar teriakan dan jeritan bersamaan dengan suara gaduh di luar tadi. Dengan menggendong putrinya Nanthani, mereka pergi untuk melihat penyebab kegaduhan tersebut.

Di luar sana, orang beramai-ramai lari menjauh dari laut. Sesaat kemudian, Mary melihat gelombang setinggi lima belas kaki bergulung ke arahnya. Dengan berlindung di balik gedung yang ada di depan rumahnya, Mary meraih tangan Nanthani dan berlari ke arah pedalaman. Mengetahui dirinya tengah berada di ujung maut, Mary berusaha untuk menyelamatkan diri tetapi gelombang pertama telah menjebaknya, menghempas dirinya dan bocah Nanthani yang berumur dua tahun ke pagar kawat berduri. Dengan satu tangan berpegang pada pagar dan memegang putrinya di tangan yang satu lagi, Mary yang setengah sadar, hanya tahu bahwa gelombang tersebut telah surut kembali dengan cepat.

Dengan terluka dan lelah, Mary membaringkan Nanthani ke tempat yang aman

dan mulai mencari putranya yang berumur enam tahun. Akan tetapi, ketika ia baru berjalan menuju tempat dimana terakhir kalinya ia melihat putranya, gelombang kedua telah menghempaskannya kembali ke pagar kawat berduri itu. "Tubuh saya mati rasa," katanya, "Saya tidak bisa merasakan apapun kecuali kepedihan atas kehilangan putra saya." Setelah terseret-seret oleh gelombang selama hampir satu jam, Mary merasakan keganasan dan panasnya laut yang mengurungnya. Ia menggambar langit di atasnya bagaikan "gelap dan menyedihkan", dengan hujan lebat yang kemudian turun tanpa hentinya.

Setelah ditemukan oleh keluarganya kemudian, Mary menolak untuk dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. "Keselamatan putra saya adalah segalanya bagi saya. Saya tidak dapat pergi tanpa tahu apakah dia selamat," ungkapnya. Tidak lama setelah itu di sore yang sama pula putra Mary pun kembali ke rumah, setelah berlindung di sekolahnya saat tsunami terjadi. Mary yang lega akhirnya dibawa ke Point Pedro Hospital. Karena luka-lukanya yang cukup parah, sebagian tubuh yang tersayat dan keseleo, Mary mendapatkan tujuh jahitan.

"Suami saya saat itu sedang tidak bekerja karena botaknya rusak," ucap

Mary. "Sejak terjadinya tsunami, kami semua takut untuk kembali tinggal di dekat laut. Kini kami berada di daerah pedalaman dengan ketinggian 750 meter, setidaknya tempat ini aman dari ancaman tsunami yang akan datang." Dilema yang dirasakan oleh keluarga Mary maupun keluarga lainnya adalah harus atau tidaknya mereka kembali ke laut yang telah menjadi mata pencaharian tempatnya bergantung dari generasi ke generasi atau haruskah mereka tinggal jauh dari tepi laut, aman tetapi tanpa akses untuk memperoleh pendapatan maupun tempat yang biasa mereka anggap sebagai rumah.

Respons UNHCR

Pasca tsunami, UNHCR telah mendistribusikan hampir 500.000 jenis bantuan non-makanan kepada lebih dari 160.000 orang. Bantuan ini termasuk alas plastik, tenda, kawat nyamuk, peralatan masak dan perabot rumah tangga, handuk, sabun, ember, pakaian dan kebutuhan dasar lainnya. Kami juga memegang peranan penting dalam mendukung berbagai upaya Pemerintah Sri Lanka untuk mengkoordinir tempat-tempat penampungan transisi. Kami telah bekerjasama dengan para mitra untuk menjembatani kesenjangan antara tempat penampungan darurat dengan rekonstruksi dan pembangunan rumah sementara sebelum musim hujan datang.

UNHCR telah menyusun berbagai dokumen panduan dan checklist yang berkenaan dengan tempat penampungan sementara yang

dibangun bersama dengan para penerima manfaat, para pejabat Sri Lanka dan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya. UNHCR-convened Shelter and Settlement Forum menjamin bahwa masalah gender, lingkungan dan berbagai pemikiran lainnya akan turut dipertimbangkan selama pelaksanaan rekonstruksi rumah sementara maupun permanen bagi para pengungsi korban tsunami.

Selain itu, untuk mengkoordinir sektor ini, UNHCR juga membangun sekitar 3.000 tempat penampungan sementara di wilayah Jaffna dan Ampara. Desain antara satu lokasi dengan lokasi lainnya bervariasi karena perbedaan iklim, faktor-faktor sosial dan sumber daya lokal. Sebanyak 1.408 tempat penampungan di Jaffna akan selesai pada bulan Juni 2005, dimana 2.442 tempat penampungan transisi di Ampara





menurut jadwal juga akan dibangun pada bulan September 2005. Tempat penampungan transisi di Ampara (berukuran 3 x 4 meter) terdiri dari dua kamar terpisah, dibangun dengan rangka besi galvanis dan sesuai dengan standar SPHERE yang berlaku secara internasional untuk lima orang anggota keluarga. Fondasi bata menjadi dasar yang cukup kuat, dengan dinding bagian atas dari plywood. Rumah ini dapat dibongkar-pasang dan dipindahkan ke tempat lain jika perlu. Atapnya terbuat dari seng aluminium. Meskipun lebih mahal dari seng biasa, seng ini tidak terlalu panas seperti seng biasa, serta memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi orang yang tinggal di dalamnya. Kebutuhan untuk menjaga agar para penghuni tetap merasa sejuk juga diperhatikan dengan memberi jarak antara bagian atas dinding sebelah luar dengan atap aluminium seng tersebut.

Rumah yang telah selesai di Jaffna akan menjadi tempat tinggal yang aman, bermartabat dan tahan lama bagi Mary dan warga lainnya yang masih tersisa di Kallady, Point Pedro. Diantara mereka yang ikut menerima manfaat tersebut adalah saudara laki-lakinya, Thamilagan, yang secara tragis telah kehilangan istri, bayi kembarnya, ibu mertua, abang dan kakak

ipar beserta anak perempuan mereka saat terjadi bencana tsunami.

Thamilagan, 30 tahun, yang berasal dari Matharankerny di Jaffna, telah mengungsi sebanyak tiga kali karena konflik. Berjarak hanya 50 meter dari pantai, desanya telah kehilangan 189 warga akibat tsunami. Thamilagan menggambarkan adanya suara “letusan senjata dan ledakan yang cukup dahsyat” di luar sana saat terjadinya tsunami. Air mulai masuk melalui retakan di sekitar pintu depan dan jendela rumahnya. “Sebelum saya menyadari apa yang terjadi, tembok itu pun runtuh dan air yang mengalir kencang menghanyutkan segala yang ada di depan mata,” katanya. “Ayah mertua saya menarik si kembar tetapi tidak berhasil karena kekuatan air saat itu terlalu dahsyat.”

Setelah berenang-renang hampir sekitar 1 km dari rumahnya, Thamilagan pada akhirnya terus mencoba untuk kembali tetapi kakinya telah tertimpa oleh batu bata yang runtuh dan ia tidak dapat berjalan. Setelah ditemukan oleh polisi di sore harinya, Thamilagan kemudian dibawa ke Jaffna Teaching Hospital dimana ia dirawat selama tiga hari tanpa berkata sepatah pun tentang dimana keluarganya sebelum akhirnya seorang kerabat menyampaikan berita buruk itu. Kini dengan luka

yang cukup berat, dengan kesedihan yang mendalam serta depresi dan merasa bersalah pada dirinya sendiri yang selamat, Thamilagan berseru: “Mengapa hanya saya yang tetap hidup?” Kembali ke kehidupannya sebagai nelayan, Thamilagan telah memiliki boat yang dapat dimanfaatkan, dan pekerjaan yang saat ini sedang dilaksanakannya adalah membersihkan tumpukan puing-puing yang menutupi pelabuhan. Tetapi kenangan pahit itu akan tetap hidup dan kembali melaut “hanya akan mengingatkan saya kepada semua yang telah hilang”.

Dilema ini muncul di hampir semua komunitas yang menjadi korban tsunami di seluruh penjurur pulau. Kini, organisasi-organisasi seperti UNHCR hanya dapat mendengarkan dan membantu mereka yang kehidupannya telah direnggut oleh lautan yang justru telah menghidupinya sejak lama..

Lyndon Jeffels adalah UNHCR Associate Information Officer di Colombo. Email: HYPERLINK “mailto: jeffels@unhcr.ch” jeffels@unhcr.ch. Untuk informasi lebih lanjut tentang tempat-tempat penampungan transisi dan kegiatan UNHCR lainnya di Sri Lanka, silahkan kunjungi: [HYPERLINK](http://www.unhcr.lk) “http://www.unhcr.lk”

Distribution of supplies by UNHCR, Point Pedro district, Sri Lanka.

Tantangan Logistik

oleh Steve Matthews

Dampak tsunami Asia cukup luar biasa dan tantangan logistik untuk memenuhi kebutuhan para korban pun sangat besar. Seandainya tsunami terjadi lima tahun yang lalu, World Vision mungkin tidak sanggup meresponsnya dengan baik.

Di akhir tahun 1990-an, dengan meningkatnya kondisi darurat kemanusiaan dan cepatnya perkembangan kompleksitas bantuan, maka World Vision merubah caranya memberikan respons terhadap bencana-bencana besar. Selain masalah pembinaan staff pada awal-awal tahap tanggap darurat, dan kerugian waktu selama beberapa hari dalam proses tersebut, World Vision juga membentuk sebuah divisi full-time – yaitu Global Rapid Response Team – yang memiliki dedikasi untuk memprediksi, membuat persiapan dan merespons keadaan-keadaan darurat berskala-besar.

Tsunami telah menguji batas kemampuan mereka. “Kami mengikuti tiga puluh dua kali penerbangan ke Aceh dan Sri Lanka pada tiga puluh hari pertama,” kata George Fenton, Direktur Global Pre-positioning dari World Vision. “Kami belum pernah melakukan hal sebesar ini sebelumnya.” Dan hal ini tidaklah mudah. Pita merah birokrasi membuktikan adanya masalah besar pada beberapa kasus. Meskipun sebagian besar item tersebut dapat dibongkar-muat dan didistribusikan dengan cepat, namun item-item tertentu yang bukan makanan seperti kendaraan dan radio yang lebih mempertimbangkan potensi resiko keamanan di negara-negara yang dilanda konflik, justru terjerat dalam pita merah tersebut dan menyita waktu para staff sebelum mereka dapat membawanya.

World Vision India dan Thailand – dengan

kapasitas staff yang lebih besar – dapat melaksanakan bagian tugas responsnya dengan hanya sedikit bantuan luar, dan mengerahkan upaya internasional untuk difokuskan ke Sri Lanka dan Indonesia. Respons World Vision di Sri Lanka dilancarkan hanya beberapa jam setelah gelombang raksasa tersebut menghantam negara ini, serta bersyukur atas kreativitas dan keinginan para staff lokal yang segera menggalang pendistribusian makanan, air, pakaian, tikar untuk tidur dan produk-produk higienis lainnya. Respons mereka yang begitu cepat merupakan pengiriman bantuan terbesar dalam waktu yang begitu singkat sepanjang sejarah World Vision selama lima puluh lima tahun.

World Vision memiliki gudang stok di Denver, Hanover, Brindisi dan Dubai. Fasilitas-fasilitas ini didatangkan dengan cepat dan pengaturan stok pra-rencana lainnya dengan para penyedia dan perusahaan angkutan di Kenya, Kanada, India, Pakistan, Thailand dan Australia telah memenuhi hampir semua celah yang tersisa. Kemampuan untuk menggalang stok pra-rencana dari pasokan bantuan dimaksud telah terbukti.

Keterlibatan staff yang berpengalaman juga menjadi faktor penting. Setelah tewasnya seorang relawan World Vision di Mosul dan dengan semakin memburuknya keamanan di Iraq, World Vision akhirnya menutup programnya di Iraq pada bulan Oktober 2004. Berarti terdapat banyak relawan berpengalaman yang siap melak-

sanakan tugas barunya. Orang-orang berpengalaman dengan hubungan baik yang dimilikinya bersama tenaga-tenaga profesional dan lembaga-lembaga pemberi bantuan; dengan kemampuan untuk membina hubungan kerja yang baik secara cepat dengan LSM dan lembaga-lembaga PBB pada awal-awal kondisi darurat yang begitu kacau sangat membantu efektivitas pengiriman bantuan.

Bagaimana dengan masa-masa yang akan datang?

World Vision mengharapkan agar program tsunaminya dapat berlanjut minimal selama lima tahun, meliputi proyek-proyek berskala besar seperti pembentukan perusahaan-kecil bagi usaha-usaha yang berskala kecil, rekonstruksi rumah, sektor usaha, jalan dan jembatan, jaringan air dan sanitasi yang baru di daerah pesisir serta peningkatan perlindungan anak di sekolah-sekolah dan desa-desa.

Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari bencana-bencana sebelumnya terbukti sangat membantu dalam respons tsunami. Sejak dikembangkannya peraturan mengenai perlindungan anak dua tahun terakhir ini, lahan khusus bagi anak-anak pun dibangun di Sri Lanka, Aceh dan India. Pengambilan keputusan secara desentralisasi dari pemerintah pusat memungkinkan dilakukannya respons yang lebih cepat, terutama di India dan Sri Lanka. Akan tetapi, selain efektivitas dari sebagian besar aspek operasi pemberian bantuan, masih terdapat pula kekhawatiran untuk masa yang akan datang. Bagaimana jika terjadi bencana besar lagi dalam waktu dekat ini? Respons tsunami telah banyak menguras kapasitas terbaik dari semua pihak. Jika terjadi lagi bencana berskala besar dengan cepat dalam waktu dekat ini, lembaga-lembaga besar sekalipun – akan sangat sulit memberikan respons yang memadai.

Steve Matthews adalah seorang Manajer Komunikasi Darurat dari Global Rapid Response Team, World Vision. Email: [HYPERLINK "mailto:stephen_matthews@worldvision.ca" stephen_matthews@worldvision.ca](mailto:stephen_matthews@worldvision.ca)

1. See After Action Review (involving World Vision International, CARE, OXFAM GB and Catholic Relief Services) at www.humanitarianinfo.org/srilanka/infocentre/reference/docs/Care_Evaluation.pdf



Nasib ikan kecil pasca-tsunami melanda

by oleh Irene Fraser

Sejak hari pertama keadaan darurat, lembaga-lembaga internasional maupun nasional di Batticaloa berkumpul bersama. Pertemuan singkat dan padat juga diadakan oleh mereka yang telah saling mengenal. Persahabatan antara masyarakat Sri Lanka dengan para relawan asing mulai tumbuh dari bencana yang telah kami hadapi bersama dan keinginan kami untuk berbagi sumber daya – seperti kendaraan, bahan-bahan bantuan dan staff – kepada lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pada tanggal 30 Desember, karena tingginya air, Bendungan Inginiyagala di Ampara dibuka dan air yang mengalir kencang ke arah pantai memaksa para korban untuk pindah ke tempat-tempat penampungan sementara. Saat itu saya sedang membagi-bagikan bantuan makanan ke sebuah sekolah yang telah berubah menjadi kamp bagi keluarga yang mengungsi. Saat air menghantam kami untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari seminggu, banyak orang yang dengan paniknya naik ke atas meja. Saya juga melihat bila api untuk memasak nasi dimatikan maka kami pun kembali berada dalam kegelapan. Tidak ada tempat untuk kami lari. Kami berada dalam air setinggi paha dan terus merasa ketakutan seandainya bendung tersebut sampai pecah dan air

yang datang pun pasti akan menghanyutkan kami. Jika hujan turun malam itu hati saya pun berdesir. Kami beruntung karena kantor kami berada di lantai satu di gedung sebuah LSM; kami mempunyai tikar untuk berbaring sedangkan banyak orang lainnya tidur di tempat terbuka, di bawah pohon atau di kamp-kamp yang becek dan sesak. Staff yang berkelakar mengatakan bahwa hanya angin topan yang akan memperburuk semuanya.

Namun demikian, kejutan selanjutnya bukan datang dari alam tetapi dari kantor kami. Tiba-tiba saya menerima kabar bahwa koordinator tim tanggap darurat kami dari Sri Lanka dibebastugaskan dan diminta untuk segera berkemas dan berangkat ke Colombo. Tanpa konsultasi, pihak manajemen telah menyalahkannya

atas penggunaan mobil kantor yang ‘tidak tepat’ karena ia telah mengizinkan staff yang bukan pegawainya untuk membawa masyarakat ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Dikabarkan pula bahwa kami telah melanggar kebijakan sumber daya manusia dengan mengizinkan relawan (yang memiliki pengalaman tanggap darurat internasional yang cukup substansial) untuk ikut serta dalam tim kami. Kami bahkan menerima kabar bahwa tim ‘ahli’ tanggap darurat sedang berada dalam perjalanan. Setelah lima hari melakukan operasi tanggap darurat yang luar biasa dan dengan waktu kerja 20 jam untuk memberikan bantuan makanan dan medis bagi 30.000 orang, kami justru diminta untuk menunda kegiatan dan menunggu instruksi dari para ahli yang akan masuk.

Banyak LSM mengatakan bahwa pekerjaan mereka terbentuk oleh suatu visi partisipasi serta nilai-nilai desentralisasi akan tetapi apakah ada bukti yang lebih jelas lagi yang mampu menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga kemanusiaan

Outside a refugee camp near Palattadichennai, Sri Lanka, people begin to return home.



tidak percaya terhadap staff lokal, serta terhadap pengetahuan dan kemampuan masyarakat lokal? Ketika para ahli tanggap darurat itu tiba saya ingin sekali mengajukan banyak pertanyaan kepada mereka. Sadarkah anda bahwa di sini telah berlangsung konflik bersenjata selama dua dekade? Apakah anda pernah mengungsi, kehilangan orang-orang yang dicintai saat terjadinya konflik atau dirampas tanah dan harta bendanya? Dengan demikian segera tampak dengan jelas bahwa mereka hanya mengetahui sedikit tentang Sri Lanka dan masyarakatnya, struktur sosialnya, latar belakang konflik dan keuletan serta berbagai strategi yang mereka miliki. Kerangka acuan yang mereka buat tidak menyiratkan adanya pemahaman tentang apa yang telah dialami oleh para korban tsunami.

Dengan semakin ramainya ahli yang masuk, maka kehidupan pasca-tsunami semakin tampak seperti perusahaan yang sedang diambil alih. Ikan kecil ditelan oleh ikan besar. Struktur masyarakat dan organisasi terabaikan disaat para staff lembaga-lembaga baru mulai melancarkan operasinya sendiri. Harga pasar lokal untuk sewa rumah membumbung tinggi dan tingginya nilai mata uang telah mengubah pasar tenaga kerja. Dalam hitungan hari lembaga-lembaga tersebut mengatakan bahwa seakan-akan mereka telah bekerja di Sri Lanka selama berabad-abad dan meyakinkan kami bahwa setelah penilaian awal selesai dilakukan mereka akan segera mengetahui apa yang harus dilakukan. Keyakinan mereka begitu menyesak. Salah

satu LSM bahkan mengklaim bahwa mereka akan merehabilitasi semua yang ada di daerah tersebut dalam tempo tiga bulan.

Barang-barang bantuan didistribusikan dalam waktu singkat dan cepat bahkan terkadang berlebih untuk memamerkan banyaknya jumlah orang yang telah menerima manfaat bantuan tersebut seperti yang disinyalir oleh berbagai pihak di website mereka dan siaran-siaran pers. Tak seorang pun peduli apakah pakaian bekas tersebut masih layak pakai atau memiliki kualitas cukup baik. Adanya sepatu berhak-tinggi dan pakaian renang wanita di beberapa paket bantuan sama sekali tidak terduga. Selain tempat tinggal para IDP dan keluarganya yang terabaikan, lembaga-lembaga tersebut juga melibatkan dirinya dalam pemberian berbagai bantuan bagi mereka yang ada di kamp-kamp. Tak seorang pun yang mengatakan tidak atas pemberian tersebut dan sejumlah keluarga yang lebih banyak menerima barang bantuan non-makanan kemudian menjualnya ke toko. Konflik antar keluarga memuncak dengan adanya distribusi yang serabutan. Beberapa anak dengan bangga memperlihatkan tas dan buku baru mereka sedangkan mereka yang tidak menerima apapun hanya bisa termenung. Pasokan bantuan obat-obatan pun sangat banyak yang berdatangan dengan label yang ditulis dalam berbagai bahasa asing. Banyak orang mengalami overdosis karena mereka menemui dokter dari tim yang berbeda-beda dengan resep yang berbeda pula.

Dengan kesibukan penyaluran dana dan pendistribusian pasokan bantuan tidak ada kesempatan untuk duduk bersama dengan masyarakat setempat, menghibur anak-anak dan para keluarga di saat mereka membutuhkan atau bahkan membantu mereka untuk menghadapi dan mengatasi ketakutannya terhadap laut. Bahkan, orang-orang terus dihantui oleh adanya bunyi alarm yang salah – mereka bertanya-tanya apakah ini peringatan terhadap resiko tsunami yang baru atau hanya rencana pemerintah – yang semakin menambah rasa takut dan meningkatkan stress mereka. Tidak jelas apakah buffer zone pantai – dimana tak seorang pun boleh tinggal – yang akan ditetapkan berjarak 100 atau 300 meter. Para nelayan yang selalu hidup di pinggir laut kemungkinan tidak dapat bekerja dan bahkan harus menyewa penjaga keamanan untuk menjaga boat dan jaring mereka. Peranan orang asing untuk membersihkan sampah-sampah dari areal pantai, serta penghancuran sisa-sisa rumah penduduk tanpa kehadiran dan izin dari mereka, telah menambah kekhawatiran bahwa sesungguhnya para pengembang sedang merencanakan untuk membangun hotel-hotel mewah di tempat mana mereka pernah tinggal dan bekerja.

Irene Fraser bekerja di Sri Lanka untuk sebuah LSM internasional yang cukup besar. Email: HYPER-LINK "mailto:irene_fraser@yahoo.co.uk" irene_fraser@yahoo.co.uk

Respons kemanusiaan bagi para buruh Migran Burma

Oleh: Pia Oberoi

Hak azazi manusia mengisyaratkan untuk tidak menghalangi semua respons kemanusiaan bagi mereka yang terkena dampak krisis tsunami di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Di seluruh dunia banyak ditemukan kenyataan bahwa para buruh migran 'non-reguler' atau 'tanpa dilengkapi dokumen' yang jika dipandang secara umum melakukan pekerjaan hina, rendah atau bahkan berbahaya seperti pembantu domestik, buruh tani atau penyapu jalan. Sebelum bencana tsunami, para buruh Burma di daerah pesisir pantai Thailand bekerja di berbagai sektor dengan keahlian rendah, termasuk sektor konstruksi, peri-

ikanan dan pariwisata. Pada prakteknya, seiring dengan adanya pengembangan kebijakan, respons dari para pejabat di Thailand terhadap para buruh migran Burma yang terkena dampak tsunami justru diskriminatif dan bahkan melanggar hak-hak azazi manusia mereka yang sangat mendasar.

Diperkirakan jumlah buruh migran Burma di Thailand yang menjadi korban tsunami berkisar antara 700 hingga

2.500 jiwa, melebihi estimasi total jumlah penduduk Burma sebanyak 120,000 lebih yang bekerja di empat provinsi di Thailand selatan yang sebagian besar mengalami kerusakan. Angka pasti mengenai jumlah warga Burma yang terluka ataupun hilang juga belum diketahui, beberapa laporan mengabarkan bahwa jumlah mereka yang hilang mencapai 4.000 jiwa. Sebuah misi penilaian bersama yang dilaksanakan oleh International Organization for Migration (IOM), the World Bank dan lembaga-lembaga PBB pada bulan Januari lalu menyimpulkan bahwa sedikitnya 7.000 orang buruh migran Burma dan keluarganya menjadi korban tsunami di Thailand. Ketidakpastian ini sebagian besar disebabkan oleh adanya

kenyataan bahwa terdapat ribuan buruh migran yang tinggal dan bekerja di Thailand yang tidak terdaftar sehingga tidak termasuk dalam data statistik resmi. Disamping itu, banyak juga dokumen identitas dan izin kerja mereka yang hilang terbawa gelombang.

Diskriminasi pemberian bantuan

Dalam situasi yang kacau balau pasca tsunami, banyak ditemukan kenyataan bahwa buruh migran Burma berada di deretan paling akhir dalam penerimaan bantuan darurat untuk kemanusiaan – itupun bila mereka telah memenuhi seluruh persyaratan. Pengumuman yang dibuat oleh pihak berwenang di Thailand menyatakan bahwa hanya buruh migran yang dapat membuktikan bahwa mereka secara reguler berada di negara tersebut yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima bantuan kemanusiaan. Sejumlah LSM pada bulan Januari 2005 juga melaporkan bahwa seluruh masyarakat migran non-reguler bersembunyi di bukit-bukit, banyak diantaranya yang terluka dan menderita kelaparan. Para migran non-reguler tersebut bahkan tidak dapat masuk ke unit-unit pelayanan kesehatan darurat melalui jaringan kesehatan masyarakat Thailand dan sebagian besar dari mereka terpaksa harus mengharap belas kasihan dari LSM-LSM lokal untuk mendapatkan

kemanusiaan, para buruh migran Burma juga menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan kesewenang-wenang pasca tsunami. Pada industri-industri di daerah pesisir pantai yang mengalami kerusakan, banyak buruh migran yang di-PHK oleh majikannya dan mengalami kesulitan untuk mencari pengganti izin kerja mereka yang hilang terbawa oleh bencana gelombang tersebut. Media juga melaporkan adanya tindak kejahatan yang diduga kuat dilakukan oleh para migran sehingga pihak berwenang di Thailand terpaksa memeriksa dan menahan, bahkan mengadili ratusan migran Burma tersebut. Ratusan bahkan mungkin ribuan migran Burma dipulangkan secara paksa oleh pihak pejabat Burma, dimana sebagian diantaranya dengan resiko pelanggaran hak azazi manusia yang cukup serius. Status mereka yang non-reguler mengakibatkan hanya sedikit buruh migran yang berani melaporkan perlakuan kasar yang mereka alami, baik oleh majikannya maupun oleh aparat penegak hukum setempat.

Apapun kenyataannya, hal ini merupakan hak prerogatif negara Thailand untuk mengawasi perbatasannya, walaupun para buruh migran yang kurang memiliki hak resmi untuk tetap bekerja di negara itu menuntut agar dihargainya hak-hak dasar mereka. Penangkapan dan peradilan sewenang-wenang, serta pelaksanaan peradilan tanpa persyaratan yang memadai, melanggar Pasal 9(1) dan 10 dari Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik,

dimana Thailand juga merupakan salah satu negara yang ambil bagian didalamnya. Padahal pada prinsipnya, pemerintah Thailand berdasarkan hukum internasional yang berlaku telah melarang untuk tidak menyeret siapapun kedalam suatu situasi yang akan membuatnya mengalami pelanggaran hak-hak azazi man

Perlindungan hak-hak azazi manusia bagi para migran

The tsunami crisis brought to the Di mata publik, krisis tsunami telah membawa masalah tersendiri bagi para buruh migran di Thailand, seperti perlakuan sewenang-wenang oleh majikan dan aparat setempat. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan respons kemanusiaan oleh pejabat pusat maupun daerah di wilayah tersebut secara keseluruhan. Mulai dari Sri Lanka sampai Indonesia melalui Thailand dan India, terdapat laporan tentang adanya diskriminasi dalam pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi kelompok-kelompok rentan yang sangat membutuhkan tersebut.

Kerentanan para buruh migran ini semakin bertambah pada saat mereka berada dalam situasi non-reguler, dan bahkan lebih parah lagi jika migran non-reguler tersebut adalah wanita, anak-anak, orang tua atau bahkan mereka yang sakit. Belum lagi negara-negara di seluruh dunia ini yang menerapkan kebijakan diskriminatif secara reguler bagi para migran non-reguler. Sangat sedikit sekali negara yang memiliki persyaratan legislatif, atau bahkan kebijakan administratif yang memberikan perlindungan bagi para migran yang berada dalam situasi non-reguler di wilayahnya.

Dapat dikatakan bahwa hanya 29 negara di dunia ini yang ikut ambil bagian dalam satu instrumen hak-hak azazi manusia yang secara spesifik memiliki dedikasi dalam melindungi hak-hak azazi dasar para migran tersebut, tanpa memandang status migrasinya. Ini merupakan Konvensi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlindungan Hak-hak para Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (ICMW), yang ditetapkan pada bulan Juli 2003. ICMW serta traktat intinya menyangkut hak azazi manusia yang sesuai bagi para migran tersebut merupakan perangkat penting dalam upaya perlindungan hak-hak mereka, yang tidak sedikit karena tindakannya sebagai pengimbang bagi penekanan pengawasan dan tindakan penahanan yang hingga saat ini masih banyak dibahas dalam berbagai perdebatan yang menyangkut masalah migrasi. Kesadaran bahwa semua migran juga adalah manusia beserta hak-hak azazi yang melekat pada dirinya merupakan kunci untuk memastikan bahwa dalam konteks respons kemanusiaan mereka tidak dapat dilupakan, tidak dapat didiskriminasikan atau diperlakukan sewenang-wenang..

Pia Oberoi adalah seorang Petugas bagian Pengungsi (Refugee Officer) pada lembaga Amnesty International yang bemarkas di Jenewa. Tulisan yang dimuat dalam artikel ini tidak hanya sekedar mewakili pandangan dari lembaga Amnesty International. Email: HYPERLINK "mailto:POberoi@amnesty.org" POberoi@amnesty.org

1. www.unhcr.ch/html/menu3/b/a_ceschr.htm

2. www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm

Sebagai contoh lihat Human Rights Watch,

'End caste bias in tsunami relief', 14 January

2005 HYPERLINK "<http://hrw.org/english/docs/2005/01/14/india10019.htm>"

<http://hrw.org/english/docs/2005/01/14/india10019.htm>;

Amnesty International, 'Indonesia - Human rights

are paramount in the relief and reconstruction effort', 18 January 2005 HYPERLINK "<http://news.amnesty.org/index/ENGASA210032005>"

<http://news.amnesty.org/index/ENGASA210032005>

www.ilo.org/public/english/employment/skills/recomm/instr/un_9.htm

Hundreds and possibly thousands of Burmese migrants were forcibly returned by the authorities to Burma

makanan dan bantuan lainnya.

Respons kemanusiaan merupakan dasar dari kewajiban untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia dan memulihkan martabat manusia dalam suatu kerangka yang non-diskriminatif. Respons yang diberikan terhadap para buruh migran Burma bukan hanya tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka bahkan tidak mampu memulihkan martabat mereka. Hukum hak azazi manusia internasional telah menetapkan prinsip-prinsip bahwa semua umat manusia, tanpa mengenal status resminya, berhak untuk dihargai hak-hak dasarnya, termasuk hak-hak di bidang ekonomi dan sosial. Berkenaan dengan kemampuan para migran Burma untuk memasuki unit pelayanan kesehatan darurat pasca tsunami misalnya, Pasal 12 dari Perjanjian Internasional menyangkut hak-hak di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, menghargai hak setiap orang untuk mendapatkan standar kesehatan fisik maupun mental yang terbaik, dimana Thailand merupakan salah satu negara yang ikut ambil bagian didalamnya.

Selain tidak mendapatkan bantuan

Simposium India untuk mereview respons tsunami

dilaporkan oleh Paula Banerjee dan Sabyasachi Basu Ray Chaudhury

Sebuah simposium yang dihadiri oleh para akademisi dan aktivis hak azasi manusia yang diselenggarakan oleh Calcutta Research Group menilai mengenai bagaimana upaya-upaya pemberian bantuan dan pelaksanaan rehabilitasi di Tamil Nadu serta pulau Andaman dan Nicobar menghargai hak-hak para korban yang menerima bantuan tanpa adanya diskriminasi baik dari segi kasta, agama maupun jenis kelamin (gender).

Tamil Nadu

Pembicara dalam simposium ini mencatat bahwa respons pada awalnya dari Pemerintah India dan Pemerintah Daerah Tamil Nadu terhadap kebutuhan 2,73 juta orang yang menjadi korban keganasan gelombang dahsyat beberapa waktu yang lalu masih ragu-ragu. Di saat upaya-upaya penyelamatan dan pemberian bantuan awal dilakukan oleh organisasi sosial kemasyarakatan, upaya pemberian bantuan langsung dari pemerintah justru tidak mampu memahami bahwa beberapa kelompok diantaranya berada dalam keadaan yang lebih buruk dibandingkan dengan kelompok lainnya. Berbagai program daerah negara bagian berdasarkan pada persepsi yang muncul sebelumnya mengenai kebutuhan bantuan dan rehabilitasi. Ditengah-tengah kebutuhan pangan yang mendesak bagi sebagian besar mereka yang rentan, lembaga-lembaga donor justru terjebak dalam kekacauan yang muncul akibat adanya ketidak-

konsistenan kebijakan dari pemerintah. Kebutuhan sebagian besar wanita korban tsunami, anak-anak dan orang tua serta golongan dalit (disebut juga 'mereka yang tak tersentuh') dan diskriminasi lainnya terhadap golongan minoritas masih belum terpenuhi.

Meskipun komunitas nelayan telah menerima bantuan yang secara tidak proporsional lebih banyak dibandingkan dengan korban lainnya, kurang dari sepertiga nelayan di Tamil Nadu telah mulai kembali melaut. Rehabilitasi terhadap komunitas nelayan ini dilihat dari perspektif jangka pendek. Empat per lima dari bantuan yang diberikan untuk komunitas nelayan tersebut adalah dalam bentuk pinjaman (loan). Para nelayan khawatir tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut karena mereka sendiri telah kehilangan sebagian besar harta bendanya. Perusahaan-perusahaan penambangan yang terlibat dalam kegiatan penambangan pasir juga bersikap seolah-olah tidak ada penam-

banagan apapun yang dilakukan di daerah tersebut dan kegiatan mereka juga kurang teratur. Sejumlah keluarga mengklaim bahwa tanah mereka akan tetap aman jika perusahaan-perusahaan penambangan tersebut tidak diberi izin untuk melanjutkan kegiatan penambangan pasirnya. Kerusakan hutan-hutan bakau juga telah memperburuk erosi tanah.

Dengan tidak adanya keterbatasan dana, maka akuntabilitas pun menjadi berkurang. Asian Development Bank menyediakan sumber-sumber dana substansial kepada pihak pemerintah serta ikut menyalurkan Dana Bantuan dari Perdana Menteri dan Kepala Kementerian. Tuntutan transparansi yang lebih tinggi tentang pemanfaatan dana yang disediakan oleh lembaga pemerintah maupun LSM pun meningkat.

Operasi pemberian bantuan seringkali tidak sensitif, antara lain:

- n Mobil barang dengan muatan selimut yang tiba dari India bagian utara tetapi tidak bermanfaat bagi para korban tsunami yang berada di daerah lembab dan panas seperti Tamil Nadu
- n Bantuan pakaian bekas dengan kualitas yang buruk ditolak dengan marah oleh komunitas nelayan.
- n Baik administrator kabupaten maupun panchayats setempat (perangkat desa) mengucilkan kaum wanita:

Temporary housing on the beach, Ininthakara, India.



wanita yang menjadi pegawai pemerintah tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan operasi pemberian bantuan sedangkan pegawai pria tidak sensitif terhadap kebutuhan-kebutuhan wanita dan anak-anak: misalnya, wanita hanya diberikan pakaian sari tanpa dilengkapi dengan pakaian dalam.

- n Bantuan dalam bentuk uang diberikan kepada kaum pria yang menjadi kepala keluarga – dan kompensasi atas kehilangan sanak keluarga juga diberikan kepada kaum pria – tanpa disertai dengan upaya untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan dan tidak disia-siakan..
- n Para fotografer saling berdesakan untuk mengambil gambar wanita miskin yang tidak berdaya.
- n Makanan jenis chapattis diberikan kepada mereka yang makanan pokoknya adalah beras.

Banyak LSM lokal maupun internasional dengan sisa dana yang cukup substansial mengalami kesulitan untuk menyalurkan dan tersebut karena Pemerintah India yang ingin memberlakukan undang-undang pra-tsunami untuk wilayah pantai telah mencegah dilakukannya pembangunan perumahan bagi para korban tsunami atau memberikan modal yang berkenaan dengan mata pencaharian mereka. Keputusan untuk merelokasi penduduk sejauh 200 meter dari garis pantai merupakan hal yang cukup kontroversial. Penerapan undang-undang mengenai kawasan pantai tersebut dianggap kurang transparan. Banyak pertanyaan mengenai legalitas dari larangan tersebut dan kekhawatiran bahwa relokasi yang dilakukan secara paksa justru akan membuka jalan bagi kerjasama multinasional untuk mengambil alih pengawasan terhadap wilayah pantai tersebut.

Tidak ada koordinasi antar departemen-departemen pemerintah dan tidak ada pula kebijakan rehabilitasi yang komprehensif. Beban untuk membuktikan hak memperoleh bantuan kini jatuh kepada para korban. Baik partai politik maupun organisasi wanita telah cenderung mengabaikan isu-isu diskriminasi terhadap wanita dalam operasi pemberian bantuan tsunami. Peranan yang dimainkan oleh organisasi Muslim dalam operasi pemberian bantuan juga belum diakui. Sedangkan pihak pemerintah yang mau mendengarkan organisasi sosial kemasyarakatan tidak selamanya mau menerima rekomendasi dari mereka.

Pejabat pemerintah tampaknya lebih termotivasi oleh kebutuhan untuk menjaga reputasi dirinya sendiri serta menghindari dari kritikan pemberitaan pers. Sejumlah LSM juga tampaknya lebih tertarik pada pemberitaan di halaman-halaman media yang menguntungkan. Seorang peserta mencatat bahwa tiga kelompok orang diuntungkan oleh bencana yang terjadi, yaitu: pemilik hotel, perusahaan penyewaan mobil dan LSM lokal yang tidak jujur yang mendapatkan uang dari hasil mereka bertindak sebagai pemandu perjalanan pasca bencana.

Pemerintah daerah masih menentukan siapa yang akan menyediakan bantuan dan siapa yang tidak. Peran lembaga sosial kemasyarakatan kemungkinan dapat lebih luas, dan kalangan kelas menengah di India serta warga non-India telah menyediakan berbagai sumber yang signifikan, namun pihak pemerintah daerah masih tetap mencermati masyarakat sipil tersebut bukan sebaliknya, seperti yang diharapkan.

Kerangka berpikir kontinental untuk pemberian bantuan bagi Andaman dan Nicobar

Pulau Andaman dan Nicobar yang terpencil merupakan deretan pulau di Teluk Benggali – membentang dari utara ke selatan dengan luas 700 km lebih – yang berada pada 1.200 km bagian timur daratan India. Berada di dekat pulau Sumatra, Nicobar – yang jalan masuknya diawasi ketat oleh pihak India – mengalami tsunami yang lebih parah dan sedikitnya 3.000 orang dari suku aslinya diperkirakan tewas. Pulau tersebut memiliki pemerintahan daerah dan struktur legislatif yang kurang demokratis, serta rencana pembangunan yang tidak sesuai yang telah lama ditetapkan oleh ‘pihak daratan’. Kerusakan yang diakibatkan oleh hal tersebut bagi lingkungan pantai yang rentan telah diperparah dengan adanya pemberlakuan undang-undang yang mengatur tentang zona tanpa-bangunan oleh para elit setempat dan Angkatan Udara India.

Tanpa adanya organisasi politik dan sosial kemasyarakatan, maka respons birokratik terhadap bantuan yang dibutuhkan tidak dapat dihindari. Pemerintah India tidak menyambut baik PBB atau bantuan internasional lainnya dalam melakukan penilaian kerugian dan kerusakan. India menolak dana asing untuk operasi pemberian bantuan tetapi meminta LSM-LSM India untuk mentransfer dana tersebut untuk administrasi lokal. UNICEF adalah satu-satunya organisasi internasional yang diizinkan beroperasi di kepulauan tersebut. Palang Merah Internasional mengajukan komplain bahwa supply mereka ditahan di pelabuhan Port Blair. Para wartawan dan relawan asing juga tertahan di pelabuhan Port Blair dan mereka tidak diizinkan melakukan perjalanan ke salah satu pulau pun di wilayah tersebut.

Tanpa adanya konsultasi dengan komunitas lokal serta tanpa adanya batasan administrasi pemerintahan sipil, maka operasi pemberian bantuan dan pelaksanaan rehabilitasi dipegang oleh pihak militer India. Akan tetapi, adalah hal penting untuk memperhatikan pandangan dan kebutuhan masyarakat setempat dan pengetahuan asli mereka sebagai pribumi juga patut dihargai. Nelayan Nicobar, misalnya, menolak bantuan peralatan penangkapan ikan dari pemerintah daratan pasca tsunami karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Akibat bencana ini, sebagian besar komunitas nelayan di pulau tersebut menjadi korban, hutan-hutan bakau menjadi gundul dan batu-batu karang pun mus-

nah. Disamping itu juga terdapat resiko perselisihan etnis yang cukup besar antar komunitas suku – yang kini hanya tinggal 12% dari jumlah penduduk pulau tersebut – dengan para pendatang.

Pelajaran yang dapat diambil

Tsunami telah menyoroti kebutuhan mendesak untuk memikirkan kembali tentang peranan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan komunitas dan masyarakat sipil dalam konteks operasi pemberian bantuan. Rekomendasi kebijakan kunci yang muncul dari simposium ini antara lain:

- n Harus ada peningkatan koordinasi antara lembaga donor serta pembagian informasi mengenai dampak bencana dan kebutuhan bagi para korban.
- n Bantuan harus diberikan sesuai dengan kebutuhan komunitas yang menjadi korban, bukan berdasarkan pasokan atau supply.
- n Komunitas yang menjadi korban tsunami harus memutuskan jenis bantuan apa yang sesuai untuk mereka: panchayat harus memiliki peranan yang lebih besar dalam menghadapi dan menanggapi berbagai bencana..
- n Suara kaum wanita harus diprioritaskan dalam semua aspek pemberian bantuan dan pelaksanaan rehabilitasi.
- n Diskriminasi dalam pemberian bantuan – berdasarkan kasta, gender dan status ekonomi – harus diatasi.
- n TKarakter khusus pulau Andaman dan Nicobar harus ikut dipertimbangkan
- n Lembaga-lembaga pemerintahan harus lebih transparan menyangkut pengeluaran sumber-sumber dana pasca bencana.
- n Para penyusun rencana rehabilitasi harus memantau kebijakan pemerintah mengenai tanah dan dampaknya bagi perekonomian daerah. .

Paula Banarjee, anggota Dewan Penasehat Editorial FMR, adalah Koordinator Riset dari Mahanirban Calcutta Research Group (HYPERLINK “<http://www.mcrg.ac.in>” www.mcrg.ac.in). Email: HYPERLINK “mailto:paula@mcrg.ac.in” paula@mcrg.ac.in

Sabyasachi Basu Ray Chaudhury adalah anggota MCRCG serta mengajar di Jurusan Ilmu Politik, Rabindra Bharati University, Kolkata. Email: HYPERLINK “mailto:sabyasachi@mcrg.ac.in” sabyasachi@mcrg.ac.in

Laporan lengkap mengenai simposium ini juga online di: ??

Pembicara dalam simposium tersebut adalah: Dr. Louis (People's Watch, Tamil Nadu HYPERLINK “<http://www.pwtn.org>”); Bimla Chandrasekhar (Ekta Resource Centre for Women, Tamil Nadu HYPERLINK “<http://www.ektaonline.org>” www.ektaonline.org); K.M. Parivelan (aktivis kemanusiaan, juga bekerja pada kantor UNHCR di Chennai, Tamil Nadu); Partha Guha (Child in Need Institute, Kolkata HYPERLINK “<http://www.cini-india.org>” www.cini-india.org); Samir Acharya (Society for Andaman and Nicobar Ecology HYPERLINK “<http://www.andaman.org/book/Sane/sanetext.htm>” www.andaman.org/book/Sane/sanetext.htm) dan Subir Bhowmick (anggota CRG, juga karyawan BBC).

Suara bagi kelompok rentan di Tamil Nadu

oleh Max Martin

Banyak masyarakat rentan di negara bagian India Tamil Nadu kehilangan rumah, mata pencaharian serta kesempatan untuk bersekolah sejak tsunami melanda. Bantuan bagi kelompok yang memang sudah susah ini harus lebih peka khususnya menyangkut kebutuhan dasar mereka.

Saat tsunami menghantam sebuah pulau kecil tempatnya tinggal, Mariammal kehilangan catamaran (sejenis boat) dan jala untuk menangkap ikan miliknya. Desanya – yang sebagian besar didiami oleh masyarakat dari suku Irula – berada di sebuah gugusan pulau kecil antara danau Pulicat (60 km arah utara ibukota, Chennai) dan Teluk Benggali. Tak satu pun dari komunitas adivasi (suku) atau dalit (disebut juga ‘mereka yang tak tersentuh’) yang tinggal disekitar wilayah tersebut diizinkan untuk melaut – yang merupakan perlindungan secara adat oleh para nelayan non-suku. Dua orang tewas dalam perselisihan ketika dua tahun yang lalu beberapa pria Irula melanggar larangan untuk menangkap ikan di sana. “Masyarakat kami telah menyampaikan kepada pejabat daerah bahwa kami tidak akan menangkap ikan di laut,” kata Mariammal. Para wanita secara tradisional memancing di daerah rawa-dalam untuk menangkap sejenis udang, kepiting danau, ikan lele dan sejenis ikan rawa (mullet), kepah serta tiram. Di desanya, ada sekitar 40 catamaran, 28 diantaranya dimiliki oleh para wanita. Hampir semua boat hilang dan rusak saat tsunami.

Meskipun Mariammal kini hidup dengan belas kasihan dari sebuah gereja lokal, namun ia adalah sekretaris dari kelompok simpan pinjam yang diorganisir oleh sebuah LSM lokal dan ia berharap akan ada upaya yang serupa untuk membantu memulihkan mata pencaharian masyarakat desa tersebut. Ia juga berharap LSM-LSM dan pihak-pihak lainnya yang menawarkan bantuan dapat memperhatikan juga kebutuhan para wanita; keterampilan dan peralatan untuk menangkap ikan biasanya hanya diberikan untuk kaum pria. Dengan menyeberangi daerah rawa-dalam, LSM-LSM tersebut kini sedang bergerak untuk membantu komunitas nelayan di sana tetapi mereka tidak melewati dusun kecil yang didiami oleh suku ini atau komunitas dalit dan sekitarnya.

Pria dan wanita dari kasta-kasta tertentu dilarang untuk memasuki areal laut yang ada di sepanjang wilayah pantai Tamil Nadu. Peranan para dalit dan masyarakat kesukuan dalam komunitas nelayan cenderung saling mendukung; mereka membersihkan dan merawat peralatan untuk menangkap ikan, bongkar muat, transportasi dan menjual ikan, membangun, menutupi dan membersihkan pondok-pondok nelayan. Bantuan LSM dalam pemulihan kehidupan mereka masih mempertimbangkan berbagai peran yang diemban

oleh mereka secara adat. Wanita seperti Mariammal yang bergelut dengan pekerjaannya sebagai nelayan mengalami dua kali diskriminasi – pertama sebagai wanita, dan yang kedua adalah termasuk ke kelompok minoritas.

Hidup di jalanan

Trotoar jalan menuju pantai Marina di Chennai yang begitu indah tampak hidup pada saat matahari terbenam setiap harinya. Kita dapat melihat seorang Krisnamurti muda yang sedang membuka buku pelajarannya di trotoar “rumah” keluarganya di alam terbuka antara dua sisi lampu jalan. Di Patanapakkam, lebih dari 500 kepala keluarga yang mengungsi karena tsunami tinggal di alam terbuka di sisi jalan yang padat selama lebih dari dua bulan. Puing-puing rumah mereka dapat terlihat dari tepi pantai.

Patok dan tali menandai batas-batas

resmi yang dapat dimasuki jika ingin melihat kerusakan. Disaat sekitar setengah dari mereka yang tinggal di trotoar pindah ke tempat-tempat penampungan sementara yang berjarak 12 km, keluarga Krisnamurti justru lebih memilih untuk tetap tinggal di sini. “Ini memang sulit tetapi kami ingin memastikan bahwa dia memiliki waktu untuk tetap belajar,” kata Bhanu, ibu Krisnamurti. Mereka berharap akan mendapatkan tempat tinggal yang dekat – dan rumah permanen nantinya. Banyak program rehabilitasi tidak memperhatikan kebutuhan akan pendidikan bagi anak-anak pengungsi. Perbaikan sekolah dan tempat-tempat untuk belajar bagi mereka yang tidak memiliki tempat resmi yang khusus baru sekarang dibicarakan.

Setelah dua bulan di jalanan, hampir semua keluarga telah dipindahkan ke tempat-tempat penampungan sementara yang cukup jauh. Saat menuliskan ini di awal bulan Juni, mereka tinggal di barak yang panas, lembab, hanya dengan sedikit fasilitas air dan sanitasi yang sangat buruk. Kamp tersebut tergenang jika hujan turun di musim panas. Dalam satu bulan terjadi hujan angin muson dan banjir yang lebih tinggi. Pemerintah dan LSM-LSM berencana untuk memindahkan mereka lagi – yaitu ke kamp yang lebih baik.

Mencari tempat yang dingin

Di desa Muttam di kabupaten Kanniya-

kumari yang terletak di bagian paling ujung selatan India, Mary, seorang ibu empat anak, menempati satu dari 24 rumah sementara yang dibangun oleh LSM lokal. Ketika musim panas yang semakin panas dan lembab, rumah tersebut menjadi terlalu panas untuk dapat didiami dengan nyaman. Mary menghabiskan sebagian besar waktunya di luar. “Kami semua – baik pria, wanita maupun anak-anak – pada malam hari tidur di alam terbuka,” kata Mary. “Saya telah menitipkan anak bungsunya yang berumur dua tahun di rumah tetangga, karena terlalu panas jika harus menghabiskan waktu sorenya di rumah ini.”

Mary tidak ingin menghabiskan waktunya di alam terbuka seperti itu, khususnya apabila laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan hilir-mudik di situ. Dia mencoba untuk tidak mengeluh tetapi kurangnya privasi merupakan masalah besar. Ia merasa malu jika harus menitipkan anaknya kepada tetangga setiap harinya. Yang terburuk, bahkan mereka harus tidur di luar yaitu di tempat umum ketika malam hari mulai panas dan lembab. Tempat penampungan dengan lapisan yang

Questions of minimum standards have been ignored

menyerap panas tanpa ventilasi yang layak. Plastik hitam yang membungkus bagian atap untuk mencegah terbangnya lembaran atap yang ringan justru membuat tempat ini menjadi semakin panas. Karena panasnya, para wanita terpaksa memasak di alam terbuka atau di dapur-dapur yang terpisah. Pertanyaan-pertanyaan mengenai standar minimal untuk kenyamanan dan privasi – yang memiliki dampak khusus bagi para wanita – telah terabaikan dengan sibuknya pembangunan rumah-rumah sementara. Sejumlah LSM berjanji akan menyediakan kipas angin untuk rumah-rumah dengan struktur seperti ini, kipas angin tersebut disediakan hanya untuk sirkulasi udara panas. LSM-LSM tersebut mulai menyadari bahwa mereka salah karena mengikuti contoh dari sejumlah kontraktor pemerintah ketika memilih bahan bangunan. “Kami melaksanakan apa yang mereka katakan,” kata seorang programme officer dari LSM ActionAid India. “Kami harus mengkoreksinya.”

“Kami harus pergi sampai ke Ernakulam di Kerala [enam jam lewat darat] untuk mendapatkan lembaran atap yang ringan,” kata Cleatus Ubald, direktur LSM lokal Social Education and Development (SED). “Kami telah memasang atap-atap rumah dengan menggunakan material lokal, seperti daun kelapa atau palem, serta memanfaatkan beberapa tenaga kerja lokal.” Para perwakilan LSM mengatakan bahwa para pejabat daerah melarang mereka untuk membuat struktur atap

tradisional, karena masih segar dalam ingatan masyarakat tentang kebakaran besar yang terjadi beberapa tahun lalu yang telah menewaskan banyak anak-anak yang sedang berada di bawah atap sebuah sekolah.

Indiadisasters.org telah memberi laporan dari tempat penampungan sementara dengan suhu “bagaikan dalam oven”. Inter Press Service (IPS) juga telah mendokumentasikan tentang masalah tempat penampungan sementara yang “bagaikan tempat sauna”. Di saat solusi teknologis – seperti pelindung anti panas, ventilasi atau saluran udara yang lebih baik – mulai tersedia, isu-isu tentang ruangan bagi para wanita di tempat-tempat penampungan tersebut juga harus ditangani secara efektif. Hanya lembaga-lembaga yang lebih berpengalaman yang menyediakan ruang terpisah untuk memasak, mencuci dan mandi. Oxfam menyediakan pendingin (cooler), mengatasi pondok-pondok yang ada di Cuddalore, serta menyediakan ruangan untuk kegiatan tertentu. Beberapa rumah bantuan dari Cordaid bahkan menyediakan ruangan

khususnya bagi para gadis remaja. Untuk dapat diterima dan dianggap layak, rumah-rumah tersebut harus dibangun setidaknya sesuai dengan standar perencanaan minimal dan mempertimbangkan persyaratan untuk kenyamanan dan privasi.

Kesimpulan

Faktor-faktor sosial, budaya dan biologis membuat para wanita dan anak-anak, khususnya perempuan, menjadi lebih rentan terhadap masalah kesehatan dan kekerasan pasca bencana. Tidak memadainya tempat tinggal membuat mereka semua menjadi semakin rentan. Kaum wanita yang berada di tengah-tengah komunitas tradisional Asia Selatan kemungkinan tidak dapat mengakses bantuan dengan aman serta memenuhi kebutuhan mereka. Ketiadaan pendidikan bagi anak-anak akan membuat generasi yang akan datang menjadi semakin rentan.

Untuk mengatasi semua kekhawatiran ini, berbagai pendekatan respons bencana harus dibedakan dan peka terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus wanita dan anak-anak. Dengan demikian pemberian bantuan harus mengikutsertakan pemahaman yang jelas tentang keadaan lingkungan sekitar dan pemahaman terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus dari seluruh lapisan masyarakat.

Max Martin (mantan mahasiswa Refugee Studies Centre) edits HYPERLINK “<http://www.indiadisasters.org>” www.indiadisasters.org. Ia bermarkas di Bangalore. Email: HYPERLINK “mailto:maxmartin@rediffmail.com” maxmartin@rediffmail.com

1. www.indiadisasters.org
2. www.ips.org/

Temporary shelter in Kanniyakumari district at India's southernmost tip.



Efektivitas respons: pandangan masyarakat yang menjadi korban

oleh Anisya Thomas dan Vimala Ramalingam

Disamping organisasi-organisasi bantuan yang kini sedang mereview kegiatan operasinya pasca-tsunami, sejumlah evaluasi yang melibatkan berbagai organisasi juga dilakukan. Penilaian pun dilakukan terhadap pendapat saat terakhir kalinya menerima pertolongan dan bantuan – bagi para penerima manfaat atau ‘beneficiaries’.

Baru-baru ini telah dilakukan survey oleh Fritz Institute di sejumlah daerah di India dan Sri Lanka yang dilanda tsunami serta pengamatan persepsi para penerima manfaat tentang efektivitas bantuan. Hasil awal menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi korban di India cenderung memiliki persepsi yang positif atas bantuan yang telah diterimanya dibandingkan dengan mereka yang ada di Sri Lanka.

India dan Sri Lanka memiliki skenario bantuan yang berbeda. India ‘secara resmi’ menutup pintunya bagi lembaga-lembaga bantuan internasional yang tidak memiliki perwakilan atau mitra kerja di negara tersebut. Pemberian bantuan oleh Pemerintah India, pemerintah daerah, LSM, berbagai organisasi internasional, perusahaan-perusahaan swasta dan pihak militer dikoordinir oleh pemerintah. Di Sri Lanka, LSM-LSM internasional, regional maupun daerah relatif diberi kebebasan untuk masuk ke masyarakat yang menjadi korban tsunami (kecuali di Provinsi bagian Utara and Timur yang secara politis sangat sensitif). Meskipun banyak LSM besar dan berpengalaman yang turut serta, namun masih terdapat persepsi bahwa bantuan yang ditawarkan kepada masyarakat di Sri Lanka kurang memadai. Penyelidikan terhadap kemungkinan alasan-alasan dibalik perbedaan persepsi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan menyangkut perbedaan efektivitas bantuan dalam dua skenario yang berbeda – di satu sisi dengan sistem koordinasi terpusat seperti yang terjadi di India, sedangkan yang lainnya dengan sistem yang lebih ‘informal’, seperti halnya kebebasan di Sri Lanka.

Para responden dalam survey ini adalah anggota keluarga korban tsunami yang telah dewasa yang telah kehilangan anggota keluarganya dan/atau telah menerima bantuan pasca-tsunami. Mereka terdiri dari satu orang perwakilan sample dari warga korban bencana, yaitu: di India,

800 orang dari 100 desa di 12 kabupaten; di Sri Lanka, 600 orang dari 97 desa. Dengan mata pencaharian dominan adalah nelayan – 93% di India dan 58% di Sri Lanka. Dalam tiap-tiap keluarga korban, anggota keluarga yang telah dewasa merupakan responden kunci sedangkan yang lainnya hanya sebagai pendukung. Baik di India maupun di Sri Lanka, mayoritas responden kunci adalah wanita. Data dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan dengan bahasa daerah oleh sejumlah tim yang terdiri dari pewawancara yang telah terlatih dengan menggunakan pertanyaan bebas (open-ended questions).

48 jam pertama

Pewawancara pertama-tama menanyakan tentang kesan dan persepsi selama 48 jam pertama setelah tsunami. Hanya 48% dari responden di India yang mengatakan bahwa mereka menerima bantuan. Sedangkan persentase di Sri Lanka justru lebih rendah (31%). “Tidak ada seorang pun yang datang untuk mencari orang-orang di sini ... Kami semua sangat shock untuk dapat bersikap atau bahkan untuk dapat menolong orang lain,” kata seorang wanita nelayan di India. Efektivitas upaya penyelamatan pun turut dipertanyakan. “banyak orang yang datang dari desa-desa lain tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak,” kata responden lainnya. Laporan dan wawancara lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar upaya penyelamatan dan pemberian bantuan darurat dilakukan oleh para relawan dari wilayah tetangga dan relawan lokal yang belum terlatih.

Respons berdasarkan jenis bantuan yang diterima dalam 48 jam pertama menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara India dan Sri Lanka. Dari 11 jenis bantuan yang disebutkan dalam survey tersebut – antara lain penyelamatan, identifikasi/pemakaman bagi korban tewas, pembersihan sampah, pelayanan

kesehatan dan relokasi – secara signifikan lebih banyak masyarakat di India yang mengatakan bahwa mereka telah menerima bantuan ini dibandingkan dengan jumlah mereka yang ada di Sri Lanka. 49% masyarakat di India menerima bantuan untuk pengurusan relokasi dalam dua hari pertama, tetapi di Sri Lanka – yang mengalami musibah lebih parah – angka persentasenya hanya sekitar 3%. India mendapatkan bantuan pasokan air sebanyak 85%, sedangkan di Sri Lanka hanya 15%. 66% responden di India memiliki akses ke pelayanan-pelayanan medis darurat; sedangkan di Sri Lanka hanya 33%.

Terdapat pula perbedaan kecepatan dalam pemberian bantuan. Hanya 15% dari ma-



syarakat di India dan 8% di Sri Lanka yang mengatakan bahwa pembersihan sampah telah dilakukan pada 48 jam pertama (untuk memfasilitasi upaya-upaya pencarian). Sebaliknya, bantuan makanan justru telah mencapai 90% masyarakat di India dan 78% di Sri Lanka dalam jangka waktu 48 jam pertama. Bahkan terlalu banyak pada saat itu. “Semua jenis makanan olahan telah kami terima dan berlebihan,” kata seorang responden dari India.

Perbedaan profil penyedia bantuan awal sangat dramatis. Menurut para responden di India, pemerintah daerah menyediakan sejumlah bentuk bantuan untuk sekitar 86% responden pada 48 jam pertama. Sedangkan di Sri Lanka, hanya berkisar 4%. Berdasarkan laporan, administrasi lokal di India terkesan berlebihan, khususnya di negara bagian Selatan India yaitu Tamil Nadu. Seperti komentar mereka yang selamat: “Kami tidak tidur, bahkan para pejabat dari Kolektorat [administrasi kabupaten].” Sekitar setengah dari responden di India mengatakan bahwa mereka dibantu oleh LSM dan organisasi kemasyarakatan dan 12% oleh Angkatan

Darat. Di Sri Lanka, angkatan darat memberikan bantuan bagi 39% responden, LSM dan organisasi internasional juga telah membantu 37% responden. Sedangkan Pemerintah Sri Lanka hanya membantu 4% dari responden dimaksud. Sebuah komentar khusus terlontar dari seorang korban selamat: “Kemana pemerintah ketika semua ini terjadi? Semuanya serba kacau.”

Bantuan Jangka Panjang

Kami juga mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui kesan-kesan terhadap operasi pemberian bantuan yang telah dilakukan selama 60 hari pertama. Baik di India maupun di Sri Lanka lebih dari setengah responden yang diwawancarai merasa bahwa distribusi makanan memiliki kualitas diatas rata-rata, tetapi sekitar 40% mereka merasa terhina dengan cara mereka menerima bantuan makanan tersebut dan dengan metode distribusi yang digunakan. “Terkadang kami merasa seperti pengemis dengan cara pendistribusian dan koordinasinya,” kata salah seorang responden. Di India pemerintah mengambil kendali hampir seluruh aspek

pemberian bantuan, sedangkan di Sri Lanka hal tersebut dipegang oleh LSM-LSM internasional. Di India, peranan sektor swasta tampaknya tidak menonjol.

Hasil awal yang disajikan di sini lebih banyak menimbulkan pertanyaan daripada jawaban. Namun demikian, tetap menyoroti tentang perlunya memasukkan masyarakat korban dalam penilaian efektivitas bantuan dan pengembangan hikmah dari pelajaran yang diambil.

Anisya Thomas adalah Managing Director, Fritz Institute (www.fritzinstitute.org). Email: HYPERLINK “mailto:anisya.thomas@fritzinstitute.org” anisya.thomas@fritzinstitute.org

Vimala Ramalingam adalah Mantan Sekretaris Umum Palang Merah India. Email: HYPERLINK “mailto:vimalaramalingam@yahoo.com” vimalaramalingam@yahoo.com

The tsunami swept away all thatched houses and severely damaged those made of bricks or concrete. Ininthakarai, India



Korban yang tak berdosa: tsunami di Maladewa

oleh Heidi Brown

The December 2004 tsunami thrust the Republic of Maldives into the public eye, changing its image overnight from idyllic honeymoon destination to disaster zone.

Tsunami pada bulan Desember 2004 membuat Republik Maladewa menjadi sorotan publik, reputasinya sebagai tempat tujuan bulan madu terindah tiba-tiba berubah menjadi zona bencana. Kepulauan dengan sekitar 1.200 pulau karang ini memiliki titik tertinggi yang terendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia yaitu hanya 2,4 meter. Sedangkan jumlah korban yang sangat sedikit, gelombang laut justru menimbulkan kerusakan dahsyat di seluruh penjuru negeri:

- n 108 jiwa tewas atau hilang.
- n Tiga belas dari 199 pulau yang berpenduduk telah sepenuhnya kosong.
- n Lapisan tanah humus hanyut ke laut.
- n Lebih dari 100 pulau kehilangan infrastruktur inti untuk pendidikan, kesehatan, transportasi dan/atau komunikasi.
- n Sepuluh persen perumahan hancur dan sebagian besar lainnya rusak.
- n Sekitar 15.000 hingga 30.000 orang (5-10% penduduk) pada mulanya mengungsi.
- n Kehidupan dan mata pencaharian dari sepertiga penduduk disini hancur oleh adanya bencana tersebut.

By mid-March the government's Internally Displaced Persons (IDP) Unit estimated that there were at least 12,000 long-term IDPs in the country. However, there is very limited information about the true number as this population is quite mobile and many have sought shelter with extended family.

Unlike many of the other countries affected by the tsunami, the Maldives has no recent experience of natural disasters or armed conflict and so was unprepared to deal with an emergency on this scale. The challenge was made greater because the country had a limited UN presence prior to the disaster (UNDP, UNICEF, UNFPA and WHO had small offices). The UK charity Voluntary Service Overseas (VSO) was the only international NGO based in-country and the local NGO sector was small. As the services of the international community were in demand in so many countries and in the absence of a national plan for dealing with IDPs, the Maldivian government faced a steep learning curve in the early stages of the disaster.

In the emergency relief phase, transport was the most significant factor limiting the distribution of water, food and

medical supplies, restoration of electrical power and information gathering. The geography of the Maldives is challenging at the best of times, with the 199 inhabited islands dispersed in a strip running 850km north to south. However, much of the transport infrastructure was lost to the tsunami, with damage to airports, harbours and jetties and destruction of many boats. An entire atoll (Laamu Atoll) was out of telephone contact for several days. Hingga pertengahan bulan Maret, satuan tugas yang mengurus pengungsi internal atau disebut Internally Displaced Persons (IDP) Unit dari pemerintah memperkirakan bahwa sedikitnya terdapat 12.000 IDP jangka panjang di negara tersebut. Akan tetapi, hanya ada sedikit informasi mengenai jumlah mereka sebenarnya karena populasi ini sering berpindah-pindah dan banyak diantaranya telah mendapatkan tempat tinggal bersama dengan keluarganya yang lain.

Tidak seperti kebanyakan negara lainnya yang dilanda tsunami, Maladewa tidak memiliki pengalaman mengenai bencana alam atau konflik bersenjata sehingga tidak siap untuk menghadapi keadaan darurat sedemikian rupa. Tantangan terasa semakin berat karena sebelum terjadinya bencana hanya ada beberapa lembaga PBB di negara tersebut (UNDP, UNICEF, UNFPA dan WHO dengan kantor yang cukup kecil). Lembaga amal dari Inggris yaitu Voluntary Service Overseas (VSO) adalah satu-satunya LSM internasional yang ada di negara tersebut dan sektor LSM lokal juga sangat sedikit. Karena banyaknya permintaan bantuan dari masyarakat internasional di banyak negara dan tidak adanya suatu rencana nasional yang menangani masalah IDP ini, maka pemerintah Maladewa mengalami suatu kurva pembelajaran yang cukup tajam pada tahap-tahap awal terjadinya bencana.

Dalam tahap tanggap darurat, transportasi merupakan faktor paling signifikan yang dapat menghambat distribusi air, pasokan makanan dan obat-obatan, pemulihan tenaga listrik dan perolehan informasi. Letak geografis Maladewa merupakan tantangan terbesar sepanjang zaman, dengan 199 pulau berpenduduk yang tersebar sepanjang 850 km dari utara ke selatan. Akan tetapi, banyak sarana transportasi yang hilang ditelan tsunami, dengan kerusakan pada bandar udara, pelabuhan dan dermaga serta menghancurkan kapal-kapal boat yang ada. Hubungan telepon di Pulau karang atoll (Laamu Atoll) juga

terputus selama beberapa hari.

Dalam keadaan sedemikian rupa, respons bantuan benar-benar efektif. Khususnya, distribusi air dan pasokan makanan secepatnya dan pembangunan sarana-sarana sanitasi untuk mencegah berjangkitnya penyakit menular dan tidak sampai ada lagi korban tewas selain yang langsung diakibatkan oleh tsunami. Akan tetapi, pada jangka panjang, negara tersebut akan menghadapi tantangan yang sangat besar. Selain perbaikan kerusakan fisik, psikososial dan ekonomi yang diakibatkan oleh gelombang laut dan pemulihan taraf hidup sebelum-tsunami, juga masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan untuk mengurangi kerentanan pulau-pulau kecil ini terhadap berbagai bencana alam di masa yang akan datang, terutama prediksi mengenai kenaikan tinggi permukaan laut akibat perubahan cuaca secara global. Isu mengenai IDP dengan jelas menggambarkan tentang sulitnya untuk mengimbangi antara kebutuhan para keluarga dan komunitas pasca tsunami dengan tujuan pembangunan jangka panjang negara tersebut secara keseluruhan.

Karena penduduk masing-masing pulau memiliki keunikan sifat tersendiri dengan identitas kesukuan yang kuat, maka harus ada solusi yang berbeda dalam pelaksanaan pembangunan rumah sementara. Tempat tinggal model asrama pada mulanya telah dibangun di beberapa pulau, dengan ruang tidur yang cukup lapang dan fasilitas kamar mandi, dimana seluruh makanan diproduksi oleh sebuah kantin sentral. Akan tetapi menurut Mauroof Jameel dari Pusat Manajemen Bencana Nasional, banyak IDP yang tidak senang jika harus berbagi fasilitas dengan keluarga lainnya dan mereka juga ingin dapat memasak makanan sesuai dengan selera mereka sendiri. Hal ini hanya akan meningkatkan rasa kurang bebas bagi komunitas pengungsi tersebut yang sebelumnya telah kehilangan akses untuk melakukan aktivitasnya mencari nafkah, seperti penangkapan dan pengolahan ikan serta sektor pariwisata. Selanjutnya, cara ini digantikan dengan membuat ruangan dengan tiga bilik, dimana satu kamar untuk satu keluarga dengan tempat masak dan fasilitas kamar mandi tersendiri.

Di pulau lain, keluarga yang menjadi tuan rumah dengan senang hati menerima orang lain yang terlantar untuk tinggal di rumah mereka. Akan tetapi, karena situasi ini terus berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, maka tuan rumah pun cenderung merasa keberatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tracey Larman, VSO Child Protection Advisor pada Unit Pemerintahan yang mengurus masalah Hak-hak Anak: "Tekanan yang timbul akibat keramaian yang berlebihan dalam jangka panjang,

kurangnya privasi, stres dan kegelisahan dapat menimbulkan masalah bagi tuan rumah maupun IDP itu sendiri serta memiliki implikasi yang serius bagi perlindungan anak.” UNFPA Maladewa juga telah memperingatkan bahwa kurangnya privasi di rumah maupun di tempat-tempat tinggal sementara dapat meningkatkan resiko kekerasan serta pelecehan seksual bagi para wanita dan gadis remaja. Salah satu solusi yang dikemukakan oleh Alif Dhaal untuk pulau Maamigili adalah dengan membuat ruang tambahan di kamp-kamp tempat keluarga IDP tinggal, dengan demikian dapat mengurangi kepadatan yang berlebihan (overcrowded) dalam waktu singkat dan berdampak cukup baik bagi keluarga tuan rumah yang telah bermurah hati menampung mereka. Pemerintah juga menyediakan pasokan makanan pokok bagi tuan rumah.

Pada awal Maret, Kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan atau Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) melakukan sebuah misi ke Maladewa untuk menilai kondisi para IDP. Laporan pendahuluan mereka menyimpulkan bahwa jumlah rumah yang dibangun sementara cukup banyak. Namun demikian, karena masyarakat kurang memahami pedoman internasional, maka kekuatannya pun tidak memenuhi standar Sphere, dengan demikian pembangunan perumahan sementara ini terus berlanjut dengan tujuan memenuhi standar tersebut.

Laporan OCHA juga menyoroti tentang kekhawatiran antar para IDP karena kurangnya informasi menyangkut masa depan mereka. Dalam Rencana Pemulihan dan Rekonstruksi Nasional, yang dipublikasikan pada bulan Maret 2005, Pemerintah Maladewa melakukan konsultasi

masyarakat dalam perencanaan jangka panjang. Mauroof Jameel memprediksikan bahwa mereka akan menghadapi berbagai kebutuhan spesifik dari komunitas pulau-pulau yang berbeda pada saat melancarkan isu-isu mengenai relokasi tersebut.

Pada tahun 1998, pemerintah memperkenalkan Kebijakan Konsolidasi Kependudukan dan Pembangunan untuk mendukung program migrasi internal sukarela untuk mengurangi jumlah penduduk di kawasan pulau. Alasan pokok yang mendasari strategi ini antara lain::

- n Tidak ada lagi fakta kebutuhan historis penyebaran, termasuk kedekatan dengan daerah tangkapan ikan, seiring dengan tersedianya sarana angkutan bermotor, pendinginan dan pemrosesan ikan di atas kapal.
- n Duplikasi infrastruktur dan pelayanan umum di 199 pulau, 59 % diantaranya dengan jumlah penduduk di bawah 1.000 orang, membuat sumber-sumber daya pemerintah menjadi terbagi dengan jumlah tenaga kerja yang sangat sedikit.
- n Konsolidasi yang memungkinkan penduduk untuk meningkatkan akses ke berbagai pelayanan khusus yang lebih tinggi.

Karena kuatnya identitas pulau-pulau tersebut, maka telah terbukti bahwa cukup sulit membujuk masyarakat untuk pindah. Setelah membuat seluruh komunitas terlantar dan memporak-porandakan infrastruktur di sejumlah pulau, tsunami justru telah membawa isu-isu tersebut ke meja perdebatan yang berkenaan dengan perencanaan rekonstruksi jangka panjang. Haruskah pemerintah membangun kembali pulau-pulau yang telah didiami berabad-

abad lamanya namun jelas-jelas sangat rentan? Atau haruskah mereka menargetkan dana-dana dan upaya rekonstruksinya untuk pelaksanaan relokasi warga ke berbagai pulau dengan pelayanan yang lebih baik dan peningkatan perlindungan terhadap lingkungan?

Sebagai bagian dari Rencana Pemulihan dan Rekonstruksi Nasional, pemerintah telah memilih lima pulau yang akan dibangun untuk menampung penduduk yang direlokasi. Prioritas perpindahan ini akan diberikan kepada masyarakat dari pulau-pulau yang rumahnya mengalami kerusakan cukup parah, tetapi relokasi juga akan dilakukan bagi penduduk pulau kecil dan pulau rentan lainnya sesuai dengan permintaan. Untuk mempermudah relokasi warga, pulau yang menjadi tujuan tersebut akan dibangun dan dilengkapi dengan:

- n rfasilitas perumahan dan kemasyarakatan
- n pelayanan umum dengan berbagai tingkatans
- n berbagai sektor ekonomi
- n hubungan transportasi yang baik dengan pulau-pulau lainnya
- n infrastruktur yang dapat mengkomodir pertumbuhan lebih lanjut.

Pulau-pulau tersebut merupakan pulau pertama yang akan menjadi target untuk pengembangan bantaran pasir pelindung untuk dapat mengurangi dampak tsunami mendatang serta menjadi lokasi bagi gedung-gedung berlantai banyak yang berfungsi sebagai tempat persinggahan yang aman seandainya terjadi tsunami di masa yang akan datang – dan ini merupakan strategi yang pada akhirnya akan diterapkan di seluruh negeri.

Rencana Pemulihan dan Rekonstruksi Na-



sional menyebutkan bahwa: 'Pergeseran dan relokasi penduduk sepenuhnya didasarkan pada permintaan dan kerelaan.' Jika tidak, upaya relokasi untuk mengevakuasi penduduk hanyalah sia-sia belaka. Jika sebagian besar penduduk pulau ingin pindah, maka tidak mungkin bagi penduduk yang tersisa untuk kembali ke rumahnya dan memperbaiki kembali kerusakan yang telah terjadi. Bahkan mereka yang ingin pindah harus melakukan penyesuaian secara besar-besaran untuk beradaptasi dengan rumah baru mereka, disamping trauma yang mereka alami sejak awal terjadinya bencana. Untuk itu, diperlukan dukungan psikososial yang komprehensif.

Aishath Shahula Ahmed adalah seorang Koordinator Konseling pada LSM lokal Society for Health Education (SHE), dan Koordinator Pelaksana dari Psychosocial Support Unit (PSU) di Pusat Manajemen Bencana Nasional. Ia menggambarkan tentang tantangan yang cukup besar dalam pemberian dukungan psikososial bagi ribuan orang yang mengalami

trauma di negara yang hanya memiliki sedikit penasehat konseling atau hanya dengan satu orang psikiater. Respons dimulai sesaat setelah peristiwa terjadi, dimana penasehat konseling profesional lokal telah meluangkan waktunya. Sejak saat itu Palang Merah India (Indian Red Cross), dengan bantuan dari UNFPA, telah mengadakan training 'Pertolongan Pertama Psikologis' dan sejumlah tim dari Maladewa telah mengunjungi lebih dari 70 pulau untuk melakukan 'ventilation' dasar (singkatan dari active listening) serta penyerahan kasus kasus trauma psikologis yang cukup hebat. Dengan bantuan dari UNICEF, mereka juga menggunakan terapi berbasis-permainan dan seni yang sangat efektif untuk membantu anak-anak untuk kembali ke masa-masa yang pernah mereka alami – hal ini seringkali sulit ketika para orang tua hanya memfokuskan pada kelangsungan hidup dari hari ke hari.

Kemungkinan PSU ini akan segera menjadi bagian resmi pada bagian departemen pemerintah. Bersama dengan berbagai

wacana lainnya yang pernah dikemukakan mengenai respons bencana, dukungan psikososial akan selalu menjadi bagian dalam bahasa sehari-hari baik di kalangan pemerintahan maupun rakyat sipil di Maladewa. Adalah hal yang mustahil untuk merencanakan masa depan tanpa mengacu kepada berbagai peristiwa yang terjadi sebelumnya. Besar harapan semoga Maladewa akan dapat mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam menghadapi bencana apapun yang menimpanya di tahun-tahun mendatang.

Heidi Brown adalah seorang relawan dari VSO ([HYPERLINK "http://www.vso.org"](http://www.vso.org) www.vso.org) yang bekerja pada Departemen Kesehatan, Maladewa. Email: [HYPERLINK "mailto:heids_on_tour@yahoo.com"](mailto:heids_on_tour@yahoo.com) heids_on_tour@yahoo.com. Artikel ini ditulisnya sendiri.

1. www.tsunamimaldives.mv
2. www.sphereproject.org

Perspektif Rakyat Afrika terhadap tsunami

oleh Bahame Tom Nyanduga

Tsunami telah mengingatkan kita bahwa dunia adalah sebuah perkampungan yang global dengan berbagai kerentanan, akan tetapi mengapa kebutuhan negara Afrika masih saja dinomorduakan.

Di saat perhatian masyarakat internasional terfokus pada kerusakan yang dialami negara-negara di Asia Selatan, justru hanya sedikit perhatian yang diberikan terhadap dampak tsunami yang menimpa wilayah bagian barat Samudera India, yaitu sekitar enam ribu kilometer dari pusat gempa. Menurut laporan, 10 orang tewas di Tanzania dan 2 orang di Kenya, tetapi di Somalia tanpa adanya perhatian dari pemerintah pusat dengan kondisi terombang-ambing oleh dampak peperangan dan kekeringan yang telah berlangsung selama 14 tahun (lihat artikel yang ditulis oleh OCHA halaman ??) mengalami dampak yang paling parah – 290 orang tewas dan sekitar 54.000 jiwa mengungsi. Sebanyak enam ratus kapal boat ikan yang menjadi andalan pendapatan bagi 75% masyarakat pesisir ikut rusak. Kehidupan warga sepanjang 650 km antara Hafun dan Garacad di sebelah timur laut hingga ke arah selatan daerah Juba yang lebih rendah, bagian selatan Mogadishu juga ikut hancur. Kerusakan terparah terjadi di Puntland, yaitu sebuah daerah yang telah mendeklarasikan otonominya sendiri. Infrastruktur di kota Hafun juga hampir seluruhnya hancur. Kenyataan bahwa Somalia tidak memiliki suatu pemerintahan yang dapat memberikan bantuan, membuat negara tersebut bergantung pada PBB. UNICEF dan World Food Program telah banyak ber-

hasil walau dengan sumber daya yang terbatas sedangkan para donor tidak responsif terhadap apa yang dibutuhkan oleh negara yang bersangkutan. Pada awal April hanya 3% dari dana yang diusulkan dalam Consolidated Appeal for Somalia 2005 dari PBB yang dijanjikan.

Dua orang tewas di negara Seychelles yang berada di kawasan Samudera India dan sekitar 900 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Gelombang laut telah mengakibatkan banjir yang luar biasa dan kerusakan sarana transportasi yang cukup parah termasuk pelabuhan-pelabuhan, jaringan jalan, fasilitas jembatan umum, perumahan, dan harta benda milik pribadi di pulau Mahe dan Praslin. Pemerintah mengestimasi biaya perbaikan kerusakan sebesar \$30 juta. Namun demikian, tanggapan dari masyarakat internasional cukup lamban. Pada awal Mei, Seychelles hanya menerima \$4,4 dari total \$11,5 juta yang dianggarkan dalam UN's Indian Ocean Flash Appeal dan pelaksanaan proyek-proyek rehabilitasi yang telah direncanakan juga tertunda. Kenya dan Tanzania adalah dua negara terakhir yang dilanda tsunami. Para turis dievakuasi dari pantai yang ada di berbagai lokasi wisata tetapi pemberitaan tidak pernah menyebutkan tentang mereka yang tewas. Tidak ada mekanisme yang memungkinkan pihak yang berwenang untuk menyampaikan

informasi dari negara lain tentang potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh gelombang pembunuh tersebut. Tsunami telah menunjukkan tentang perlunya kesiapan pertahanan sipil serta berbagai program mitigasi bencana di Afrika. Berkenaan dengan hal ini, Komunitas Palang Merah China (Chinese Red Cross Society) dan Pemerintah China telah menyalurkan bantuan kepada Komunitas Palang Merah Tanzania (Tanzania Red Cross Society) untuk peningkatan kemampuan respons bencana.

Masyarakat internasional seharusnya dapat melakukan sesuatu yang lebih untuk membantu masyarakat, komunitas, dan negara-negara yang dilanda tsunami cukup parah di Afrika. Berbagai respons terhadap bencana alam di masa mendatang di Afrika harus dibentuk dengan memperhatikan relevansinya dengan Pedoman Prinsip-prinsip dari PBB menyangkut Perpindahan secara Internal (UN Guiding Principles on Internal Displacement).

Bahame Tom Nyanduga adalah seorang anggota African Commission on Human and Peoples' Rights, serta Reporter Khusus yang berkenaan dengan Pengungsi, Para Pencari Suaka dan orang yang secara internal terlantar atau Internally Displaced Persons di Afrika. Email: [HYPERLINK "mailto:btomn@yahoo.com"](mailto:btomn@yahoo.com) btomn@yahoo.com

Tsunami memperburuk kerentanan yang ada di Somalia

oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UN-OCHA), Somalia

Tsunami telah memperparah situasi kemanusiaan yang sebelumnya memang sudah cukup memprihatinkan akibat kemarau yang berkepanjangan, hujan es yang tak terduga, angin topan, maraknya kekerasan serta banjir yang kerap kali terjadi.

Tsunami struck just as the Tsunami melanda tidak lama bersebelang setelah berakhirnya musim kemarau dan disaat mata pencaharian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pun mulai pulih dari guncangan beruntun. Tsunami telah menghancurkan sebagian kawasan pantai, khususnya sepanjang 650 kilometer dari garis pantai yang ada di wilayah Puntland, mulai dari Hafun di bagian utara hingga ke Garacad di bagian selatan. Dampak tsunami telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, kontaminasi sumber-sumber air dan kehilangan sumber mata pencaharian. Sekitar 44.000 orang (lebih kurang 7.300 kepala keluarga) membutuhkan bantuan kemanusiaan darurat, termasuk air minum, makanan dan obat-obatan serta bantuan untuk konstruksi dan/atau rehabilitasi rumah dan tempat tinggal. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah pantai juga terganggu.

Banyak penduduk Somalia yang bermigrasi ke daerah pantai selama puncak musim ikan (Oktober s/d Februari) untuk menangkap, mengolah atau menjual ikan. Oleh karena itu ketika tsunami menerjang, jumlah penduduk yang ada di sepanjang garis pantai pun luar biasa padat, yang mengakibatkan korban tewas dan/atau sekitar 289 nelayan hilang. Dampak yang dirasakan oleh industri perikanan sangat signifikan dimana aktivitas di bidang ini merupakan sumber mata pencaharian utama bagi komunitas pantai.

Bagi komunitas pastoralis, adalah hal biasa apabila beberapa anggota keluarga bermigrasi dengan ikut membawa ternak miliknya untuk jangka waktu yang cukup lama setiap tahunnya untuk mencari air dan menggembala, sedangkan keluarga lainnya tetap berada di daerah dimana mereka dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Banyak kaum pastoralis yang melarat karena musim kemarau berkepanjangan selama empat tahun berturut-turut yang telah menewaskan hewan gembalaannya pindah ke daerah pantai untuk mencari sumber penghidupan yang baru. Sisa sumber penghidupan mereka pun hilang ditelan tsunami. Bagi

sebagian kaum pastoralis, tsunami telah menjadi jalur terakhir yang memak-sanya untuk melanggar tembok strategi tradisional.

Masyarakat internasional memberikan respons yang cukup cepat terhadap bencana tsunami ini dan menyalurkan bantuan kepada mereka yang tertimpa musibah, dengan segala macam masalah yang berkenaan dengan jalan masuk, ketidakamanan secara umum, isolasi serta buruknya sarana jalan. Pada bulan Pebruari 2005, misi penilaian multi-sektoral yang dilakukan oleh lintas-lembaga menegaskan bahwa keperluan kemanusiaan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ditimpa bencana sebagian besar telah terpenuhi karena adanya stok bantuan yang telah terlebih dahulu disiapkan serta tambahan stok yang dibeli dengan memanfaatkan dana yang diterima melalui Indian Ocean Flash Appeal. Misi tersebut merekomendasikan agar rencana respons ini dilanjutkan dari tanggap darurat ke arah pemulihan dan rehabilitasi, sementara sedikitnya 40% dari masyarakat yang terkena musibah tetap menerima bantuan dan dukungan nafkah hingga tiba musim ikan selanjutnya pada bulan Oktober 2005.

Saat ini, UN Country Team di Somalia sedang memproses penyelesaian proyek pembangunan terpadu bagi kawasan yang dilanda tsunami. Hal ini dapat memungkinkan adanya respons tsunami tambahan yang terintegrasi dalam konteks secara luas menyangkut situasi kemanusiaan yang cukup serius di Somalia. Team ini juga akan memastikan bahwa respons tsunami sudah benar-benar proporsional dan memperhatikan kebutuhan kemanusiaan lainnya.

“the only thing we eat is the dust left behind by your trucks”

Selain wilayah yang terkena bencana tsunami, ancaman kekurangan makanan dan mata pencaharian serta kerentanan secara keseluruhan juga muncul di berbagai daerah di Somalia. Dalam penilaian post deyr (short rains) yang dikeluarkan awal tahun 2005, Bagian Analisis Ketahanan Pangan dari FAO telah menggaris-bawahi bahwa lebih dari 500.000 orang masih membutuhkan bantuan kemanusiaan darurat karena permasalahan yang timbul akibat degradasi lingkungan, dampak kemarau yang berkepanjangan, banjir, perselisihan antar masyarakat sipil dan pemberlakuan embargo perdagangan. Disamping itu, sekitar 370.000 IDP hidup dalam kondisi yang sulit dan memprihatinkan dengan akses yang sangat minimal untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dan kesempatan untuk mencari nafkah. Di daerah-daerah yang dilanda konflik lokal dan kemarau yang berkepanjangan, tercatat tingkat kekurangan gizi yang cukup tinggi yaitu 20% lebih, khususnya di beberapa daerah di wilayah Juba dan Gedo.

For many pastoralists the tsunami has been the final straw leading to the breakdown of traditional coping strategies.

Karena respons tsunami telah memenuhi sebagian besar kebutuhan darurat bagi mereka yang terkena musibah, maka fokus kita saat ini beralih ke kelompok rentan lainnya. Dengan tertujuanya perhatian kepada bencana tsunami, kesetaraan terhadap proyek-proyek penyelamatan jiwa bagi kelompok rentan lainnya menjadi terancam. Kebutuhan akan persamaan dan kesetaraan dalam hal alokasi sumber daya tersebut didengarkan para pastoralis yang melarat, mereka mengeluh setelah melihat bantuan yang dikirim untuk daerah yang terkena tsunami sambil berkata “yang kami makan hanyalah debu yang ditinggalkan oleh truk-truk anda yang lewat.”

Artikel ini ditulis oleh staff UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Somalia. Untuk informasi lebih lanjut, email: [HYPERLINK "mailto:dilorenzo@un.org"](mailto:dilorenzo@un.org) dilorenzo@un.org atau [HYPERLINK "mailto:nduta@un.org"](mailto:nduta@un.org) nduta@un.org

Gambar-gambar ini berasal dari koleksi 62 lukisan anak-anak yang tinggal di daerah Batticaloa di Sri Lanka. Anak-anak berumur lima sampai dengan 16 tahun, melukis untuk membantu menghilangkan kesedihan mereka akibat tsunami. Lukisan-lukisan ini dipamerkan di National Gallery of Wales dan pada bulan Desember 2005 akan dilelang secara online untuk menggalang dana bagi rumah yatim piatu di desa Kathiraveli (dimana banyak diantara mereka tinggal bersama-sama dengan anak-anak yatim piatu ini selama dua-dekade terjadinya konflik) dan Living Heritage Trust yaitu sebuah organisasi lokal yang

dengan dibantu oleh para relawan dari seluruh dunia bekerja untuk membantu para korban tsunami yang selamat untuk membangun kembali kehidupan mereka..

Para pembaca FMR yang berminat untuk ikut serta dalam pelelangan dan memberikan sumbangan dapat menyalurkannya melalui:

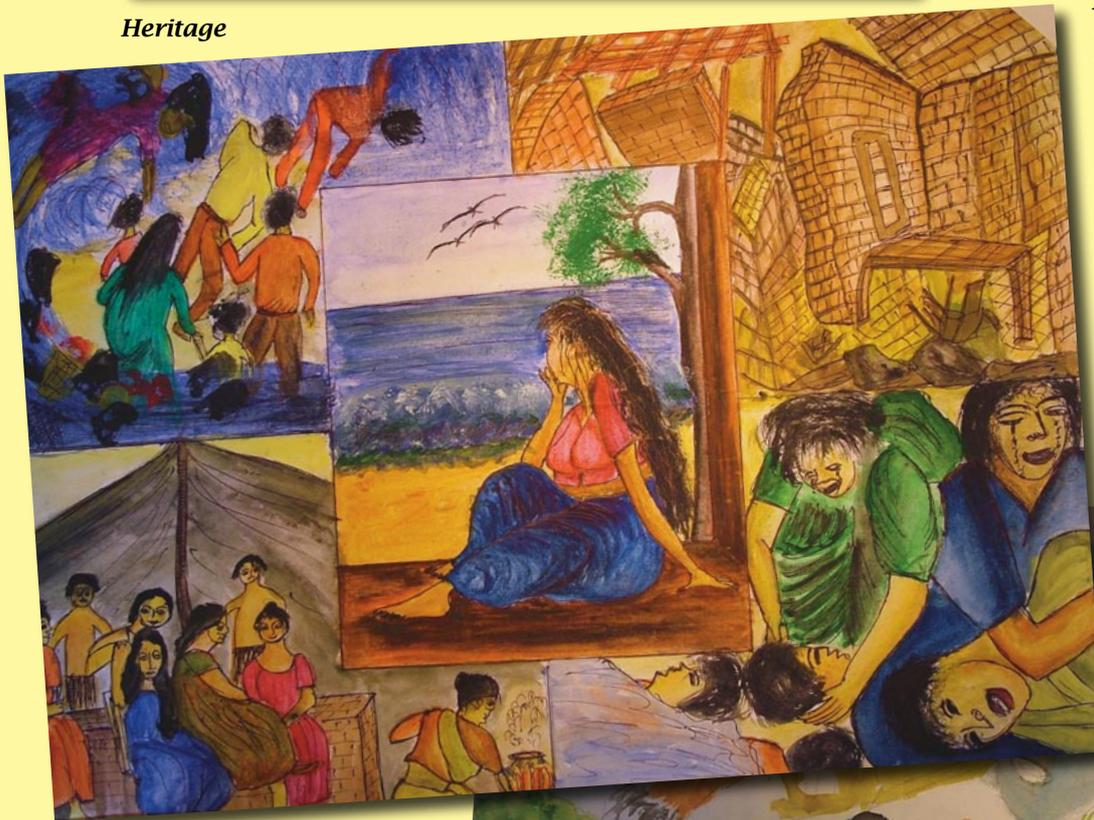
Llanwrtyd Wells Tsunami Appeal, HSBC, 35 High Street, Builth Wells, Powys LD2 3DL, Wales, UK. Account number 41390856. Sort code 40-15-14

Untuk informasi lebih lanjut tentang karya seni dan pelelangan silahkan hubungi Gwyneth Keeble: tel + 44 (0)1591 610645; email [HYPERLINK "mailto:Terry9254@aol.com"](mailto:Terry9254@aol.com) Terry9254@aol.com



Heritage

Informasi tentang Living and the child artists ada di [HYPERLINK "http://livingheritage.org"](http://livingheritage.org) <http://livingheritage.org> and [HYPERLINK "http://news.websfor.com/lankarelief/home/home.asp?A969"](http://news.websfor.com/lankarelief/home/home.asp?A969) <http://news.websfor.com/lankarelief/home/home.asp?A969> atau kirim surat ke 46-C, Fisherman Road, Tiruchendur, Kallady, Batticaloa, Sri Lanka. gTel: +94 77 318 4484.



**FORCED
MIGRATION
review**

www.fmreview.org